



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA  
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial, dipandang perlu menyusun rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
  - b. bahwa dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan sistematis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disebut Renaksi Pengelolaan BWN-KP adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
3. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 2

- (1) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan pedoman nasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (2) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

- (1) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. isu, visi dan misi;
  - b. arah strategis, kebijakan dan strategi pelaksanaan;
  - c. wilayah pengelolaan;
  - d. program dan kegiatan; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pengelolaan BWN-KP tahun 2020 dan tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 digunakan sebagai pedoman:

- a. penyusunan atau penyesuaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan kementerian/lembaga dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan pada kurun waktu tahun 2020-2024;
- b. penyusunan atau penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan pada kurun waktu tahun 2020-2024;
- c. koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi pelaksanaan rencana lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, indikator, pendanaan, dan pelaksana; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Pendanaan atas pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP setiap tahun anggaran.
- (2) Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit program, kegiatan, dan indikasi pendanaan.
- (3) Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan kementerian/lembaga dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (4) Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi pembangunan perbatasan yang dikoordinasikan oleh BNPP.
- (5) Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan BNPP.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian program dan kegiatan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan strategis Pemerintah dan kemampuan keuangan negara.

(3) Penyesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP.

Pasal 8

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPP.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah kabupaten/kota atau unit kerja yang membidangi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah provinsi melaksanakan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi atau unit kerja yang membidangi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

(3) Gubernur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (3) Gubernur menyinergikan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di kabupaten/kota dalam lingkup wilayahnya.

**Pasal 11**

Pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP dapat melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

- (1) BNPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap realisasi program dan kegiatan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (3) Evaluasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan dengan menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dalam rapat koordinasi BNPP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan diatur dengan Peraturan BNPP.

**Pasal 13**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2022  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2022  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRATIKNNO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 189

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Wanna Djaman





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS  
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN  
PERBATASAN TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) yang menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu dinyatakan pula bahwa Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya di wilayah yurisdiksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kedua ketentuan di atas menekankan pentingnya pengelolaan atas wilayah negara dan wilayah yurisdiksi negara untuk merealisasikan cita-cita bangsa yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan memperhatikan kekhususan pada karakter negara kepulauan. Sebagai konsekuensinya, karakter negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara harus senantiasa tercermin dalam setiap regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan wilayah negara termasuk pengelolaan perbatasan negara.

Perbatasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Perbatasan negara meliputi dua dimensi, yaitu dimensi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Berdasarkan UU Wilayah Negara, yang dimaksud dengan Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, sedangkan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Sementara dalam hal Batas Wilayah Negara di laut, berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dimaksud dengan Kawasan Perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan Perbatasan negara meliputi Kawasan Perbatasan darat dan Kawasan Perbatasan laut, termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, diperlukan pengaturan secara khusus. Pengaturan Batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat di wilayah yuridiksi negara. Negara juga berkepentingan untuk ikut memanfaatkan laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi.

Pengelolaan wilayah negara dilakukan dengan pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan, sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan.

Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kebijakan pengembangan Kawasan Perbatasan melihat kondisi dan karakteristik wilayah perbatasan Indonesia yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik Kawasan Perbatasan di wilayah darat maupun laut, sehingga masing-masing memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi secara nasional untuk seluruh Kawasan Perbatasan. Pengembangan Kawasan Perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan Kawasan Perbatasan yang menyeluruh (holistik), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerja sama yang efektif mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota. Pola penanganan tersebut dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah.

Strategi pengembangan Kawasan Perbatasan, baik darat maupun laut, perlu dilaksanakan melalui upaya-upaya: (1) penyelarasan kegiatan-kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertumbuhan dan pengembangan wilayah terpadu Kawasan Perbatasan; (2) keberpihakan dan perhatian yang lebih besar dari kementerian/lembaga dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perbatasan antarnegara; (3) dukungan dan fasilitasi pengembangan Kawasan Perbatasan oleh perguruan tinggi, swasta, masyarakat, dan media massa.

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) sejalan dengan arah pengembangan dalam Desain Besar Pengelolaan BWN-KP Tahun 2011-2025 yang dilakukan dalam mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju. Perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, diupayakan melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif untuk berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut. Perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, diupayakan melalui peningkatan kerja sama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik, serta penegasan dan penetapan tapal batas negara. Sementara perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, diupayakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, diperlukan perbatasan negara yang kuat dan tangguh. Pemerintah memberikan komitmen terhadap hal tersebut melalui kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk itu peran strategis wilayah negara dan Kawasan Perbatasan negara, harus dapat berkontribusi untuk memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan perbatasan sebagai beranda depan negara. Tanggung jawab atas pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan secara koordinatif baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam UU Wilayah Negara. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan BWN-KP yang melibatkan semua komponen, meliputi unsur pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media secara sinergis.

Dalam pengelolaan BWN-KP, UU Wilayah Negara mengamanatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP memiliki fungsi antara lain melaksanakan penyusunan dan mengusulkan penetapan Renduk Pengelolaan BWN-KP kepada Presiden dan menetapkan Renaksi Pengelolaan BWN-KP.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 disusun sesuai dengan (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); (4) Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTRKPN). Selain itu Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 disusun dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Renduk Pengelolaan BWN-KP ditetapkan oleh Presiden sebagai acuan

pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pelaksanaan teknis pembangunan BWN-KP yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 selanjutnya dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada setiap tahun anggaran.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah tersusunnya pedoman pengelolaan BWN-KP dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Selanjutnya penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 bertujuan untuk:

1. memperkuat dan memperkokoh kedaulatan negara;
2. mengoptimalkan kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak dasar warga negara di perbatasan;
3. memperkuat posisi wilayah perbatasan negara yang menjadi pintu keluar-masuk wilayah NKRI;
4. mengoptimalkan pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan dan beranda penghubung internasional;
5. mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan;
6. mewujudkan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan;
7. mengoptimalkan kebijakan afirmatif pembangunan yang mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing-masing Kawasan Perbatasan.

BAB II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## BAB II

### ISU, VISI DAN MISI, SERTA ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BWN-KP BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

#### A. ISU PENGELOLAAN BWN-KP

Pengelolaan BWN-KP merupakan representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kedaulatan negara sehingga terwujud Kawasan Perbatasan negara sebagai beranda depan dan penghubung internasional. Indonesia memiliki hubungan batas darat secara langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta batas laut dengan sepuluh negara yaitu Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Dalam pengelolaan perbatasan negara tersebut terdapat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian sekaligus tantangan ke depan.

Beberapa kondisi yang dihadapi dan menjadi isu strategis pada aspek pengelolaan Batas Wilayah Negara antara lain: (1) belum selesainya penetapan dan penegakan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen; (2) belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan tanda batas negara; (3) keadaan dan strategi politik negara tetangga untuk menyelesaikan perundingan; (4) masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.

Pada aspek pengelolaan lintas batas negara, Kawasan Perbatasan negara yang merupakan area pelintasan antarnegara sangat rawan dan rentan terhadap isu yang disebabkan oleh adanya aktivitas atau interaksi lintas batas negara secara ilegal. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam pengelolaan aktivitas lintas batas negara antara lain: (1) belum terpadunya sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas pada jalur non-Pos Lintas Batas Negara (PLBN); (2) masih relatif banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi; (3) terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan lintas batas (*custom, immigration, quarantine, security*); (4) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengamanan lintas batas negara, baik di darat maupun di laut (Pos Pengamanan Perbatasan/Pamtas, Pos TNI Angkatan Laut, Pos Kepolisian,

termasuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

termasuk teknologi pengamanan perbatasan); (5) belum terbangunnya sistem pengamanan perbatasan terpadu (*integrated border security system*); serta (6) berbagai permasalahan lintas batas baik terkait aspek ekonomi dan sosial budaya, maupun aktivitas kejahatan lintas negara (*transnational crime*) lainnya.

Dalam satu dekade terakhir pengelolaan perbatasan negara mulai bergeliat secara signifikan ditandai dengan komitmen negara yang hadir di perbatasan melalui penegakan kedaulatan dan pembangunan Kawasan Perbatasan negara. Namun demikian masih cukup banyak langkah strategis dan sentuhan pembangunan yang masih harus terus dilakukan untuk memperkuat wilayah perbatasan negara. Luasnya cakupan wilayah dan pembangunan perbatasan yang dilakukan secara bertahap harus dapat diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas terutama anggaran serta pelibatan seluruh *stakeholders* untuk membangun Kawasan Perbatasan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sosial dasar, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan guna mengoptimalkan fungsi Kawasan Perbatasan sebagai pintu gerbang negara. Untuk mengembangkan wilayah perbatasan, perlu secara terus menerus dilakukan identifikasi, inventarisasi dan penggalan potensi lokal yang akan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan Kawasan Perbatasan. Isu strategis yang menjadi perhatian pada aspek pembangunan Kawasan Perbatasan negara antara lain: (1) percepatan penyelesaian dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pengendalian dan pemanfaatan ruang; (2) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi komoditas lokal (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata); (3) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hayati dan nonhayati pesisir dan laut untuk kepentingan perekonomian masyarakat; (4) masih rendahnya produktivitas produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar negara tetangga (pengembangan *branding*); (5) masih rendahnya daya saing dan belum berkembangnya pusat/sentra industri, perdagangan dan pariwisata di kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (6) masih rendahnya konektivitas dan layanan infrastruktur transportasi terutama yang mendukung rantai lalu lintas pasokan komoditas (distribusi logistik/*supply chain*) dan hubungan sosial budaya antarwilayah; (7) belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran; (8) masih terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar berupa pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, dan permukiman yang memadai; (9) belum meratanya pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa atau sebutan lain di Kawasan Perbatasan.

Pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pengelolaan wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan UU Wilayah Negara. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Wilayah Negara menyebutkan bahwa masing-masing tingkatan pemerintah mempunyai kewenangan dan harus dilakukan secara sinergis agar kebijakan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan pengelolaan BWN-KP berjalan efektif dan efisien. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan BWN-KP antara lain: (1) belum efektifnya kelembagaan horizontal (antar-lembaga dalam pemerintah pusat); (2) belum efektifnya kelembagaan vertikal (hubungan antara pusat dan daerah) di daerah; (3) masih lemahnya kelembagaan pengendali lapangan sebagai fungsi pengendalian pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi program dan kegiatan.

Berkembangnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian rencana pembangunan strategis melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 telah disusun dengan memprioritaskan program/kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan fiskal negara. Kegiatan dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 disusun dengan asumsi dan target yang dinamis dengan memperhatikan kebijakan strategis dan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya terhadap kebutuhan penyesuaian kegiatan dan pendanaan dalam pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024, dilakukan dalam mekanisme penyusunan Renaksi Pengelolaan BWN-KP yang dilakukan pada setiap tahun dan dikoordinasikan oleh BNPP.

## B. VISI DAN MISI

Visi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 mencerminkan peran dalam menyukseskan Visi Presiden tahun 2019-2024, yang berisi keinginan dan cita-cita untuk melanjutkan langkah transformasi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan perbatasan negara. Visi pengelolaan BWN-KP tersebut sekaligus merupakan arah dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang dilakukan secara berkelanjutan yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Visi . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Visi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong di Perbatasan Negara”.

Visi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi, yang dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
  - a. penyediaan dan pemerataan pendidikan formal dan nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat di Kawasan Perbatasan;
  - b. meningkatkan kualitas masyarakat di Kawasan Perbatasan negara serta berkepribadian dan berjiwa nasionalisme;
  - c. mewujudkan masyarakat di Kawasan Perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
  - a. meningkatkan kegiatan ekonomi pada 18 (delapan belas) PKSNDan 26 (dua puluh enam) PLBN;
  - b. membangun daerah berbasis potensi sumber daya alam setempat secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah;
  - c. mewujudkan tata kelola pembangunan ekonomi daerah agar mampu mandiri dan mempunyai daya saing, baik terhadap wilayah lainnya di dalam negeri maupun terhadap wilayah negara tetangga.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
  - a. membuka keterisolasian wilayah melalui pembangunan konektivitas antarwilayah perbatasan negara di 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri;
  - b. mengembangkan dan memanfaatkan potensi Kawasan Perbatasan negara yang berbasis kearifan lokal di 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri;
  - c. mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan.
4. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
  - a. meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan keamanan serta pengawasan di wilayah perbatasan negara pada 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri, 18 (delapan belas) PKSNDan 49 (empat puluh sembilan) PPKT, dan 26 (dua puluh enam) PLBN;

b. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. menyelenggarakan pelayanan yang terpadu, efektif, dan efisien bagi para pelintas batas negara.

Keempat Misi dimaksud dilaksanakan melalui:

1. pengelolaan Batas Wilayah Negara yang aman, tertib, dan berdaulat;
2. pengelolaan lintas batas negara yang aman dan tertib;
3. pengelolaan Kawasan Perbatasan negara sebagai wilayah yang maju dan menjadi beranda depan NKRI;
4. pengelolaan sistem tata kelola perbatasan negara yang holistik, integratif, tematik, serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Misi tersebut dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. pembangunan sumber daya manusia;
2. pembangunan infrastruktur;
3. penyederhanaan regulasi;
4. reformasi birokrasi;
5. transformasi ekonomi.

Selanjutnya untuk mengimplementasikannya, kelima Arahan Presiden tersebut disinkronkan dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

C. ARAH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

C. ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BWN-KP BERDASARKAN RPJMN TAHUN 2020-2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengelolaan BWN-KP dilaksanakan sesuai kebijakan pembangunan nasional dengan memenuhi prinsip-prinsip:

1. Membangun Kemandirian

Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada, serta memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia. Untuk itu membangun kemandirian perlu:

- a. memiliki sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi;
- b. memiliki penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mampu mengelola sumber daya alam melalui proses nilai tambah;
- d. menjadi negara yang selalu aktif dan terbuka dalam bekerja sama.

2. Menjamin Keadilan

Pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dengan:

- a. menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya;
- b. penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat;
- c. menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antarpelaku pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

3. Menjaga Keberlanjutan

Pembangunan dilaksanakan secara keberlanjutan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan guna memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan pada saatnya nanti.

Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam pengelolaan BWN-KP dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi di Kawasan Perbatasan negara dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan pendekatan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

a. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

- 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kawasan Perbatasan negara;
- 2) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur dalam ketahanan air meliputi penyediaan air baku untuk kawasan prioritas pada daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan PPKT. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi antara lain melalui revitalisasi danau difokuskan seperti Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan untuk Kawasan Perbatasan, pengelolaan sumber daya pangan, yang difokuskan pada daerah rawan pangan, rentan kelaparan, dan *stunting*, antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua;
- 4) peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, untuk Kawasan Perbatasan dilakukan melalui fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu, serta perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil.

b. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

- 1) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi; dan
- 2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil. Fokus kegiatan antara lain pengembangan akses dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang berada di sekitar

Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Kawasan Perbatasan seperti Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Pengembangan destinasi pariwisata lainnya antara lain meliputi Batam-Bintan-Karimun secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Batam-Bintan-Karimun, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, dan Biak-Teluk Cendrawasih, difokuskan pada peningkatan kesiapannya untuk menampung peningkatan kunjungan wisatawan. Beberapa kawasan industri juga akan difasilitasi dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), DPP, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kota-deserta serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas di kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Pengelolaan BWN-KP dalam kerangka kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 yaitu:

a. meningkatkan pemerataan antarwilayah, melalui:

- 1) pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan Lokpri, PPKT, serta kawasan transmigrasi;
- 2) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa;
- 3) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan PKSNN perbatasan negara.

b. meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya wilayah perbatasan, melalui optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti KEK, KI, DPP, dan perikanan, antara lain dengan penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di KPPN, kawasan transmigrasi, PKSNN, dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
  - c. meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian;
  - d. meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Pencegahan dampak negatif ini dilakukan antara lain melalui: (1) peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; (2) penyediaan peta dasar skala besar; dan (3) penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, melalui strategi pembangunan:
- a. pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
  - b. pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. pengentasan kemiskinan; dan
  - g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan melalui strategi pembangunan:

- a. pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui strategi pembangunan berupa penyediaan:

a. Infrastruktur Pelayanan Dasar

- 1) penyediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan dan kesehatan;
- 2) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
- 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 4) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
- 5) keselamatan dan keamanan transportasi;
- 6) ketahanan kebencanaan infrastruktur.

b. Infrastruktur Ekonomi

1) Konektivitas Jalan

Kegiatan prioritas mendukung konektivitas jalan antara lain pembangunan jalan strategis nasional seperti Jalan Seajar Perbatasan dan Jalan Akses Perbatasan, Jalan Trans pada 18 (delapan belas) pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, serta jalan di Kawasan Perbatasan.

2) Konektivitas Laut

Kegiatan prioritas mendukung konektivitas laut antara lain pengembangan pelabuhan utama, seperti: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (*Major Project*), pembangunan serta pengembangan pelabuhan mendukung tol laut, pembangunan serta pengembangan pelabuhan lokal.

3) Konektivitas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

3) Konektivitas Udara

Prioritas pengembangan konektivitas udara antara lain jembatan udara di Papua, pembangunan bandar udara (bandara) baru, pengembangan bandara hub primer, rehabilitasi dan pengembangan bandara mendukung PPKT kawasan prioritas, dan pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) mendukung destinasi pariwisata perairan.

c. Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

Penyediaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dilakukan sejalan dengan upaya diversifikasi sumber penyediaan energi dan ketenagalistrikan. Sebagai contoh pemanfaatan potensi tenaga surya yang merupakan salah satu sumber energi bersih antara lain atap panel surya (*solar rooftop*) dan sumber-sumber EBT lainnya. Selanjutnya penyediaan energi ketenagalistrikan untuk pemenuhan rasio elektrifikasi terus didorong melalui kegiatan peningkatan akses dan keterjangkauan, serta kecukupan dan keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

d. Infrastruktur Digital

- 1) penyediaan dan peningkatan kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) untuk desa nonkomersil dan akses internet yang dapat dijangkau masyarakat secara bertahap;
- 2) peningkatan infrastruktur jaringan pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan dengan prioritas pada kawasan strategis nasional dan Lokpri;
- 3) penyiapan infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan akses informasi penyiaran sesuai kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup

Pengelolaan BWN-KP dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangan, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik dilaksanakan melalui strategi:

- a. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
  - 1) memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
  - 2) memperkuat kerja sama internasional;
  - 3) meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional.
- b. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
  - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
  - 2) penguatan kemampuan pertahanan;
  - 3) penguatan keamanan laut;
  - 4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 5) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan 41 (empat puluh satu) *Major Project* yang menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunannya, serta menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Penjabaran *Major Project* dimaksud, khususnya pembangunan yang terkait Kawasan Perbatasan antara lain:

1. Destinasi Pariwisata Prioritas, di antaranya pengembangan pariwisata Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dan Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara;
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, melalui pengembangan SKPT yang sudah ada, yaitu SKPT Nunukan dan SKPT Morotai, serta membangun SKPT baru;
3. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan, sebagaimana di Batam dibangun KEK yang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi tingkat nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan integrasi pengelolaan Batam-Bintan-Karimun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pusat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yaitu PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke, dengan target antara lain sebagai pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga, sebagai pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, sebagai pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, serta sebagai pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya;
5. Jembatan udara di Papua yang menjangkau daerah-daerah di Kawasan Perbatasan untuk menurunkan harga bahan pokok;
6. Peningkatan/pembangunan Jalan Lingkar/Jalan Trans Pulau pada 18 (delapan belas) pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, dengan target meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menekan tingginya harga komoditas. Dari 18 (delapan belas) pulau tersebut, beberapa diantaranya termasuk dalam Kawasan Perbatasan negara yaitu: (1) Natuna; (2) Kei Besar; (3) Selaru; (4) Moa; (5) Wetar; (6) Morotai; dan (7) Biak;
7. Penguatan Keamanan Laut di Natuna, berupa peningkatan *deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna, dengan target penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, *illegal, unreported and unregulated fishing, transnational crime* dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.

BAB III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

### BAB III

#### ARAH STRATEGIS, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PELAKSANAAN

##### A. ARAH STRATEGIS

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 menjabarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam Visi dan Misi Presiden dan difokuskan pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu agenda ke-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan agenda ke-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam 4 (empat) arah strategis pengelolaan BWN-KP, yang selanjutnya diuraikan ke dalam masing-masing bidang melalui penetapan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

##### 1. Arah Strategis 1 Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.

###### a. Tujuan

- 1) Mewujudkan penetapan dan penegasan tanda batas negara untuk menjaga keutuhan NKRI;
- 2) Memperkuat sistem pertahanan negara di Kawasan Perbatasan;
- 3) Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai cerminan keamanan dan kedaulatan negara.

###### b. Sasaran

- 1) Terwujudnya penetapan dan penegasan tanda batas negara untuk menjaga keutuhan NKRI;
- 2) Meningkatnya sistem pertahanan negara di Kawasan Perbatasan negara;
- 3) Terwujudnya Kawasan Perbatasan yang aman dan tertib.

###### c. Bidang

- 1) Penetapan Batas Wilayah Negara;
- 2) Pertahanan wilayah negara;
- 3) Keamanan dan ketertiban wilayah.

2. Arah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

2. Arah Strategis 2 Pengelolaan Aktivitas Lintas Batas Negara

Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antarnegara.

a. Tujuan

- 1) Menjadikan Kawasan Perbatasan sebagai beranda penghubung antarnegara melalui pelayanan pintu gerbang yang optimal;
- 2) Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara sebagai upaya dalam menciptakan hubungan antarnegara yang lebih kondusif melalui kerja sama internasional.

b. Sasaran

Terwujudnya Kawasan Perbatasan sebagai beranda penghubung antarnegara.

c. Bidang

- 1) Manajemen Lintas Batas Negara;
- 2) Kerja sama Lintas Batas Negara.

3. Arah Strategis 3 Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

a. Tujuan

- 1) Mengembangkan penataan ruang Kawasan Perbatasan yang tematik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan Kawasan Perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi unggulan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 3) Mewujudkan pengelolaan Kawasan Perbatasan sebagai upaya hadirnya negara dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan sosial.

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya tata ruang Kawasan Perbatasan yang tematik, terintegrasi, dan berkelanjutan;

2) Terwujudnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- 2) Terwujudnya pusat/sentra ekonomi, industri, dan perdagangan baru Kawasan Perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi unggulan dan kualitas sumber daya manusia;
  - 3) Terwujudnya keadilan sosial di Kawasan Perbatasan dengan meratanya pembangunan sarana dan prasarana.
- c. Bidang
- 1) Penataan ruang Kawasan Perbatasan;
  - 2) Pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
  - 3) Pemerataan pembangunan Kawasan Perbatasan.
4. Arah Strategis 4 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan BWN-KP
- Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.
- a. Tujuan
- 1) Melaksanakan pengelolaan perbatasan negara secara holistik dan integratif, baik secara vertikal dan horizontal, serta multipihak;
  - 2) Mewujudkan perbatasan negara yang aman, tertib, dan maju secara tematik, berdasarkan target yang telah ditetapkan;
  - 3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara.
- b. Sasaran
- 1) Terlaksananya pengelolaan perbatasan negara yang holistik, integratif, serta berbasis partisipasi multipihak;
  - 2) Terwujudnya wilayah perbatasan yang secara tematik terkelola dalam rangka kedaulatan NKRI;
  - 3) Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara yang sesuai dengan tujuan bernegara serta pemerataan pembangunan berbasis tata ruang.
- c. Bidang
- 1) Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara;
  - 2) Perencanaan Pengelolaan Perbatasan Negara;
  - 3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan Negara.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Berdasarkan 4 (empat) arah strategis di atas, pengelolaan BWN-KP dibagi menjadi 4 (empat) kebijakan dan strategi pelaksanaan, yaitu:

1. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
2. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan aktivitas lintas batas negara;
3. kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan negara; dan
4. kebijakan dan strategi pelaksanaan penguatan kelembagaan pengelolaan BWN-KP.

**B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA**

Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib dari aspek kedaulatan negara serta keamanan kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan upaya melalui kebijakan serta strategi pelaksanaan berdasarkan bidang sebagai berikut:

1. Bidang Penetapan Batas Wilayah Negara
  - a. Subbidang Batas Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Darat diarahkan pada penyelesaian batas negara wilayah darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor Leste dan permasalahannya, serta mengoptimalkan penegasan batas Indonesia-Papua Nugini.

Upaya penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat dilakukan melalui perundingan segmen batas negara, serta melaksanakan demarkasi dengan menggunakan tanda batas negara seperti patok/pilar batas negara yang didukung oleh teknologi informasi geospasial. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) Mengoptimalkan Penyelesaian dan Penegasan Batas Negara Wilayah Darat
  - a) Batas Wilayah Darat Indonesia-Malaysia

Penyelesaian batas wilayah darat Indonesia-Malaysia masih menyisakan 7 (tujuh) *Outstanding Boundary Problems* (OBP). Untuk Sektor Timur terdapat 3 (tiga) OBP yaitu: (1) Segmen OBP Pulau Sebatik, di lokasi Kecamatan Sebatik

Barat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Barat, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan; (2) Segmen OBP Sungai Sinapad di lokasi Kecamatan Lumbis Hulu, Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan Desa Limpagas, Kabupaten Nunukan; (3) Segmen OBP B2700-B3100 di lokasi Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan Desa Limpagas, pada Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan. Tahapan untuk melakukan survei bersama ketiga OBP dimaksud telah disepakati kedua negara pada Persidangan *Joint Indonesia-Malaysia (JIM)* tanggal 21 November 2019 di Kuala Lumpur.

Selanjutnya Sektor Barat terdapat 4 (empat) OBP yaitu: (1) Segmen OBP Sungai Buan/Gunung Jagoi di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (2) Segmen OBP Gunung Raya di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (3) Segmen OBP Batu Aum di Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (4) Segmen OBP Titik D400 di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan batas Republik Indonesia-Malaysia oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui JIM yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

b) Batas Wilayah Darat Indonesia-Timor Leste

Terdapat 1 (satu) segmen batas darat yang belum selesai tersurvei (*Unsurveyed Segment*) yaitu batas antara Indonesia dengan Timor Leste pada Segmen Subina-Oben. Pelaksanaan survei direncanakan mulai tahun 2022 pada 4 (empat) lokasi: (1) Segmen Subina di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (2) Segmen Pistana di Kecamatan Bikomi Tengah dan Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (3) Segmen Haumeniana-Nifonunpo di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (4) Segmen Tubu-Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu terdapat 2 (dua) *Unresolved Segment* Indonesia-Timor Leste, yaitu Segmen Noel Besi-Citrana yang direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2022, dan Segmen

Manusasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Manusasi-Bijael Sunan yang direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2023. Pengelolaan batas Indonesia-Timor Leste oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui: (1) *Senior Officer Consultation* (SOC) Indonesia-Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (2) *Joint Border Committee* (JBC) Indonesia-Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

c) Batas Wilayah Darat Indonesia-Papua Nugini.

Penegasan batas wilayah Indonesia-Papua Nugini masih perlu dilakukan dengan perapatan pilar dalam rangka meningkatkan demarkasi. Pengelolaan batas Indonesia-Papua Nugini oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui: (1) JBC Indonesia-Papua Nugini dan Sub Komite Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas Indonesia-Papua Nugini, dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri; (2) *Joint Sub Committee On Security Matters* (JSC-SM) Indonesia-Papua Nugini dikoordinasikan Tentara Nasional Indonesia.

2) Identifikasi, Perbaikan, dan Pemeliharaan Patok/Pilar Batas Negara

Patok/pilar batas merupakan objek batas negara penting yang memerlukan pemeliharaan melalui *investigation*, *refixation*, dan *maintenance*. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, disiapkan mekanisme dan sumber daya, seperti dasar hukum dan kebijakan pemeliharaan patok, sumber daya manusia untuk berpatroli, sarana dan prasarana akses menuju patok, dan dukungan teknologi. Selain itu basis data mengenai batas negara secara keruangan (spasial) dalam peta harus disiapkan untuk mempermudah dalam memelihara batas negara.

3) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Perbatasan

Partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan sesuai Pasal 19 UU Wilayah Negara dilakukan melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan di perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta dan sinergitas antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah pusat dalam

pertahanan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

pertahanan dan keamanan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian pemahaman berupa kebijakan pengelolaan Batas Wilayah Negara, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas negara wilayah darat, pengamanan terpadu, peran pemerintahan desa dan kelembagaan desa dalam mendukung keamanan dan ketertiban wilayah, menjaga dan memelihara patok/pilar batas negara, kunjungan lapangan, dan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

- 4) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Geospasial untuk Pengamanan Patok Batas Negara

Pemeliharaan dan pengamanan patok batas negara di perbatasan darat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi geospasial. Beberapa pemanfaatan teknologi yang akan digunakan antara lain: Satelit Penginderaan Jauh, *Unmanned Aerial Vehicles and Unmanned Aircraft Systems*, dan Tapal Batas *Reference*.

b. Subbidang Batas Wilayah Laut

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Laut diarahkan pada penyelesaian delimitasi laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen, terutama beberapa batas wilayah laut Indonesia yang masih belum selesai. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi Batas Laut Teritorial

Secara bilateral menyelesaikan kesepakatan yang belum diratifikasi pada 1 (satu) segmen (Indonesia-Malaysia), dan perlu kesepakatan pada 12 (dua belas) segmen dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini.

- 2) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi Batas ZEE

Secara bilateral, saat ini terdapat 3 (tiga) segmen pada 2 (dua) negara yang telah selesai dirundingkan namun belum diratifikasi yaitu: (1) Indonesia-Australia dan (2) Indonesia-Papua Nugini, meliputi segmen Samudera Pasifik dan Laut Arafura. Selain itu terdapat 15 (lima belas) segmen yang perlu kesepakatan.

3) Meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

3) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi Batas Landas Kontinen

Hal tersebut dilakukan melalui perundingan batas maritim yang belum dilakukan secara bilateral dengan negara tetangga, di antaranya batas landas kontinen dengan: (1) Filipina di Laut Sulawesi; (2) Palau di Samudera Pasifik; (3) Timor Leste.

c. Subbidang Batas Wilayah Udara

Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Udara diarahkan pada pengaturan ruang udara nasional. Strategi pelaksanaannya dilakukan melalui upaya: (1) mendorong ketersediaan data dan informasi; dan (2) mendorong penyelesaian regulasi mengenai pengelolaan ruang udara nasional.

2. Bidang Pertahanan Wilayah Negara

a. Subbidang Pertahanan Wilayah Darat

Kebijakan pengelolaan pertahanan di perbatasan wilayah darat diarahkan pada peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta sesuai Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang didukung dengan teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan di Batas Wilayah Negara dari berbagai ancaman dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang pertahanan. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sistem Pertahanan Berbasis Teknologi di Kawasan Perbatasan

Peningkatan sistem pertahanan dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan peranti keras dan peranti lunak yang akan menghasilkan informasi geospasial guna mendukung fungsi pengawasan, pemantauan, pengamanan, dan pelaporan terhadap kondisi dan posisi patok/pilar batas negara, yang diharapkan ke depannya dapat memberikan informasi berupa data secara waktu nyata (*real time data*).

2) Meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertahanan

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara, termasuk di wilayah perbatasan. Peningkatan sumber daya manusia pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman di wilayah perbatasan dilakukan melalui penyiapan kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam pembuatan kebijakan pertahanan serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, penguasaan teknologi, dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pertahanan untuk menjaga perbatasan negara.

b. Subbidang Pertahanan Wilayah Laut

Kebijakan Subbidang Pertahanan Wilayah Laut di Kawasan Perbatasan negara diarahkan pada peningkatan sistem pertahanan wilayah laut berbasis kawasan laut strategis dan PPKT. Sistem pertahanan wilayah laut dilaksanakan bersinergi dengan sistem keamanan wilayah laut. Keduanya saling berkolaborasi dan saling memengaruhi. Aspek pertahanan difokuskan pada penanggulangan ancaman wilayah negara Indonesia. Sedangkan aspek keamanan lebih banyak berkaitan dengan penanggulangan pelanggaran hukum dan kejahatan transnasional baik dalam negeri maupun internasional secara lintas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Membangun Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional yang Terintegrasi

Sistem tersebut menyinergikan kegiatan secara bersama dan terpadu dalam bentuk operasi laut, membangun kekuatan dan menggelar kekuatan bersama.

2) Mendorong Terbentuknya Pengaturan mengenai Keamanan Laut

Peraturan perundang-undangan mengenai keamanan laut diperlukan sebagai kunci dalam mengamankan kawasan laut Indonesia. Penanggulangan berbagai aktivitas yang bersifat ancaman kedaulatan negara seperti potensi konflik baik secara konvensional maupun nonkonvensional menjadi penting dalam menjaga keamanan laut. Pola ancaman terhadap wilayah Indonesia terus menjadi perhatian, seperti pelanggaran batas kedaulatan wilayah perairan Indonesia dan pelanggaran di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pengaturan terkait keamanan laut di atas sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan pertahanan dan keamanan dengan melibatkan semua pihak

terkait . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

terkait di garda depan. Selanjutnya terhadap hal-hal yang diindikasikan bersifat kriminal, ditangani oleh lembaga penegak hukum.

3) Mengembangkan Sistem Pertahanan Laut di Kawasan Laut Strategis Berbasis PPKT

Upaya dalam melaksanakan pertahanan laut Indonesia di Kawasan Perbatasan dapat dilakukan dengan berbasis pemetaan kawasan laut strategis. Proses pemetaan dimaksud menghasilkan pengelompokan (regionalisasi) kawasan laut, untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan kawasan laut yang rentan terhadap ancaman kedaulatan. Dari hasil pemetaan tersebut, keberadaan PPKT terdekat dapat digunakan sebagai basis pertahanan. PPKT dimaksud dapat digunakan sebagai Pos TNI Angkatan Laut dilengkapi berbagai sarana prasarana pertahanan dan keamanan serta teknologi yang dapat menjangkau kawasan laut strategis di sekitarnya.

Untuk menggabungkan wilayah NKRI sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, PPKT memiliki posisi yang strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu proyek prioritas adalah koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di PPKT tidak berpenduduk.

c. Subbidang Pertahanan Wilayah Udara

Kebijakan Subbidang Pertahanan Wilayah Udara diarahkan pada peningkatan Sistem Pertahanan Wilayah Udara berdasarkan Zona Strategis Pertahanan Udara pada *Air Defense Identification Zone* (ADIZ). Keberadaan zona strategis pertahanan udara menjadi penting untuk mengidentifikasi berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Menetapkan ADIZ Wilayah Udara Indonesia

Rencana dan mandat penetapan ADIZ telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Proses penyusunan ADIZ dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 diharapkan sudah dapat ditetapkan ADIZ yang akan menjadi dasar dalam memetakan berbagai ancaman kedaulatan berbasis klasifikasi ruang udara Indonesia.

2) Meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

2) Meningkatkan Kemampuan Sarana dan Prasarana Deteksi Lalu Lintas Udara di Bandara Kawasan Perbatasan

Hal ini diperlukan di berbagai penjuru tanah air, karena selama ini proses pemantauan didominasi oleh radar pasif pada bandara sipil. Idealnya bandara strategis di Kawasan Perbatasan dilengkapi dengan sarana dan prasarana deteksi lalu lintas udara yang dapat mendukung pemantauan sekaligus mengawal pertahanan wilayah udara Indonesia di perbatasan negara.

3. Bidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah

a. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat diarahkan pada upaya peningkatan ketertiban masyarakat dan pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Skema pertahanan dan keamanan dipertegas dengan membedakan antara aktivitas yang mengancam kedaulatan wilayah negara dan aktivitas yang bersifat kriminal murni yang terdapat aspek kemanusiaan di dalamnya. Keamanan dan ketertiban wilayah darat dilakukan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dan pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan kewaspadaan dan menegakkan hukum terhadap aktivitas ilegal di Kawasan Perbatasan darat;
- 2) meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi penanggulangan terorisme dan paham radikal pada masyarakat di perbatasan;
- 3) meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap transformasi sosial, ekonomi serta teknologi virtual yang dipengaruhi negara lain.

b. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Laut

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Laut diarahkan pada pengurangan potensi pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran yurisdiksi wilayah laut Indonesia. Pengurangan tersebut terkait dengan pencegahan sampai dengan penindakan yang bersifat mengikat dan dapat memberikan efek jera. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut;
- 2) mengembangkan kerja sama pengelolaan dan pengamanan wilayah laut lintas negara;

3) mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- 3) mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum terpadu di wilayah laut;
  - 4) meningkatkan optimalisasi penanggulangan terorisme dan kegiatan ilegal pada masyarakat perbatasan.
- c. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Udara

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Udara diarahkan pada pengurangan potensi pelanggaran kedaulatan wilayah udara. Upaya yang dilakukan adalah menyusun pengaturan dan pengawasan aktivitas penerbangan di ruang udara wilayah nasional serta meningkatkan diplomasi pengaturan penerbangan dengan negara-negara tetangga. Optimalisasi diplomasi pengaturan penerbangan di ruang udara wilayah Natuna menjadi sangat penting, mengingat pengaturan ruang wilayah udara tersebut masih dilakukan oleh negara lain. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) melanjutkan penataan *Flight Information Region* (FIR) di atas wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna;
- 2) pengawasan wilayah udara nasional melalui pengaturan pengelolaan ruang udara nasional.

Kebijakan dan pengaturan terkait pengelolaan ruang udara nasional menjadi penting sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan bahwa pengelolaan ruang udara perlu diatur dengan undang-undang tersendiri. Regulasi mengenai pengelolaan ruang udara nasional tersebut didasari oleh adanya kepentingan atas wilayah ruang udara dan adanya nilai sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan dalam pemanfaatan ruang wilayah udara. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir potensi munculnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang wilayah udara.

**C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN AKTIVITAS LINTAS BATAS NEGARA**

Pengelolaan aktivitas lintas batas negara pada dasarnya dilakukan untuk melaksanakan arah strategis guna mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai pintu gerbang yang dikelola secara optimal dan terintegrasi dengan negara tetangga, baik dalam hal sosial ekonomi maupun lingkungan hidup.

Oleh . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkannya dirumuskan dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan berdasarkan bidang, sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Lintas Batas Negara

Subbidang Pembangunan dan Pelayanan Pos Lintas Batas

Kebijakan pembangunan dan pelayanan Pos Lintas Batas diarahkan pada optimalnya pembangunan dan pelayanan aktivitas Lintas Batas Negara di Kawasan Perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

a. Membangun Fasilitas PLBN Menuju *Smart Border Post*

Hingga tahun 2024 aktivitas lintas batas negara direncanakan akan dilayani oleh 26 (dua puluh enam) PLBN. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, hingga tahun 2019 telah terbangun 7 (tujuh) PLBN masing-masing di Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Nanga Badau), Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Motaain, PLBN Wini, dan PLBN Motamasin), dan Provinsi Papua (PLBN Skouw). Selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 akan dibangun 18 (delapan belas) PLBN, 11 (sebelas) diantaranya merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Instruksi Presiden dimaksud, terdapat 1 (satu) PLBN di Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang telah selesai dibangun tahun 2020, sementara 10 (sepuluh) PLBN lainnya yang akan dibangun meliputi:

- 1) Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 5) Labang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 6) Long Midang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 7) Long Nawang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- 8) Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 9) Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 10) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Selanjutnya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Selanjutnya untuk rencana 8 (delapan) PLBN lainnya yang akan dibangun berdasarkan jumlah target RPJMN Tahun 2020-2024, akan dilakukan kajian terlebih dahulu dengan memperhatikan aktivitas perlintasan baik orang maupun barang serta resiprokalitas pelayanan lintas negara dari negara tetangga. Kedelapan PLBN tersebut direncanakan di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Selain itu penerapan *smart border post* dilakukan secara bertahap melalui pola keterpaduan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dalam satu manajemen pengelolaan PLBN Terpadu berbasis teknologi informasi untuk menghadirkan rasa aman, nyaman, tertib dan berdaulat di Kawasan Perbatasan negara.

- b. Membangun Area di Sekitar PLBN Sebagai Fasilitas Sosial-Ekonomi untuk Memicu dalam Membangkitkan Perekonomian Masyarakat

Sarana prasarana penunjang di PLBN merupakan salah satu faktor pendukung yang berperan tidak hanya pada aktivitas perekonomian tetapi juga pada aktivitas lainnya. Penyediaan sarana prasarana yang memadai seperti pertokoan, pasar, fasilitas perbankan, dan sebagainya akan menjadi pemicu aktivitas perekonomian, sekaligus menjadikan kawasan PLBN sebagai episentrum pengembangan ekonomi. Selanjutnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Kawasan Perbatasan, dilakukan melalui upaya sinergi program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Perbatasan khususnya di sekitar PLBN.

- c. Menyusun Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Pintu Gerbang PLBN dan Non-PLBN

Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan pintu gerbang PLBN dan non-PLBN, antara lain dilakukan melalui:

- 1) penataan kebijakan pengelolaan dan pelayanan PLBN;
- 2) kebijakan peningkatan sarana prasarana pelayanan pintu gerbang non-PLBN sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- 3) kebijakan penguatan pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan titik perlintasan atau jalur tidak resmi pelintas batas negara.

2. Bidang . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

2. Bidang Kerja Sama Lintas Batas Negara

Subbidang Strategi Pelaksanaan Kerja Sama Sosial-Ekonomi Lintas Batas Negara

Kebijakan kerja sama sosial ekonomi lintas batas negara diarahkan pada pengembangan kerja sama ekonomi regional serta terbentuknya interaksi masyarakat lokal lintas batas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:

a. Meningkatkan Interaksi Sosial Budaya Masyarakat Lokal Lintas Negara

Meningkatkan interaksi sosial budaya melalui kegiatan lokal bersama atau acara tertentu yang melibatkan penduduk perbatasan dan penduduk di negara tetangga, dan mendorong interaksi sosial antara masyarakat lokal perbatasan dengan negara tetangga.

b. Mengembangkan Kerja Sama Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Kawasan Perbatasan

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui kerja sama perdagangan perbatasan dengan negara tetangga dalam pemenuhan barang-barang kebutuhan dasar di Kawasan Perbatasan. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan dan meminimalkan aktivitas ilegal lalu lintas barang-barang kebutuhan dasar terutama yang telah disubsidi pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara tetangga.

c. Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Ekspor-Import di Kawasan Perbatasan dengan Negara Tetangga

Kerja sama perdagangan luar negeri yang mencakup ekspor-import barang dan jasa melalui Kawasan Perbatasan negara dengan negara tetangga perlu terus dikembangkan. Hal ini untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di Kawasan Perbatasan yang berorientasi pada pemenuhan potensi pasar negara tetangga.

**D. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

Pada dimensi pembangunan Kawasan Perbatasan negara, arah strategis pembangunan Kawasan Perbatasan negara ditujukan untuk menjadikan Kawasan Perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pelaksanaan berdasarkan bidang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

1. Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

a) Subbidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Kebijakan Subbidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan diarahkan pada upaya memberikan kepastian pemanfaatan ruang melalui perencanaan terintegrasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) Penyediaan Peta Dasar RDTR dan Penyelesaian Dokumen RDTR pada Lokpri dan PKS N yang Terintegrasi Antar-kepentingan Nasional dan Daerah

Penyusunan Peta Dasar RDTR menjadi bagian dalam proses penyusunan Materi Teknis (Matek) RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. Berdasarkan regulasi tentang penataan ruang dan pemerintahan daerah, dokumen Matek selanjutnya harus disahkan melalui proses legislasi dalam bentuk peraturan presiden. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ditargetkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen Matek, termasuk 7 (tujuh) dokumen Matek pada periode lalu (RPJMN Tahun 2015-2019) yang belum masuk proses legislasi. Penyusunan RDTR PKS N Kawasan Perbatasan Negara mengacu pada fungsi pemanfaatan ruang, yaitu Fungsi Pusat Pelayanan Utama, Fungsi Pusat Pelayanan Penyangga, dan Fungsi Pusat Pelayanan Pintu Gerbang.

Target lain yang akan menjadi fokus hingga tahun 2024 adalah penyelesaian RTRKPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, menetapkan 9 (sembilan) kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan diamanatkan untuk menyusun RTR dalam bentuk RTRKPN. Pada periode yang lalu (tahun 2014 hingga 2018) telah ditetapkan pengaturan ruang Kawasan Perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga melalui 7 (tujuh) Peraturan Presiden mengenai RTRKPN. Dalam periode tahun 2020 hingga tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta ditargetkan penyelesaian RTRKPN untuk kawasan yang berbatasan dengan laut lepas.

2) Pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

2) Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Pemantauan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan

Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan instrumen pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang, dengan memperkuat evaluasi pemanfaatan ruang melalui peninjauan kembali dokumen rencana tata ruang, serta penyusunan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang bukan hanya terbatas pada perencanaan semata, namun tantangan terbesar adalah bagaimana menerapkan dokumen perencanaan tata ruang berdasarkan instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

b) Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak dibatasi wilayah administrasi, seperti halnya konsep yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Kawasan Perbatasan negara diarahkan pada pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan konservasi taman nasional, dan peningkatan penyuluhan.

2. Bidang Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan

Pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan dilakukan di Kawasan PKSN. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PKSN dikembangkan sebagai pusat kegiatan berkarakteristik perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitar dan/atau pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya. Selain itu, PKSN difungsikan sebagai pusat yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.

a) Subbidang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

a) Subbidang Pembangunan dan Pengelolaan Potensi PKSN

Sebagai pusat pertumbuhan, pembangunan PKSN dilaksanakan berbasis potensi unggulan daerah yang meliputi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan (perikanan tangkap dan budi daya) serta sektor pariwisata. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan

Hal ini dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pada komoditas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Selain itu, efisiensi produksi akan berpengaruh terhadap daya saing produk termasuk upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor primer baik di dalam PKSN maupun beberapa wilayah di sekitarnya, dengan tetap memfokuskan produk yang akan dikembangkan di PKSN.

2) Pengembangan Sektor Industri dari Hasil Produksi Sektor Primer

Hal ini dilakukan melalui pengolahan hasil produksi sektor primer agar mendapatkan nilai tambah sebelum keluar dari wilayah PKSN, seperti mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, meningkatkan kemasan, dan memenuhi standar produk dalam dan luar negeri. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka ruang bagi investor untuk membangun fasilitas pengolahan hasil produksi primer di wilayah PKSN dan sekitarnya.

3) Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Kelautan dan Perikanan

Hal ini dilakukan melalui pembangunan industri kelautan dan perikanan serta pengadaan bantuan sarana prasarana infrastruktur kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Pembangunan industri kelautan dan perikanan pada SKPT di Kawasan Perbatasan dan PPKT perlu terus ditingkatkan sarana dan prasarannya. Beberapa SKPT di PKSN yang telah terbangun adalah SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, SKPT Talaud, SKPT Morotai, SKPT Saumlaki, dan SKPT Merauke. Sementara itu, untuk penguatan kelompok nelayan/petani dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana kapal penangkap ikan beserta peralatannya, sarana prasarana budi daya rumput laut, dan sarana prasarana budi daya perikanan darat dan laut.

4) Peningkatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

4) Peningkatan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Pariwisata

Potensi daya tarik wisata merupakan salah satu potensi unggulan di PKSN. Pada umumnya daya tarik wisata di Kawasan Perbatasan adalah pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata sejarah. Beberapa PKSN yang memiliki potensi unggulan pariwisata antara lain PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Paloh Aruk, PKSN Daruba, dan PKSN Saumlaki. Peningkatan aksesibilitas dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana jalan dan transportasi menuju objek wisata. Peningkatan amenitas dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana daya tarik wisata dan pembangunan *tourist information center*. Sementara untuk atraksi dilaksanakan melalui *event-event* kegiatan, termasuk *cross border tourism*. Dengan strategi tersebut diharapkan akan meningkatkan daya saing objek wisata yang dapat menambah lama tinggal (*length of stay*) di lokasi wisata.

5) Perluasan Kesempatan Berusaha di Sektor Ekonomi Kreatif

Peningkatan kapasitas individu untuk mampu bersaing dan memanfaatkan peluang pengembangan ekonomi dilakukan antara lain melalui pelatihan manajerial wirausaha, pemasaran dalam jaringan (*online*), dan teknis vokasional. Selain itu pengembangan dilakukan dengan memperluas akses kepada lembaga keuangan termasuk akses kerja sama dalam meningkatkan pemasaran bagi individu, koperasi, dan UMKM di wilayah perbatasan. Beberapa bentuk pelaksanaannya seperti pemberian bantuan permodalan bagi wirausaha pemula, pemberian fasilitas dana bergulir kepada koperasi, fasilitasi kemitraan kerja sama UMKM, pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendataan dan identifikasi koperasi dan UMKM, serta revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pascabencana.

6) Pengembangan Sumber Daya Manusia Terampil

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kapasitas sumber daya manusia dikembangkan melalui peningkatan kemampuan masing-masing individu dan kelompok yang diarahkan sesuai sektor potensi unggulan di PKSN dengan kegiatan seperti pelatihan/bimbingan teknis/vokasional. Diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

manusia di PKS N yang kompetitif tersebut akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.

b) Subbidang Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur PKS N

Kebijakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur PKS N diarahkan untuk mewujudkan PKS N sebagai pusat/sentra pertumbuhan ekonomi, industri, dan perdagangan dengan dukungan sarana prasarana pendukung pergerakan perekonomian dari dan ke Kawasan PKS N. Selain itu, PKS N perlu didukung dengan peningkatan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi wilayah serta tata kelola pemerintahan agar dapat menjadi rujukan layanan bagi kawasan di sekitarnya sesuai fungsi pembentukannya. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah di PKS N

Peningkatan konektivitas dilakukan melalui program pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan/jembatan (nasional/provinsi/kabupaten/strategis desa/non-status), transportasi (darat, laut, dan udara), dan telekomunikasi dan informasi. Hal tersebut sangat penting karena ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan Kawasan Perbatasan, yang dilakukan melalui:

(a) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan/Jembatan

Pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan serta membuka akses antar-wilayah. Beberapa upaya yang dilakukan berupa pembangunan, pembukaan, dan peningkatan jalan/jembatan strategis nasional (sejajar perbatasan), serta jalan strategis desa/non-status, sebagai jalan yang bernilai strategis karena selain memiliki fungsi menumbuhkan ekonomi di Kawasan Perbatasan, termasuk pengembangan simpul transportasi kawasan, juga untuk kepentingan pertahanan keamanan.

(b) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi

Pengembangan perekonomian di Kawasan Perbatasan salah satunya sangat tergantung pada ketersediaan aksesibilitas transportasi yang menjamin kelancaran distribusi barang dan aliran komoditas unggulan dari Kawasan Perbatasan ke kawasan industri di perkotaan dan sebaliknya.

(1) Transportasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

(1) Transportasi Darat

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat merupakan upaya dalam menyediakan fasilitas yang mendukung pergerakan cepat, aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan akan kapasitas angkut dengan menyesuaikan dengan jenis moda yang digunakan di PKSNI.

(2) Transportasi Laut

Pembangunan transportasi laut dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan laut yang difungsikan sebagai pintu masuk bagi barang dan orang menuju dan keluar wilayah PKSNI. Pengembangan beberapa pelabuhan laut strategis ke depan akan diarahkan berskala internasional. Selain itu, juga dilakukan melalui perluasan layanan jaringan perintis, jaringan tol laut, dan kapal ternak untuk meningkatkan distribusi barang dan komoditas unggulan daerah guna memperluas pangsa pasar ke luar daerah dan negara tetangga.

(3) Transportasi Udara

Pembangunan transportasi udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas kepada masyarakat di Kawasan Perbatasan. Kegiatan dilakukan melalui pembangunan bandara baru, penyediaan fasilitas terminal dan landasan, peningkatan cakupan layanan penerbangan perintis, dan jembatan udara.

(c) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital nasional, peningkatan konektivitas telekomunikasi dan informasi di PKSNI dilakukan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur guna memperluas cakupan layanan telekomunikasi dan informasi. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan BTS di wilayah *blankspot*, dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi data untuk memperkuat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses telekomunikasi dan informasi.

Penyediaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Penyediaan infrastruktur BTS merupakan penyediaan layanan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di PKSNI yang belum terlayani akses telekomunikasi. Selanjutnya untuk akses internet diutamakan pada titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, balai latihan kerja, ruang publik, terminal, dan PLBN.

2) Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Energi di PKSNI

Untuk mendukung aktivitas PKSNI sebagai pusat kegiatan perekonomian wilayah, salah satu prioritas yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan energi yang memadai berupa ketersediaan Energi (*On-Grid Off-Grid*). Pentingnya ketersediaan energi menjadi salah satu pendukung keberhasilan pengelolaan yang dilakukan melalui:

a) Penyediaan EBT

Upaya percepatan pengembangan EBT, khususnya pemanfaatan tenaga surya, diarahkan melalui pengembangan PLTS komunal/PLTS Sentralisasi, dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Kegiatan ini ditujukan untuk wilayah yang tidak terdapat jaringan *grid*/PLN.

b) Penyediaan Energi Listrik yang bersumber dari PLN

Kebutuhan energi listrik di Kawasan Perbatasan masih tinggi. Hal ini dikarenakan medan pendistribusian yang sulit dijangkau, berdampak pada biaya yang dibutuhkan dalam penyediaan suplai listrik. Kegiatan yang dilakukan adalah pendistribusian jaringan listrik berupa penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkit ke rumah penduduk.

c) Penyediaan Bahan Bakar Minyak Satu Harga

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah membuat kebijakan berupa penyediaan, pendistribusian, serta pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat di Kawasan Perbatasan. Tersedianya BBM satu harga berdampak pada penguatan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar untuk transportasi dan aktivitas perekonomian. Implementasi penyediaan BBM satu harga diharapkan dapat menjamin stabilitas harga bahan pokok di Kawasan Perbatasan.

3) Peningkatan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

3) Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan

Penyediaan layanan kesehatan rujukan dilaksanakan melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama atau Rumah Sakit Tipe D sebagai fasilitas kesehatan rujukan untuk Kawasan di sekitarnya. Kegiatan yang dilaksanakan berupa: (1) pembangunan rumah sakit pratama di PKSN; (2) pembangunan sarana penunjang rumah sakit yang antara lain meliputi rumah dinas; Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah sakit, instalasi farmasi; (3) penyediaan prasarana rumah sakit antara lain pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit, penyediaan farmasi, pengadaan alat penunjang pelayanan kebidanan, dan alat-alat penunjang medis lainnya.

4) Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menuju sekolah unggulan dan pusat pendidikan vokasional di PKSN dilaksanakan melalui pembangunan sekolah-sekolah unggulan di PKSN yang menjadi model dalam meningkatkan pendidikan di PKSN. Di samping itu didorong pula terwujudnya SMK unggulan sebagai pusat pendidikan vokasional di PKSN yang mendukung penyediaan tenaga kerja sesuai potensi kawasan PKSN. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan SMA menjadi Sekolah Penggerak; (2) fasilitasi dan pembinaan SMK menjadi Sekolah Rujukan; (3) fasilitasi sertifikasi kompetensi siswa SMK; (4) fasilitasi pengembangan sarana praktek dan prasarana kursus dan pelatihan vokasi di PKSN.

5) Peningkatan Infrastruktur Permukiman

Peningkatan sarana dan prasarana permukiman dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang ada saat ini di PKSN serta membangun permukiman baru yang didukung oleh ketersediaan akses air minum dan sanitasi lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui: (1) pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat; (2) penataan permukiman kumuh secara terintegrasi; (3) pembangunan rumah khusus beserta prasarana umumnya; (4) pembangunan, peningkatan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (5) pembangunan SPAM berbasis masyarakat; (6) penyediaan SPAM regional; (7) penyediaan instalasi pengolahan limbah rumah tangga skala komunal.

6) Penyediaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

6) Penyediaan Pasar Rakyat dan Gudang Non-Sistem Resi Gudang (SRG)

Penyediaan pasar rakyat dan gudang non-SRG dilakukan terintegrasi dalam satu sistem guna mendukung perekonomian di PKSN. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat setempat mempunyai akses pada perekonomian PKSN sehingga kemajuan yang dicapai PKSN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: (1) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; (2) pembangunan gudang non-SRG; (3) pemberdayaan UMKM; (4) pelatihan manajemen pasar; (5) penyediaan sarana metrologi legal kabupaten/kota.

7) Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Pembangunan perbatasan khususnya di PKSN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Perbatasan. Hal tersebut memerlukan peran pemerintah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara efektif dan menjembatani kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah kabupaten/kota. Sarana prasarana pemerintahan serta sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan peningkatan pelayanan pemerintahan di PKSN, antara lain: (1) membangun/merehabilitasi kantor untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan; dan (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Bidang Pemerataan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Subbidang Pengelolaan Lokpri

Kebijakan pengelolaan Lokpri sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada aspek pemerataan pembangunan melalui penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar dan pengembangan perekonomian termasuk pemanfaatan potensi yang dimiliki. Sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Perbatasan, dalam hal ini Lokpri termasuk PPKT banyak memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat. Strategi pelaksanaannya adalah:

a. Pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Skala Lokal

Pengembangan ekonomi masyarakat skala lokal dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan perekonomian warga masyarakat yang berbasis pada ekonomi rumah tangga, pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga bahan makanan pokok, serta pengembangan terhadap mata pencaharian masyarakat.
- 2) Pengembangan sektor primer terutama sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Sektor primer selanjutnya dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing Lokpri menjadi produk unggulan melalui pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, peningkatan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan, peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keanekaragaman hayati, serta peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

b. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Kelautan dan Perikanan

Pembangunan industri kelautan dan perikanan, serta pengadaan bantuan sarana prasarana infrastruktur kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Dalam pembangunan industri kelautan dan perikanan pada SKPT di Kawasan Perbatasan dan PPKT perlu terus ditingkatkan sarana prasarannya, seperti di SKPT Rote Ndao dan SKPT Biak. Sementara itu, untuk penguatan kelompok nelayan dilakukan melalui pelatihan dan bantuan sarana prasarana kapal penangkap ikan beserta peralatannya, sarana prasarana budi daya rumput laut, sarana prasarana budi daya perikanan darat dan laut, serta konservasi lingkungan.

c. Peningkatan Atraksi dan Amenitas Pariwisata

Potensi daya tarik wisata merupakan salah satu potensi unggulan di Kawasan Perbatasan. Pada umumnya daya tarik wisata di Kawasan Perbatasan adalah pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata sejarah. Peningkatan aksesibilitas dilaksanakan melalui pembangunan

sarana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

sarana prasarana jalan dan transportasi menuju objek wisata. Peningkatan amenitas dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana daya tarik wisata berbasis masyarakat dan pembangunan *tourist information center*. Sementara untuk atraksi dilaksanakan melalui *event-event* kegiatan, termasuk *cross border tourism*.

d. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan Gudang Non-SRG

Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan sebagian besar merupakan daerah *remote* yang sulit terjangkau dan sebagian diantaranya memiliki ketergantungan cukup tinggi akan pasokan barang dari luar. Untuk itu diperlukan pembangunan Gudang Non-SRG sebagai tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok dan komoditas lainnya dalam upaya untuk menjaga ketahanan pangan, dan stabilitas harga.

e. Peningkatan Jejaring Sosial-Budaya Masyarakat di Perbatasan

Selain masalah ekonomi, urusan sosial kemasyarakatan perlu disentuh untuk mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban dan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan jejaring antar kelompok masyarakat serta peningkatan jejaring sosial budaya masyarakat di Kawasan Perbatasan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain membangun kelompok masyarakat berbasis keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain. Di samping itu juga dapat dilakukan kerja sama antarkelompok masyarakat lintas negara untuk beraktivitas bersama. Peningkatan jejaring sosial budaya masyarakat di perbatasan diarahkan untuk meningkatkan kohesi sosial antar-masyarakat di perbatasan dan sekaligus saling pengertian dengan masyarakat perbatasan negara tetangga yang dilaksanakan melalui antara lain: pengembangan *city to city partnership* antar-pemerintah daerah di perbatasan dengan pemerintah daerah di negara tetangga; penyelenggaraan festival budaya perbatasan; pengembangan pasar bersama perbatasan (*cross border market*); dan mengaktifkan komunikasi budaya masyarakat perbatasan melalui radio dan TV komunitas.

f. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Konektivitas dan Sumber Daya Energi

Penyelenggaraan konektivitas yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, transportasi, telekomunikasi dan informasi, melalui percepatan pembangunan konektivitas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Lokpri.

1) Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

1) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan/Jembatan

Pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan serta membuka akses antarwilayah. Upaya yang dilakukan berupa pembangunan, pembukaan, dan peningkatan jalan/jembatan strategis nasional (sejajar perbatasan), serta jalan strategis desa/non-status, sebagai jalan yang bernilai strategis karena selain memiliki fungsi menumbuhkan perekonomian juga untuk kepentingan pertahanan keamanan. Kegiatan prioritas diarahkan untuk pembangunan ruas jalan strategis nasional (pembangunan baru, preservasi, pemeliharaan rutin dan berkala), dan kegiatan pembangunan ruas jalan Desa Strategis di Lokpri.

2) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi

Pembangunan transportasi meliputi prasarana transportasi darat (terminal orang dan barang, serta dermaga penyeberangan sungai danau), transportasi laut (dermaga penyeberangan laut, kapal perintis, tol laut, subsidi angkutan), dan transportasi udara (bandara perintis, peningkatan fasilitas bangunan, fasilitas terminal, fasilitas landasan).

3) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah, peningkatan konektivitas telekomunikasi dan informasi di kecamatan lokasi prioritas dilakukan dengan memperluas cakupan layanan telekomunikasi dan informasi. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di Kawasan Perbatasan masih belum merata, serta terkendala kondisi geografis dan luas wilayah. Hal ini mengakibatkan masih cukup banyak wilayah pedesaan di kecamatan lokpri Kawasan Perbatasan yang belum terjangkau layanan telekomunikasi (*blankspot*) dan akses internet. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan BTS di wilayah *blankspot* dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi data untuk memperkuat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses telekomunikasi dan informasi. Kegiatan diarahkan untuk penyediaan akses telekomunikasi berupa penyediaan menara pemancar atau BTS dengan beragam teknologi dan penyediaan akses internet yang diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian.

4) Pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

4) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Energi

Untuk mendukung aktivitas Lokpri sebagai pusat kegiatan perekonomian wilayah, salah satu prioritas yang dilakukan adalah:

a) Penyediaan Energi Listrik yang bersumber dari PLN

Kebutuhan energi listrik di Kawasan Perbatasan masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan medan pendistribusian yang sulit dijangkau yang berdampak pada biaya yang dibutuhkan dalam penyediaan suplai listrik. Untuk itu, pemerintah terus berusaha menyuplai pasokan listrik di Lokpri sehingga ketersediaan energi listrik yang memadai diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelayanan publik di Kawasan Perbatasan. Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan pendistribusian jaringan listrik berupa penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkit ke rumah-rumah penduduk.

b) Pemanfaatan EBT

Mendorong ketersediaan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti (PLTS Komunal, *Solar Home System*, dan LTSHE), mampu mengalirkan listrik ke desa-desa yang sangat terisolasi dan sulit dijangkau distribusi PLN.

c) Penyediaan BBM Satu Harga

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa penyediaan, pendistribusian, serta pengaturan harga BBM satu harga, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat di Kawasan Perbatasan. Dengan tersedianya BBM satu harga akan berdampak pada penguatan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar untuk transportasi dan aktivitas perekonomian. Implementasi penyediaan BBM satu harga diharapkan dapat mendorong stabilitas harga bahan pokok dan akselerasi kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan.

g. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Sosial Dasar

Pemenuhan fasilitas pelayanan sosial dasar diarahkan untuk memastikan masyarakat di Kawasan Perbatasan mendapatkan akses terhadap layanan sosial dasar sesuai dengan standar minimal sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Beberapa kegiatan untuk mendukung pemenuhan layanan sosial dasar di Lokpri meliputi:

1) Pemenuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

1) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Masyarakat di Kawasan Perbatasan

Hal tersebut diupayakan sesuai standar nasional pendidikan, yang meliputi ketersediaan sarana prasarana pendidikan, aksesibilitas masyarakat/anak usia sekolah dan mutu pendidikan, melalui: (1) peningkatan tata kelola pendidikan pada semua jenjang; (2) peningkatan kualitas pengajaran pada semua jenjang; (3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik serta tenaga kependidikan; (4) peningkatan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang; (5) afirmasi akses dan percepatan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Pembangunan dan penyediaan layanan dasar sektor pendidikan di Lokpri diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan termasuk pendidikan vokasional (jenjang SMA/SMK).

2) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sesuai dengan Standar Pelayanan

Upaya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas), pelayanan rujukan (rumah sakit), maupun layanan kefarmasian dan laboratorium kesehatan, percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan *stunting*, peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta penguatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan deteksi dini penyakit dan perilaku hidup sehat.

3) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Permukiman Masyarakat

Kebutuhan fasilitas permukiman masyarakat di Kawasan Perbatasan dilakukan melalui pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, berupa penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh ketersediaan akses air minum dan sanitasi permukiman, yang meliputi antara lain drainase lingkungan, sarana persampahan dan pengelolaan limbah rumah tangga, serta pembudayaan pola hidup bersih dan sehat.

4) Pemenuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

4) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Perekonomian Lokal Masyarakat

Pemenuhan fasilitas pelayanan perekonomian masyarakat dilaksanakan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan dan perputaran perekonomian skala lokal seperti jual-beli hasil produksi masyarakat setempat. Upaya pemenuhan sarana perekonomian bagi masyarakat dilaksanakan melalui antara lain: fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pembentukan dan operasionalisasi Unit Metrologi Legal pada Kawasan Perbatasan; pengawasan barang dan jasa yang beredar pada Kawasan Perbatasan; peningkatan kemampuan pengelolaan pasar rakyat; dan peningkatan kemampuan pelaku usaha dari masyarakat dan UMKM di wilayah perbatasan.

h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kawasan Perbatasan, perlu didukung dengan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan, khususnya di Lokpri melalui pembangunan/rehabilitasi kantor, balai pertemuan umum di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum memadai.

i. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai, diharapkan dapat memberikan kepastian atas dokumen kewarganegaraan mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Hal ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya kejahatan lintas negara yang terjadi di Kawasan Perbatasan. Selain itu, kebijakan pada sektor ini harus mampu mengatasi permasalahan status kewarganegaraan yang terjadi di beberapa Kawasan Perbatasan.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia melalui pelayanan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis. Salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah gerakan membangun ekosistem pemerintahan yang sadar pentingnya administrasi kependudukan, yaitu program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), meliputi: (1) sadar kepemilikan dokumen kependudukan; (2) sadar pemutakhiran data penduduk; (3) sadar pemanfaatan data kependudukan; (4) sadar melayani administrasi kependudukan.

j. Peningkatan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

j. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di Kawasan Perbatasan negara merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan BWN-KP. Hal tersebut diupayakan antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pertemuan tematik kementerian/lembaga teknis untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur. Selanjutnya khusus bagi aparatur pemerintahan kecamatan di Kawasan Perbatasan negara, harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengelolaan BWN-KP seperti membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanaan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga terkait kepada bupati/walikota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

k. Bantuan Sosial Pemerintah

Bantuan Sosial Pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang diberikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan di Kawasan Perbatasan. Kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi pada masing-masing daerah, dalam bentuk program bantuan sosial seperti: (1) penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan; (2) penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera; (3) Pangan Non-Tunai; (4) penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Lingkungan; (5) penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; (6) penyaluran Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; (7) program Kewirausahaan Sosial.

**E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN BWN-KP**

Pelaksanaan penguatan kelembagaan pengelolaan BWN-KP dilakukan untuk menjadikan BNPP sebagai lembaga yang komunikatif, koordinatif, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut dirumuskan kebijakan serta strategi pelaksanaan pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Bidang Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara.

a. Subbidang Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan Antarnegara

Kebijakan pengelolaan perbatasan melalui kerja sama antarnegara diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi kerja sama antarnegara. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- 1) mengembangkan komunikasi dan koordinasi pengelola perbatasan antarnegara yang terintegrasi antar-pemangku kepentingan, serta kelembagaan perundingan dan kerja sama ekonomi dan sosial budaya;
- 2) mendorong program kerja sama baik secara bilateral maupun regional dan subregional untuk pengembangan Kawasan Perbatasan;
- 3) mengoptimalkan peran atase dan konsulat jenderal, atau kantor perwakilan dan lembaga di luar negeri dalam rangka menjembatani komunikasi untuk pengembangan Kawasan Perbatasan negara.

b. Subbidang Koordinasi Pengelolaan Tingkat Pusat

Kebijakan koordinasi pengelolaan pada tingkat pusat diarahkan untuk mengoptimalkan peran serta kementerian/lembaga dalam membangun dan mengelola Kawasan Perbatasan sesuai tugas dan fungsinya yang didukung dengan pemanfaatan teknologi berbasis digital. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan komitmen bersama antar-kementerian/lembaga untuk mengalokasikan sumber daya ke Kawasan Perbatasan;
- 2) memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola BWN-KP lintas kementerian/lembaga; dan
- 3) meningkatkan sistem koordinasi dan komunikasi berbasis data dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan BWN-KP dengan transformasi digital.

c. Subbidang Koordinasi Pengelolaan Pusat-Daerah

Kebijakan subbidang koordinasi pengelolaan pada tingkat pusat dan daerah diarahkan untuk meningkatkan sinergi pusat dan daerah yang berkesinambungan dalam memajukan Kawasan Perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan koordinasi dan komunikasi kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah yang didukung teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan BWN-KP antar pusat dan daerah;

2) memperkuat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- 2) memperkuat peran kelembagaan pengelola perbatasan di daerah yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan/atau unit kerja yang membidangi pengelolaan BWN-KP di daerah untuk mewujudkan pengelolaan perbatasan di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, baik dalam aspek perencanaan maupun pengendalian dan evaluasi, serta tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan BWN-KP.
- d. Subbidang Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Partisipasi Aktor Nonpemerintah

Kebijakan kerja sama perguruan tinggi dan partisipasi aktor nonpemerintah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan serta mengembangkan dan menyediakan infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat Kawasan Perbatasan melalui penelitian dan pelatihan serta pengembangan potensi Kawasan Perbatasan, sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
  - 2) meningkatkan partisipasi berbagai elemen nonpemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan perbatasan dan mendorong tidak hanya terfokus pada pembangunan oleh pemerintah saja;
  - 3) mengembangkan komunikasi formal dan informal antara elemen nonpemerintah dengan pemangku kebijakan pengelola BWN-KP untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan.
2. Bidang Perencanaan Pengelolaan Perbatasan Negara

Untuk memperkuat pendekatan integratif dalam pelaksanaan program dan prioritas pengelolaan perbatasan negara sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, upaya untuk memadukan pelaksanaan perencanaan program pengelolaan BWN-KP salah satunya dilakukan melalui pembagian peran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menyebutkan bahwa program pengelolaan perbatasan

negara . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

negara dilaksanakan dan didanai oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan anggota BNPP, sedangkan BNPP berperan sebagai koordinator yang menyinergikan program pengelolaan perbatasan. Pendekatan integratif diperlukan untuk memastikan kesiapan para pihak terkait dalam mempersiapkan dan merencanakan prioritas pengelolaan perbatasan negara agar pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan negara dapat berjalan secara efektif, sinergis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target pembangunan.

**Subbidang Perencanaan Pengelolaan BWN-KP**

Kebijakan Perencanaan Pengelolaan BWN-KP diarahkan pada sinkronisasi penyusunan perencanaan pengelolaan BWN-KP antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- a. menjadikan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagai pedoman dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan BWN-KP;
- b. memastikan kebijakan, program, kegiatan, dan indikasi anggaran dalam dokumen Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP termuat dalam dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki wilayah perbatasan.

**3. Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan Negara**

**a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BWN-KP**

Kebijakan monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan diarahkan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan serta memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana pengelolaan perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) mengimplementasikan instrumen monitoring dan evaluasi dalam memantau dan mengukur kinerja pengelolaan BWN-KP;

2) meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- 2) meningkatkan peran kelembagaan pengendalian dan evaluasi pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan. Monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk menilai capaian pengelolaan BWN-KP.

b. Subbidang Data dan Informasi Pengelolaan BWN-KP

Kebijakan penguatan data dan informasi diarahkan untuk memperkuat basis data pengelolaan BWN-KP sebagai rujukan dan input dalam pengambilan kebijakan untuk memajukan Kawasan Perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) membangun sistem basis data pengelolaan BWN-KP yang akurat dan mutakhir serta ekosistem yang terkoneksi didukung transformasi digital;
- 2) memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi pengelolaan BWN-KP.

BAB IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

#### BAB IV WILAYAH PENGELOLAAN

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 mengacu pada 2 (dua) prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Pembangunan Kewilayahan dan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (polhukhankam). Pembangunan Kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah, dengan sasaran antara lain: (1) meningkatnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI; (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (4) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan pendekatan spasial atas dasar data dan informasi yang lengkap sesuai dengan rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Pembangunan dimaksud dilaksanakan secara terintegrasi, mengutamakan kerja sama dan keterpaduan program dan kegiatan antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, serta antar-pemerintah dan badan usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat, melalui pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, yang di dalamnya juga terdapat Kawasan Perbatasan.

Pengelolaan perbatasan memiliki tujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara dan kedaulatan negara melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Perbatasan. Pembangunan polhukhankam diarahkan untuk mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara, meningkatnya pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang, pengelolaan Kawasan Perbatasan terbagi atas 9 (sembilan) Kawasan Perbatasan negara sebagai berikut:

1. Kawasan Perbatasan negara di Aceh dan Sumatera Utara;
2. Kawasan Perbatasan negara di Riau dan Kepulauan Riau;
3. Kawasan Perbatasan negara di Pulau Kalimantan;

4. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

4. Kawasan Perbatasan negara di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara;
5. Kawasan Perbatasan negara di Maluku Utara dan Papua Barat;
6. Kawasan Perbatasan negara di Maluku;
7. Kawasan Perbatasan negara di Nusa Tenggara Timur;
8. Kawasan Perbatasan negara di Papua;
9. Kawasan Perbatasan dengan Laut Lepas.

Lokasi pengelolaan perbatasan diprioritaskan pada Kawasan Perbatasan, dalam hal ini adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Lokasi pengelolaan yang dipilih disebut sebagai Lokpri. Pemilihan Lokpri pengelolaan perbatasan secara garis besar dilakukan berdasarkan pendekatan pertahanan dan keamanan (*hankam*) atau *security approach* dan pendekatan kesejahteraan masyarakat atau *prosperity approach*. Pendekatan pertama yang menjadi perhatian adalah aspek *hankam*, kemudian aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan selanjutnya aspek kelestarian lingkungan (*environmental approach*) melengkapi kedua aspek *hankam* dan kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan.

Pemilihan Lokpri juga mempertimbangkan aspek ketataruangan dan regional kawasan-kawasan pusat kegiatan dan penyangga di sekitarnya. Kriteria kecamatan perbatasan yang menjadi Lokpri dalam pengelolaan BWN-KP 2020-2024, adalah:

1. kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di darat;
2. kecamatan yang berbatasan langsung (kecuali laut lepas) dengan negara tetangga di laut, yang merupakan pemantapan Lokpri tahun 2015-2019;
3. kecamatan yang merupakan/berada dan/atau memiliki PPKT, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga;
4. kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai RTR KPN;
5. kecamatan yang di wilayahnya terdapat PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;

6. kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

6. kecamatan yang berfungsi sebagai PKSN dan merupakan pemantapan PKSN Tahun 2015-2019, PKSN yang di wilayahnya terdapat PLBN, serta PKSN dengan pertimbangan khusus untuk mendorong aspek pemerataan.

Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 lebih fokus dan terintegrasi mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, lokus wilayah pengelolaan BWN-KP dilakukan pada 4 (empat) unsur yaitu PLBN, PPKT, PKSN, dan Lokpri. Wilayah Pengelolaan BWN-KP 2020-2024, diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel Wilayah Pengelolaan BWN-KP 2020-2024

| No | Jenis                  | Jumlah           | Darat | Laut | Keterangan   |
|----|------------------------|------------------|-------|------|--|
| 1  | PLBN                   | 26<br>Lokasi     | 21    | 5    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 PLBN telah selesai dibangun pada tahun 2019</li><li>• 10 PLBN dibangun mulai Tahun 2020</li><li>• 8 PLBN akan dibangun pada tahun 2022-2024</li></ul>      |
| 2  | PPKT Tidak Berpenduduk | 49<br>Pulau      | -     | 49   | <ul style="list-style-type: none"><li>• PPKT Berpenduduk sudah termasuk dalam intervensi Lokpri</li></ul>  |
| 3  | PKSN                   | 18<br>Lokasi     | 10    | 8    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16 PKSN dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan; 6 diantaranya <i>Major Project</i>.</li><li>• 2 PKSN di Luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.</li></ul> |
| 4  | Lokpri                 | 222<br>Kecamatan | 69    | 153  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 176 Lokpri di dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.</li><li>• 46 Lokpri di Luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.</li></ul>                            |

A. POS LINTAS BATAS NEGARA

PLBN di Kawasan Perbatasan telah menjadi wajah baru pengelolaan BWN-KP, sebagai beranda depan bagi para pelintas batas yang masuk ke Indonesia. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan rencana lokasi PLBN adalah Instruksi Presiden serta keberadaan lokasi strategis kebutuhan pelayanan lintas batas negara dan unsur resiprokalitasnya. Saat ini telah

terbangun . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

terbangun 7 (tujuh) PLBN selama periode lalu melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Selanjutnya pada tahun 2019 telah ditetapkan 11 (sebelas) PLBN baru yang akan dibangun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Pada akhir tahun 2019 telah selesai 1 (satu) PLBN di Sota, Kabupaten Merauke, sementara sisanya dibangun secara bertahap hingga tahun 2024. Di samping itu, berdasarkan keberadaan kebutuhan pelayanan lintas batas dalam RPJMN Tahun 2020-2024, direncanakan 8 (delapan) lokasi yang akan dibangun PLBN pada tahun 2022-2024, sehingga target pengelolaan dan pembangunan PLBN Tahun 2020-2024 menjadi 26 (dua puluh enam) PLBN.

Adapun 18 (delapan belas) PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan menurut provinsi, meliputi:

1. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna di Serasan (PLBN Laut).
2. Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Darat):
  - a. Kabupaten Sambas di Aruk;
  - b. Kabupaten Bengkayang di Jagoi Babang;
  - c. Kabupaten Sanggau di Entikong;
  - d. Kabupaten Sintang di Sei Kelik;
  - e. Kabupaten Kapuas Hulu di Badau.
3. Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. Kabupaten Malinau di Long Nawang (PLBN Darat);
  - b. Kabupaten Nunukan di Labang, Long Midang, (PLBN Darat), dan Sei Nyamuk/Sei Pancang (PLBN Laut).
4. Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Darat):
  - a. Kabupaten Kupang di Oepoli;
  - b. Kabupaten Timor Tengah Utara di Wini dan Napan;
  - c. Kabupaten Belu di Motaain;
  - d. Kabupaten Malaka di Motamasin.

5. Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

5. Provinsi Papua (PLBN Darat):
  - a. Kota Jayapura di Skouw;
  - b. Kabupaten Boven Digoel di Yetetkun;
  - c. Kabupaten Merauke di Sota.

#### B. PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, PPKT merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yaitu kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk: (1) pertahanan keamanan; (2) kesejahteraan masyarakat; (3) pelestarian lingkungan.

Secara umum PPKT dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: PPKT berpenduduk dan PPKT tidak berpenduduk. Pembangunan PPKT berpenduduk dilakukan secara terintegrasi dengan program dan kegiatan pembangunan di Lokpri. Selanjutnya, PPKT tidak berpenduduk difungsikan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang pengelolaannya sesuai target RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan di sejumlah 49 (empat puluh sembilan) PPKT pada 26 (dua puluh enam) kabupaten di 13 (tiga belas) provinsi, sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh, Kota Sabang: Pulau Rondo.
2. Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai: Pulau Berhala.
3. Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir: Pulau Batumandi.
4. Provinsi Kepulauan Riau:
  - a. Kabupaten Bintan: Pulau Berakit, Pulau Malang berdaun, dan Pulau Sentut;
  - b. Kabupaten Karimun: Pulau Tokonghiu Kecil/Pulau Iyu Kecil;
  - c. Kabupaten Natuna: Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, dan Pulau Kepala;
  - d. Kabupaten Kepulauan Anambas: Pulau Tokong Belayar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Mangkai;

e. Kota . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- e. Kota Batam: Pulau Nipa, Pulau Batuberantai/Pulau Batu Berhanti, dan Pulau Putri/Pulau Nongsa.
5. Provinsi Nusa Tenggara Timur:
  - a. Kabupaten Kupang: Pulau Batek;
  - b. Kabupaten Rote Ndao: Pulau Ndana/Pulau Dana;
  - c. Kabupaten Sabu Raijua: Pulau Dana.
6. Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau: Pulau Sambit.
7. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan: Pulau Karang Unarang.
8. Provinsi Sulawesi Utara:
  - a. Kabupaten Kepulauan Sangihe: Pulau Batubawaikang;
  - b. Kabupaten Kepulauan Talaud: Pulau Intata;
  - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: Pulau Bongkil/Pulau Bangkit.
9. Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli: Pulau Dolangan dan Pulau Solando/Pulau Salando.
10. Provinsi Maluku:
  - a. Kabupaten Kepulauan Tanimbar: Pulau Asutubun dan Pulau Batarkusu;
  - b. Kabupaten Kepulauan Aru: Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Ararkula, Pulau Karerei/Pulau Karaweira Besar, Pulau Karang, Pulau Batugoyang, dan Pulau Enu.
11. Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah: Pulau Yiew Besar/Pulau Jiew.
12. Provinsi Papua:
  - a. Kabupaten Merauke: Pulau Habe/Pulau Habee dan Pulau Komolom;
  - b. Kabupaten Mimika: Pulau Puriri;
  - c. Kabupaten Supiori: Pulau Fanildo;
  - d. Kabupaten Asmat: Pulau Laag.
13. Provinsi Papua Barat:
  - a. Kabupaten Raja Ampat: Pulau Fani, dan Pulau Moff/Pulau Budd.
  - b. Kabupaten Tambraw: Pulau Missou.

C. PUSAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

### C. PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL

Pengelolaan dan pengembangan PKSN tahun 2020-2024 didasarkan pada amanat RPJMN Tahun 2020-2024, yang menetapkan koridor pembangunan terbagi menjadi dua yaitu “koridor pertumbuhan” dan “koridor pemerataan”. Berdasarkan pertimbangan di atas, ditetapkan PKSN yang menjadi fokus pada pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 yaitu 16 (enam belas) PKSN di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan, yang terdiri atas 9 (sembilan) PKSN Darat, dan 7 (tujuh) PKSN Laut (termasuk enam diantaranya adalah *Major Project* RPJMN Tahun 2020-2024), dan 2 (dua) PKSN di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan, yang terdiri atas 1 (satu) PKSN Darat dan 1 (satu) PKSN Laut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Di Dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan
  - a. Provinsi Aceh, Kota Sabang: PKSN Sabang (PKSN Laut);
  - b. Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis: PKSN Bengkalis (PKSN Laut);
  - c. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna: PKSN Ranai (PKSN Laut);
  - d. Provinsi Kalimantan Barat (PKSN Darat):
    - 1) Kabupaten Sambas: PKSN Paloh Aruk;
    - 2) Kabupaten Bengkayang: PKSN Jagoi Babang;
  - e. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan: PKSN Tou Lumbis dan PKSN Long Midang, (PKSN Darat) dan PKSN Nunukan (PKSN Laut);
  - f. Provinsi Nusa Tenggara Timur (PKSN Darat):
    - 1) Kabupaten Belu: PKSN Atambua;
    - 2) Kabupaten Timor Tengah Utara: PKSN Kefamenanu;
  - g. Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe: PKSN Tahuna (PKSN Laut).
  - h. Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar: PKSN Saumlaki (PKSN Laut).
  - i. Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Morotai: PKSN Daruba (PKSN Laut).
  - j. Provinsi Papua (PKSN Darat);
    - 1) Kota Jayapura: PKSN Jayapura;
    - 2) Kabupaten . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- 2) Kabupaten Boven Digoel: PKSN Tanah Merah;
  - 3) Kabupaten Merauke: PKSN Merauke.
2. Di Luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan
- a. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau: PKSN Long Nawang (PKSN Darat).
  - b. Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud: PKSN Melonguane (PKSN Laut).

Cakupan kecamatan yang masuk dalam wilayah PKSN ditetapkan melalui deliniasi PKSN. Penetapan kecamatan tersebut menjadi bagian instrumen untuk pemantauan dan pengukuran tingkat keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah. Deliniasi PKSN didasarkan pada RDTR PKSN, RTRW kabupaten/kota, RTRKPN, dan *Masterplan* Percepatan Pembangunan Ekonomi berbasis PKSN. Dari hasil deliniasi PKSN diperoleh 46 (empat puluh enam) kecamatan, yaitu 36 (tiga puluh enam) kecamatan yang merupakan Lokpri dan 10 (sepuluh) kecamatan di luar Lokpri yang ditangani pada periode Tahun 2020-2024, namun berada dalam cakupan wilayah PKSN, yaitu:

1. Kecamatan Lokpri
  - a. PKSN Sabang: Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya;
  - b. PKSN Bengkalis: Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan;
  - c. PKSN Ranai: Kecamatan Bunguran Utara; Kecamatan Bunguran, Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, dan Kecamatan Pulau Tiga;
  - d. PKSN Atambua: Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Raihat;
  - e. PKSN Kefamenanu: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, dan Kecamatan Bikomi Nilulat;
  - f. PKSN Paloh Aruk: Kecamatan Saingan Besar dan Kecamatan Paloh;
  - g. PKSN Jagoi Babang: Kecamatan Jagoi Babang;
  - h. PKSN Log Nawang: Kecamatan Kayan Hulu;
  - i. PKSN Tou Lumbis: Kecamatan Lumbis Ogong;
  - j. PKSN Long Midang: Kecamatan Krayan;
  - k. PKSN Nunukan: Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan Kecamatan Sebatik Utara;
  - l. PKSN Tahuna: Kecamatan Tahuna dan Kecamatan Tahuna Timur;
  - m. PKSN Melonguane: Kecamatan Melonguane;

n. PKSN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- n. PKSN Saumlaki: Kecamatan Tanimba Utara dan Kecamatan Tanimbar Selatan;
  - o. PKSN Daruba: Kecamatan Morotai Selatan;
  - p. PKSN Jayapura: Kecamatan Jayapura Utara dan Kecamatan Muara Tami;
  - q. PKSN Tanah Merah: Kecamatan Ninati;
  - r. PKSN Merauke: Kecamatan Meraike, Kecamatan Sota, dan Kecamatan Semangga.
2. Kecamatan di Luar Lokpri
- a. PKSN Atambua: Kecamatan Atambua Barat; Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kalkuluk Mesak, dan Kecamatan Kota Atambua;
  - b. PKSN Kefamenanu: Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Bikomi Selatan;
  - c. PKSN Tahuna: Kecamatan Tahuna Barat;
  - d. PKSN Jayapura: Kecamatan Jayapura Selatan dan Kecamatan Abepura;
  - e. PKSN Tanah Merah: Kecamatan Mandobo.

Konsep pengembangan kecamatan yang masuk ke dalam cakupan wilayah PKSN, sebagai wilayah *hinterland* pusat pertumbuhan PKSN, dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas dalam kecamatan, pengembangan ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan dari hulu sampai dengan hilir, serta tata kelola pemerintahan. Sedangkan konsep pengembangan kecamatan perbatasan non-Lokpri dan kecamatan nonperbatasan yang masuk ke dalam deliniasi PKSN, diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan dari hulu sampai hilir.

Dari 18 (delapan belas) PKSN di atas, 6 (enam) PKSN di antaranya ditetapkan sebagai proyek prioritas atau *Major Project* meliputi: (1) PKSN Paloh Aruk; (2) PKSN Nunukan; (3) PKSN Jayapura; (4) PKSN Merauke; (5) PKSN Atambua; dan (6) PKSN Kefamenanu. Selanjutnya, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan, 3 (tiga) PKSN di antaranya dilakukan percepatan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Kawasan Perbatasan Aruk dalam lingkup PKSN Paloh Aruk, Kawasan Perbatasan Motaain dalam lingkup PKSN Atambua, dan Kawasan Perbatasan Skouw dalam lingkup PKSN Jayapura.

D. LOKASI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

D. LOKASI PRIORITAS

Penentuan Lokpri dilakukan melalui beberapa parameter sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Lokasi ini berada pada wilayah administrasi kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Wilayah Negara. Berdasarkan pertimbangan keberadaan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta amanat RTRKPN dan hasil evaluasi pengelolaan Lokpri periode sebelumnya, jumlah Lokpri yang dikelola pada tahun 2020-2024 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi, dan terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 176 (seratus tujuh puluh enam) Lokpri pada 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi berada di dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan, dan 46 (empat puluh enam) Lokpri pada 11 (sebelas) kabupaten di 6 (enam) provinsi berada di luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.

Tabel Daftar Lokasi Prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024

| PROVINSI/<br>KABUPATEN/KOTA | PENANGANAN<br>TAHUN 2020-2024 |    |                   | DALAM/LUAR<br>KORIDOR<br>PERTUMBUHAN<br>DAN<br>Pemerataan |               |
|-----------------------------|-------------------------------|----|-------------------|---|---------------|
|                             | LOKPRI                        |    | DARAT/<br>LAUT    |   |               |
| <b>I. ACEH</b>              |                               |    |                   |   |               |
| 1.                          | Aceh Besar                    | 1  | Mesjid Raya       | Laut  | Dalam Koridor |
| 2.                          | Kota Sabang                   | 2  | Sukakarya         | Laut  | Dalam Koridor |
|                             |                               | 3  | Sukajaya          | Laut  | Dalam Koridor |
| 3.                          | Kota Langsa                   | 4  | Langsa Barat      | Laut  | Dalam Koridor |
| <b>II. SUMATERA UTARA</b>   |                               |    |                   |   |               |
| 4.                          | Serdang Bedagai               | 5  | Tanjung Beringin  | Laut  | Dalam Koridor |
| 5.                          | Batu Bara                     | 6  | Sei Suka          | Laut  | Dalam Koridor |
| <b>III. RIAU</b>            |                               |    |                   |   |               |
| 6.                          | Bengkalis                     | 7  | Bengkalis         | Laut  | Dalam Koridor |
|                             |                               | 8  | Bantan            | Laut  | Dalam Koridor |
|                             |                               | 9  | Rupat             | Laut  | Dalam Koridor |
|                             |                               | 10 | Rupat Utara       | Laut  | Dalam Koridor |
|                             |                               | 11 | Bandar Laksamana  | Laut  | Dalam Koridor |
| 7.                          | Rokan Hilir                   | 12 | Bangko            | Laut  | Dalam Koridor |
|                             |                               | 13 | Pasir Limau Kapas | Laut  | Dalam Koridor |
|                             |                               | 14 | Sinaboi           | Laut  | Dalam Koridor |
| 8.                          | Kota Dumai                    | 15 | Sungai Sembilan   | Laut  | Dalam Koridor |
|                             |                               | 16 | Medang Kampai     | Laut  | Dalam Koridor |

9. Kep. Meranti . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

| PROVINSI/<br>KABUPATEN/KOTA |              | PENANGANAN<br>TAHUN 2020-2024 |                     |                | DALAM/LUAR<br>KORIDOR<br>PERTUMBUHAN<br>DAN<br>PEMERATAAN |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---|
|                             |              | LOKPRI                        |                     | DARAT/<br>LAUT |   |
| 9.                          | Kep. Meranti | 17                            | Rangsang Barat      | Laut           | Luar Koridor  |
|                             |              | 18                            | Rangsang            | Laut           | Luar Koridor  |
|                             |              | 19                            | Pulau Merbau        | Laut           | Luar Koridor  |
|                             |              | 20                            | Tasik Putri Puyu    | Laut           | Luar Koridor  |
|                             |              | 21                            | Rangsang Pesisir    | Laut           | Luar Koridor  |
| <b>IV. KEPULAUAN RIAU</b>   |              |                               |                     |                |   |
| 10.                         | Bintan       | 22                            | Gunung Kijang       | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 23                            | Bintan Utara        | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 24                            | Telok Sebong        | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 25                            | Bintan Pesisir      | Laut           | Dalam Koridor   |
| 11.                         | Karimun      | 26                            | Moro                | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 27                            | Karimun             | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 28                            | Meral               | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 29                            | Tebing              | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 30                            | Buru                | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 31                            | Meral Barat         | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 32                            | Belat               | Laut           | Dalam Koridor   |
| 12.                         | Natuna       | 33                            | Bunguran Barat      | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 34                            | Serasan             | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 35                            | Bunguran Timur      | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 36                            | Bunguran Utara      | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 37                            | Subi                | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 38                            | Pulau Laut          | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 39                            | Pulau Tiga          | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 40                            | Bunguran Timur Laut | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 41                            | Bunguran Selatan    | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 42                            | Serasan Timur       | Laut           | Dalam Koridor   |
| 13.                         | Kep. Anambas | 43                            | Siantan             | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 44                            | Palatak             | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 45                            | Siantan Selatan     | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 46                            | Jemaja Timur        | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 47                            | Jemaja              | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 48                            | Siantan Utara       | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 49                            | Jemaja Barat        | Laut           | Dalam Koridor   |
| 14.                         | Kota Batam   | 50                            | Belakang Padang     | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 51                            | Batu Ampar          | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 52                            | Sekupang            | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 53                            | Nongsa              | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 54                            | Lubuk Raja          | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 55                            | Bengkong            | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |              | 56                            | Batam Kota          | Laut           | Dalam Koridor   |

V. NUSA . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

| PROVINSI/<br>KABUPATEN/KOTA   |                       | PENANGANAN<br>TAHUN 2020-2024 |                  |                | DALAM/LUAR<br>KORIDOR<br>PERTUMBUHAN<br>DAN<br>PEMERATAAN |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---|
|                               |                       | LOKPRI                        |                  | DARAT/<br>LAUT |   |
| <b>V. NUSA TENGGARA TIMUR</b> |                       |                               |                  |                |   |
| 15.                           | Kupang                | 57                            | Amfoang Timur    | Darat          | Dalam Koridor   |
| 16.                           | Timor Tengah<br>Utara | 58                            | Miomafo Barat    | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 59                            | Insana Utara     | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 60                            | Mutis            | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 61                            | Bikomi Tengah    | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 62                            | Bikomi Nilulat   | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 63                            | Bikomi Utara     | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 64                            | Naibenu          | Darat          | Dalam Koridor   |
| 17.                           | Belu                  | 65                            | Lamaknen         | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 66                            | Tasifeto Timur   | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 67                            | Raihat           | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 68                            | Tasifeto Barat   | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 69                            | Lasiolat         | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 70                            | Lamaknen Selatan | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 71                            | Nanaet Dubesi    | Darat          | Dalam Koridor   |
| 18.                           | Malaka                | 72                            | Malaka Tengah    | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 73                            | Malaka Barat     | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 74                            | Wewiku           | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 75                            | Kobalima Timur   | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 76                            | Kobalima         | Laut           | Dalam Koridor   |
| 19.                           | Alor                  | 77                            | Teluk Mutiara    | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 78                            | Alor Barat Daya  | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 79                            | Alor Selatan     | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 80                            | Alor Timur       | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 81                            | Mataru           | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 82                            | Pureman          | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 83                            | Pantar Tengah    | Laut           | Luar Koridor  |
| 20.                           | Rote Ndao             | 84                            | Rote Barat Daya  | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 85                            | Lobalain         | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 86                            | Pantai Baru      | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 87                            | Rote Timur       | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 88                            | Rote Barat       | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 89                            | Rote Selatan     | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 90                            | Landu Leko       | Laut           | Luar Koridor  |
| 21.                           | Sabu Raijua           | 91                            | Sabu Timur       | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 92                            | Sabu Liae        | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 93                            | Hawu Mehara      | Laut           | Luar Koridor  |
|                               |                       | 94                            | Raijua           | Laut           | Luar Koridor  |
| <b>VI. KALIMANTAN BARAT</b>   |                       |                               |                  |                |   |
| 22.                           | Sambas                | 95                            | Paloh            | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |                       | 96                            | Sajingan Besar   | Darat          | Dalam Koridor   |

23. Bengkulu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

| PROVINSI/<br>KABUPATEN/KOTA   |              | PENANGANAN<br>TAHUN 2020-2024 |                    |                | DALAM/LUAR<br>KORIDOR<br>PERTUMBUHAN<br>DAN<br>PEMERATAAN |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---|
|                               |              | LOKPRI                        |                    | DARAT/<br>LAUT |   |
| 23.                           | Bengkayang   | 97                            | Jagoi Babang       | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 98                            | Siding             | Darat          | Dalam Koridor   |
| 24.                           | Sanggau      | 99                            | Entikong           | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 100                           | Sekayam            | Darat          | Luar Koridor  |
| 25.                           | Sintang      | 101                           | Ketungau Tengah    | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 102                           | Ketungau Hulu      | Darat          | Luar Koridor  |
| 26.                           | Kapuas Hulu  | 103                           | Putussibau Utara   | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 104                           | Embaloh Hulu       | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 105                           | Batang Lupar       | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 106                           | Badau              | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 107                           | Putussibau Selatan | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 108                           | Puring Kencana     | Darat          | Luar Koridor  |
| <b>VII. KALIMANTAN TIMUR</b>  |              |                               |                    |                |   |
| 27.                           | Berau        | 109                           | Maratua            | Laut           | Dalam Koridor   |
| 28.                           | Mahakam Ulu  | 110                           | Long Apari         | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 111                           | Long Pahangai      | Darat          | Luar Koridor  |
| <b>VIII. KALIMANTAN UTARA</b> |              |                               |                    |                |   |
| 29.                           | Nunukan      | 112                           | Sebatik            | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 113                           | Nunukan            | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 114                           | Krayan             | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 115                           | Krayan Selatan     | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 116                           | Sebatik Barat      | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 117                           | Nunukan Selatan    | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 118                           | Sebatik Timur      | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 119                           | Sebatik Utara      | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 120                           | Sebatik Tengah     | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 121                           | Sei Menggaris      | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 122                           | Tulin Onsoi        | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 123                           | Krayan Tengah      | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 124                           | Krayan Timur       | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 125                           | Krayan Barat       | Darat          | Dalam Koridor   |
| 30.                           | Malinau      | 126                           | Lumbis Ogong       | Darat          | Dalam Koridor   |
|                               |              | 127                           | Pujungan           | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 128                           | Kayan Hilir        | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 129                           | Kayan Hulu         | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 130                           | Kayan Selatan      | Darat          | Luar Koridor  |
|                               |              | 131                           | Bahau Hulu         | Darat          | Luar Koridor  |
| <b>IX. SULAWESI UTARA</b>     |              |                               |                    |                |   |
| 31.                           | Kep. Sangihe | 132                           | Tabukan Utara      | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 133                           | Nusa Tabukan       | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 134                           | Kendahe            | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 135                           | Tahuna             | Laut           | Dalam Koridor   |
|                               |              | 136                           | Tahuna Timur       | Laut           | Dalam Koridor   |

137 Kepulauan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

| PROVINSI/<br>KABUPATEN/KOTA |                                     | PENANGANAN<br>TAHUN 2020-2024 |                            |                | DALAM/LUAR<br>KORIDOR<br>PERTUMBUHAN<br>DAN<br>PEMERATAAN |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|---|
|                             |                                     | LOKPRI                        |                            | DARAT/<br>LAUT |   |
|                             |                                     | 137                           | Kepulauan Marore           | Laut           | Dalam Koridor   |
| 32.                         | Minahasa Utara                      | 138                           | Wori                       | Laut           | Dalam Koridor   |
| 33.                         | Bolaang<br>Mongondow<br>Utara       | 139                           | Pinogaluman                | Laut           | Dalam Koridor   |
| 34.                         | Kep. Talaud                         | 140                           | Nanusa                     | Laut           | Luar Koridor  |
|                             |                                     | 141                           | Kabaruan                   | Laut           | Luar Koridor  |
|                             |                                     | 142                           | Melonguane                 | Laut           | Luar Koridor  |
|                             |                                     | 143                           | Damau                      | Laut           | Luar Koridor  |
|                             |                                     | 144                           | Miangas                    | Laut           | Luar Koridor  |
| 35.                         | Kep. Siau,<br>Tagulandang,<br>Biaro | 145                           | Siau Barat                 | Laut           | Luar Koridor  |
| <b>X. SULAWESI TENGAH</b>   |                                     |                               |                            |                |   |
| 36.                         | Toli-toli                           | 146                           | Dampal Utara               | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 147                           | Toli-toli Utara            | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 148                           | Dako Pemeian               | Laut           | Dalam Koridor   |
| <b>XI. GORONTALO</b>        |                                     |                               |                            |                |   |
| 37.                         | Gorontalo Utara                     | 149                           | Anggrek                    | Laut           | Dalam Koridor   |
| <b>XII. MALUKU</b>          |                                     |                               |                            |                |   |
| 38.                         | Maluku Tenggara                     | 150                           | Kei Besar                  | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 151                           | Kei Besar Selatan          | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 152                           | Kei Besar Utara<br>Timur   | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 153                           | Kei Besar Selatan<br>Barat | Laut           | Dalam Koridor   |
| 39.                         | Kep. Tanimbar                       | 154                           | Tanimbar Selatan           | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 155                           | Selaru                     | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 156                           | Wer Tamrian                | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 157                           | Tanimbar Utara             | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 158                           | Yaru                       | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 159                           | Kormomolin                 | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 160                           | Nirunmas                   | Laut           | Dalam Koridor   |
| 40.                         | Kepulauan Aru                       | 161                           | Pulau-Pulau Aru            | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 162                           | Aru Tengah Selatan         | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 163                           | Sir-Sir                    | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 164                           | Aru Tengah Timur           | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 165                           | Aru Selatan Timur          | Laut           | Dalam Koridor   |
| 41.                         | Maluku Barat<br>Daya (MBD)          | 166                           | Moa Lakor                  | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 167                           | Mndona Hiera               | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 168                           | Pulau-Pulau Babar          | Laut           | Dalam Koridor   |
|                             |                                     | 169                           | Wetar                      | Laut           | Dalam Koridor   |

170 Pulau-Pulau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

| PROVINSI/<br>KABUPATEN/KOTA |                       | PENANGANAN<br>TAHUN 2020-2024 |                           |                | DALAM/LUAR<br>KORIDOR:<br>PERTUMBUHAN<br>DAN<br>PEMERATAAN |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|--|
|                             |                       | LOKPRI                        |                           | DARAT/<br>LAUT |  |
|                             |                       | 170                           | Pulau-Pulau<br>Terselatan | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 171                           | Pulau Leti                | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 172                           | Pulau Masela              | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 173                           | Pulau Lakor               | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 174                           | Wetar Utara               | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 175                           | Wetar Barat               | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 176                           | Wetar Timur               | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 177                           | Kisar Utara               | Laut           | Dalam Koridor  |
| <b>XIII. MALUKU UTARA</b>   |                       |                               |                           |                |  |
| 42.                         | Halmahera<br>Tengah   | 178                           | Patani Utara              | Laut           | Dalam Koridor  |
| 43.                         | Pulau Morotai         | 179                           | Morotai Selatan           | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 180                           | Morotai Selatan<br>Barat  | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 181                           | Morotai Jaya              | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 182                           | Morotai Utara             | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 183                           | Morotai Timur             | Laut           | Dalam Koridor  |
| <b>XIV. PAPUA</b>           |                       |                               |                           |                |  |
| 44.                         | Merauke               | 184                           | Merauke                   | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 185                           | Kimaam                    | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 186                           | Semangga                  | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 187                           | Ulilin                    | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 188                           | Sota                      | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 189                           | Elikobal                  | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 190                           | Naukenjerai               | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 191                           | Okaba                     | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 192                           | Tabonji                   | Laut           | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 193                           | Waan                      | Laut           | Dalam Koridor  |
| 45.                         | Biak Numfor           | 194                           | Biak Kota                 | Laut           | Dalam Koridor  |
| 46.                         | Mimika                | 195                           | Mimika Timur Jauh         | Laut           | Dalam Koridor  |
| 47.                         | Sarmi                 | 196                           | Sarmi                     | Laut           | Dalam Koridor  |
| 48.                         | Keerom                | 197                           | Waris                     | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 198                           | Web                       | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 199                           | Arso Timur                | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 200                           | Towe                      | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 201                           | Yaffi                     | Darat          | Dalam Koridor  |
| 49.                         | Pegunungan<br>Bintang | 202                           | Iwur                      | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 203                           | Batom                     | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 204                           | Kiwirok Timur             | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 205                           | Tarup                     | Darat          | Dalam Koridor  |
|                             |                       | 206                           | Oksamol                   | Darat          | Dalam Koridor  |

207 Okbemtau . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 69 -

| PROVINSI/<br>KABUPATEN/KOTA   |               | PENANGANAN<br>TAHUN 2020-2024 |                |                | DALAM/LUAR<br>KORIDOR<br>PERTUMBUHAN<br>DAN<br>PEMERATAAN |
|---|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|
|   |               | LOKPRI                        |                | DARAT/<br>LAUT |   |
| 50  | Supiori       | 207                           | Okbemptau      | Darat          | Dalam Koridor   |
|   |               | 208                           | Mofinop        | Darat          | Dalam Koridor   |
|   |               | 209                           | Supiori Utara  | Laut           | Dalam Koridor   |
|   |               | 210                           | Supiori Timur  | Laut           | Dalam Koridor   |
|   |               | 211                           | Kep. Aruri     | Laut           | Dalam Koridor   |
| 51  | Boven Digoel  | 212                           | Supiori Barat  | Laut           | Dalam Koridor   |
|   |               | 213                           | Waropko        | Darat          | Dalam Koridor   |
|   |               | 214                           | Jair           | Darat          | Dalam Koridor   |
|   |               | 215                           | Kombut         | Darat          | Dalam Koridor   |
|   |               | 216                           | Ninati         | Darat          | Dalam Koridor   |
| 52  | Kota Jayapura | 217                           | Sesnuk         | Darat          | Dalam Koridor   |
|   |               | 218                           | Jayapura Utara | Laut           | Dalam Koridor   |
|   |               | 219                           | Muaratami      | Darat          | Dalam Koridor   |
| <b>XV. PAPUA BARAT</b>  |               |                               |                |                |   |
| 53  | Raja Ampat    | 220                           | Kep. Ayau      | Laut           | Dalam Koridor   |
|   |               | 221                           | Ayau           | Laut           | Dalam Koridor   |
| 54  | Tambraw       | 222                           | Sausapor       | Laut           | Dalam Koridor   |
| <b>TOTAL PENANGANAN TAHUN 2020-2024: 222 KECAMATAN, 54 KABUPATEN/KOTA<br/>DAN 15 PROVINSI</b> |               |                               |                |                |   |

BAB V . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

## **BAB V**

### **PROGRAM SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sejalan dengan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pengelolaan BWN-KP Tahun 2020-2024 difokuskan pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu: (1) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (2) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam arah strategis, kebijakan, dan strategi pelaksanaan pengelolaan BWN-KP, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Kebijakan dan strategi pelaksanaan di atas selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam satu program, yaitu Program Pengelolaan Perbatasan Negara. Sasaran program dimaksud yaitu: (1) meningkatnya pengelolaan Batas Wilayah Negara dan lintas batas negara melalui penyelesaian dan penegasan Batas Wilayah Negara, peningkatan pertahanan wilayah negara, peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, serta pembangunan dan pengelolaan PLBN; (2) terwujudnya pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tata ruang di Kawasan Perbatasan; (3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Kawasan Perbatasan negara melalui pengembangan infrastruktur konektivitas dan pengembangan infrastruktur sosial dasar serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, penyediaan sarana prasarana layanan pemerintahan serta aparatur pemerintahan yang memadai; (4) meningkatnya sistem kelembagaan antar-lembaga melalui penguatan koordinasi lembaga, baik antar-lembaga pusat, maupun pusat dan daerah.

Program ini memberikan arah bagi program dan kegiatan-kegiatan sektoral kementerian/lembaga agar terpadu, sinergis, dan komplementer. Selain itu, program ini mencerminkan pokok kegiatan-kegiatan teknis sektoral kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk pembangunan Kawasan Perbatasan dan masyarakat di Kawasan Perbatasan yang memuat kegiatan yang bersifat lintas sektor, sebagai wujud implementasi kebijakan dan komitmen negara melalui kementerian/lembaga. Mengacu pada kebijakan, strategi pelaksanaan, dan program tersebut, kegiatan pengelolaan BWN-KP dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:

Pertama . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Pertama, Batas Wilayah Negara, dengan 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (1) penyelesaian dan penegakan Batas Wilayah Negara; (2) peningkatan pertahanan wilayah negara; (3) peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah. Uraian kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Kedua, lintas batas negara, dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan PLBN. Uraian Kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara.

Ketiga, pembangunan Kawasan Perbatasan negara, dengan 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) penataan ruang Kawasan Perbatasan; (2) pengembangan potensi Kawasan Perbatasan negara; (3) pengembangan infrastruktur konektivitas; (4) pengembangan infrastruktur sosial dasar. Uraian Kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara.

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pengelolaan BWN-KP berdasarkan fokus Renaksi Pengelolaan BWN-KP tiap tahunnya, diperlukan dukungan pendanaan mengacu pada RKP, dengan fokus pada pengelolaan Batas Wilayah Negara, lintas batas negara, pembangunan Kawasan Perbatasan, dan sistem tata kelola perbatasan negara yang berkelanjutan. Kebijakan pendanaan diarahkan untuk memperkuat *money follow programme* sesuai RKP melalui penguatan aspek perencanaan dalam kerangka pencapaian prioritas nasional. Perencanaan dan pendanaan program prioritas juga disertai dengan langkah pengintegrasian kebijakan antarsektor yang mencakup pengintegrasian dan optimalisasi potensi sumber pendanaan.

Sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Wilayah Negara, rencana kebutuhan anggaran pengelolaan BWN-KP bersumber dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sesuai Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, diamanatkan bahwa pendanaan pelaksanaan teknis pengelolaan BWN-KP dibebankan pada APBN kementerian/lembaga terkait dan APBD setelah dikoordinasikan oleh BNPP.

Penyusunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Penyusunan kegiatan dan pendanaan pengelolaan BWN-KP dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024, dikoordinasikan oleh:

1. Sekretariat Tetap BNPP

Sekretariat Tetap BNPP menyusun kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan BWN-KP untuk jangka pendek (tahunan) yang tertuang dalam Rencana Aksi dan jangka menengah (lima tahunan) yang tertuang dalam Rencana Induk.

2. Kementerian/Lembaga

Kementerian/lembaga menyusun kegiatan dan pendanaan pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (lima tahunan) dengan berpedoman pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024. Pendanaan pengelolaan BWN-KP oleh kementerian/lembaga meliputi pembangunan batas negara seperti tapal batas, tugu tanda batas, gerbang batas, batas fisik, ataupun pos lintas batas; dan pembangunan Kawasan Perbatasan berupa pembangunan konektivitas kawasan, pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah, dan pembangunan infrastruktur sosial dasar, yang dilaksanakan berbasis RTR KPN termasuk RDTR KPN.

3. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota menyusun kegiatan dan pendanaan untuk mendukung pengelolaan BWN-KP yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024. Selanjutnya pendanaannya bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan perbatasan yang dikelola oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau instansi/unit kerja yang membidangi pengelolaan perbatasan negara di daerah.

4. Sektor Swasta

Sektor swasta dapat berperan dalam pembangunan Kawasan Perbatasan, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), *corporate social responsibility* (CSR), dan berbagai skema kerja sama lainnya.

B. PEMANTAUAN . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

## B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### 1. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, akuntabilitas, serta mengoptimalkan kinerja program pengelolaan perbatasan negara, dilakukan pengendalian dan evaluasi yang merupakan satu kesatuan manajemen dengan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BWN-KP.

#### a. Pengendalian

Pengendalian dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan program pengelolaan perbatasan negara sesuai dengan Renaksi Pengelolaan BWN-KP yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Pengendalian dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pengawasan. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Renaksi Pengelolaan BWN-KP, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sementara pengawasan dilakukan secara internal baik oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun oleh aparat pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai capaian pelaksanaan dan dampak melalui pengukuran kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BWN-KP, sebagai bahan masukan dalam perencanaan program pengelolaan perbatasan negara selanjutnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi masukan, keluaran, hasil, dan manfaat pelaksanaan program pengelolaan perbatasan negara, terhadap baik Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada tahun berkenaan, maupun Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024.

Evaluasi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 dilakukan seluruh anggota BNPP untuk mengukur kinerja program dan kegiatan dalam pengelolaan BWN-KP sesuai lingkup tugas masing-masing. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 dilakukan sebagai bagian dari rangkaian koordinasi BNPP untuk menyinergikan pelaksanaan program melalui rapat koordinasi serta melalui forum-forum koordinasi dan evaluasi yang ada. Seluruh rangkaian kegiatan pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa agenda prioritas dalam Renduk

Pengelolaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 yang dijabarkan ke dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dapat terlaksana dengan baik.

Secara umum kegiatan pengendalian dan evaluasi perlu diikuti dengan pelaporan secara berkala dan berjenjang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Indikator Pembangunan Pengelolaan BWN-KP

Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja pengelolaan perbatasan negara dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kegiatan pengendalian dan evaluasi pengelolaan BWN-KP dilakukan terhadap aspek pengelolaan Batas Wilayah Negara, lintas batas negara, dan pembangunan Kawasan Perbatasan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional di wilayah perbatasan negara, dengan Indikator Pembangunan sebagai berikut:

- a. Sasaran Pembangunan Wilayah (Prioritas Nasional 2) di Kawasan Perbatasan dengan indikator:

Tabel Indikator Pembangunan Wilayah (PN2)

| No | Indikator Pembangunan  | Baseline 2019     | Target RPJMN 2020-2024 |
|----|--|-------------------|------------------------|
| 1  | Jumlah Lokpri yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan) | 187               | 222                    |
| 2  | Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN      | 0,42              | 0,52                   |
| 3  | RDTR Perbatasan Negara   | 10 Matek RDTR KPN | 10 Rancangan Perpres   |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

b. Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- b. Sasaran Penguatan Pertahanan Keamanan (Prioritas Nasional 7) di Perbatasan dan Pulau Terluar yang difokuskan pada Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional, dengan indikator Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara akan diturunkan secara signifikan dari tahun ke tahun.

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan ke-7 RPJMN Tahun 2020-2024 melalui Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri, dilaksanakan 7 (tujuh) Proyek Prioritas Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, yaitu:

Tabel Proyek Prioritas Penguatan Hankam di Perbatasan dan PPKT Tahun 2020-2024

| No | Proyek Prioritas  | Target  |         |         |         |         | Total target RPJMN 2024 | Instansi Pelaksana                              |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---|
|    |   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                         |   |
| 1  | Pembangunan Pos Pamtas  | 12 Pos  | 8 Pos   | 9 Pos   | 7 Pos   | 7 Pos   | 43 Pos                  | Kementerian Pertahanan                          |
| 2  | Pembangunan Pos AL  | 15 Pos  | 16 Pos  | 16 Pos  | 16 Pos  | 16 Pos  | 79 Pos                  | Kementerian Pertahanan                          |
| 3  | Pembangunan Mako Polsek/ Polsubsektor   | -       | 9 Unit  | 9 Unit  | 9 Unit  | 9 Unit  | 36 Unit                 | Kepolisian Negara Republik Indonesia            |
| 4  | Pembangunan PLBN  | 10 Unit | 2 Unit  | 2 Unit  | 2 Unit  | 2 Unit  | 18 Unit                 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 5  | Pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP)  | 200 Km  | 200 Km  | 200 Km  | 200 Km  | 200 Km  | 1000 Km                 | Kementerian Pertahanan                          |
| 6  | Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem Hankam | 180 Org | 180 Org | 180 Org | 180 Org | 180 Org | 900 Org                 | Sekretariat Tetap BNPP                          |

7 Koordinasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

| No | Proyek Prioritas  | Target     |            |            |            |            | Total target<br>RPJMN<br>2024 | Instansi Pelaksana        |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
|    |   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                               |                           |
| 7  | Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana-prasarana Hankam di PPKT tidak berpenduduk | 36<br>PPKT | 41<br>PPKT | 49<br>PPKT | 49<br>PPKT | 49<br>PPKT | 49<br>PPKT                    | Sekretariat Tetap<br>BNPP |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

### 3. PENGUKURAN KINERJA

Instrumen pengukuran kinerja Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 menggunakan pendekatan capaian keluaran dan hasil (*output and outcomes based*). Hal ini sejalan dengan kebijakan penganggaran yang menghendaki agar pelaksanaan anggaran dipastikan tidak hanya terlaksana (*sent*) tetapi juga membawa perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat (*delivered*). Pengukuran kinerja menggunakan indikator berbasis capaian hasil yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh masyarakat.

Instrumen pengukuran kinerja pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan bagian dari instrumen evaluasi yang difokuskan pada capaian dan dampak untuk memperjelas makna capaian keluaran dan hasil program dan kegiatan dalam pengelolaan PLBN, PPKT tidak berpenduduk, dan pembangunan Kawasan Perbatasan baik di PKSN maupun Lokpri. Untuk memenuhi prinsip yang transparan dan akuntabel, perencanaan harus disertai dengan indikator kinerja pelaksanaan rencana, sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran dan indikator hasil/manfaat. Indikator keluaran merupakan konsekuensi dari perencanaan program dan akan terus dipantau pelaksanaan dan realisasinya hingga tahun 2024. Sementara evaluasi terhadap capaian hasil/manfaat diperlukan untuk menggambarkan informasi progres serta situasi yang terjadi dan dihadapi di Kawasan Perbatasan berdasarkan indikator dimaksud. Indikator-indikator tersebut diturunkan dari sejumlah variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran strategis dengan fokus pada capaian berupa hasil dan dampak.

Variabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Variabel dalam instrumen evaluasi pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dispesifikan dengan dimensi yang menjadi fokus pada masing-masing lokasi. Variabel yang digunakan didesain sensitif terhadap keragaman konteks dan tuntutan situasi di Kawasan Perbatasan yang berusaha dijawab melalui serangkaian kegiatan yang telah dicanangkan. Spesifikasi beragam konteks dan kondisi di Kawasan Perbatasan menghasilkan klasifikasi Kawasan Perbatasan berdasarkan lokus, yaitu:

- a. Lokpri dan PKS N sebagai fokus pada dimensi “Pembangunan Kawasan”;
- b. Lokasi Titik Keluar-Masuk (*Exit-Entry Point*) yang terdiri dari PLBN, Pos Lintas Batas (PLB), dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, sebagai fokus pada dimensi Lintas Batas Negara”;
- c. Batas Teritorial dan lokasi PPKT yang tidak berpenduduk, sebagai fokus pada dimensi “Batas Wilayah Negara”.

Masing-masing lokasi tersebut dievaluasi berdasarkan sejumlah variabel dan indikator turunannya sesuai intervensi pada lokus bersangkutan. Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan BWN-KP di PKS N, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang dikonsolidasikan ke dalam Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang merupakan indeks pengukuran kinerja capaian hasil (*outcome*) di PKS N.

MATRIKS . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

**MATRIKS KEGIATAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA**

| NO.             | KEGIATAN   | INDIKATOR                            | VOLUME | SATUAN   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI                     | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------|----------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |                                      |        |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3                                    | 4      | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENYELESAIAN DAN<br/>PENEGASAN BATAS WILAYAH<br/>NEGARA</b>                         |                                      |        |          |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Perundingan batas wilayah negara Republik Indonesia (RI)-Malaysia (JIM, Sosek Malindo) | Jumlah perundingan yang dilaksanakan | 5      | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kalbar,<br>Prov. Kaltim,<br>Prov. Kaltara | Kementerian<br>Dalam Negeri                        |
| 2               | Perundingan Batas Wilayah Negara RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (JBC)       | Jumlah perundingan yang dilaksanakan | 4      | Kegiatan | -       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. NTT                                       | Kementerian<br>Dalam Negeri                        |
| 3               | Perundingan Batas Wilayah Negara RI-Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG) (JBC)          | Jumlah perundingan yang dilaksanakan | 4      | Kegiatan | -       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Papua                                     | Kementerian<br>Dalam Negeri                        |
| 4               | Perundingan Batas Wilayah Negara RI-RDTL (SOC)   | Jumlah perundingan yang dilaksanakan | 1      | Kegiatan | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. NTT                                       | Kementerian<br>Luar Negeri                         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI                                      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|--------|---------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |  |        |         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4      | 5       | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 5   | Kesepakatan teknis perundingan batas negara wilayah laut             | Jumlah dokumen kesepakatan teknis perundingan batas negara wilayah laut  | 30     | Dokumen | 4       | 8    | 6      | 6    | 6    | Pusat  | Badan Informasi Geospasial                         |
| 6   | Kesepakatan teknis perundingan batas negara wilayah darat            | Jumlah dokumen kesepakatan teknis perundingan batas negara wilayah darat | 15     | Dokumen | 2       | 4    | 3      | 3    | 3    | Prov. Kalbar,<br>Prov. Kaltim,<br>Prov.<br>Kaltara,<br>Prov. NTT | Badan Informasi Geospasial                         |
| 7   | Pilar <i>Common Border Datum Reference Frame</i> (CBDRF) RI-Malaysia | Jumlah tanda batas negara terukur  | 50     | Unit    | 10      | 10   | 10     | 10   | 10   | Prov. Kalbar,<br>Prov. Kaltim,<br>Prov. Kaltara                  | Badan Informasi Geospasial                         |
| 8   | Pembangunan pilar batas negara RI-RDTL                               | Jumlah tanda batas negara terbangun dan terukur                          | 163    | Unit    | 5       | 70   | 36     | 36   | 16   | Prov. NTT  | Badan Informasi Geospasial                         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOLUME  | SATUAN          | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI                                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|---------|-----------------|---------|-------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |         |                 | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4       | 5               | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
| 9   | Pembangunan pilar batas negara RI-PNG                      | Jumlah tanda batas negara terbangun dan terukur                               | 200     | Unit            | 30      | 50    | 40     | 40   | 40   | Prov. Papua   | Badan Informasi Geospasial                         |
| 10  | Verifikasi Titik Dasar dan Titik Referensi                 | Jumlah Tanda Batas dan Titik Referensi yang terverifikasi                     | 45      | Unit            | 5       | 10    | 10     | 10   | 10   | Pusat   | Badan Informasi Geospasial                         |
| 11  | Pembuatan peta batas negara                                | Luas cakupan peta batas negara  | 1.204,5 | Km <sup>2</sup> | 16      | 438,5 | 250    | 250  | 250  | Pusat   | Badan Informasi Geospasial                         |
| 12  | Identifikasi Tanda Batas negara wilayah darat              | Panjang segmen batas negara wilayah darat yang teridentifikasi pilar batasnya | 250     | Km              | 50      | 50    | 50     | 50   | 50   | Prov. Kalbar,<br>Prov. Kaltim,<br>Prov. NTT,<br>Prov. Papua | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                |
| 13  | Survei identifikasi titik perlintasan Non-PLB dan Non-PLBN | Jumlah titik perlintasan Non-PLB dan Non-PLBN yang teridentifikasi            | 100     | Lokasi          | 20      | 20    | 20     | 20   | 20   | Daerah  | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

| NO.             | KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |       | TARGET |      |        | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI                     | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|--------|--------|---------|-------|--------|------|--------|---|--|
|                 |  |   |        |        | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024   |   |  |
| 1               | 2  | 3   | 4      | 5      | 6       | 7     | 8      | 9    | 10     | 11  | 12   |
| 14              | Kalibrasi/verifikasi/pemeliharaan Pilar Titik Referensi (TR) di PPKT tidak berpenduduk | Jumlah Pilar Referensi di PPKT tidak berpenduduk yang dikalibrasi/diverifikasi/dipelihara | 9      | TR     | 1       | 2     | 2      | 2    | 2      | PPKT  | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                |
| 15              | Pembangunan sempadan dan tanggul abrasi pantai PPKT tidak berpenduduk                  | Jumlah PPKT yang dibangun sempadan dan tanggul abrasi pantai                              | 19     | PPKT   | -       | -     | -      | 9    | 10     | PPKT  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENINGKATAN PERTAHANAN<br/>WILAYAH NEGARA</b>                                       |   |        |        |         |       |        |      |        |   |  |
| 1               | Pembukaan/rintisan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan                                   | Panjang Rintisan/<br>Pembukaan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan                          | 932    | Km     | -       | 128,7 | 57,98  | 375  | 370,28 | Prov. Kalbar,<br>Prov. Kaltim,<br>Prov. Kaltara | Kementerian Pertahanan                             |
| 2               | Perkerasan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan   | Panjang Perkerasan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan                                      | 1662   | Km     | -       | 79,6  | 59,81  | 765  | 761,54 | Prov. Kalbar,<br>Prov. Kaltim,<br>Prov. Kaltara | Kementerian Pertahanan                             |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI                            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|--------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 3   | Asistensi Teknik Perwira Topografi Pengamanan Perbatasan (Asnik Patop Pamtas) | Jumlah kegiatan Asnik Patop Wilayah Kalimantan, Papua, dan NTT | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kalbar, Prov. NTT, Prov. Kaltara dan Prov. Papua | TNI<br>UO TNI AD                                   |
| 4   | Pembekalan Survei dan Pemetaan Satgas Pamtas TNI AD                           | Jumlah kegiatan Pembekalan Surta Satgas Pamtas TNI AD          | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kalbar, Prov. NTT, Prov. Kaltara dan Prov. Papua | TNI<br>UO TNI AD                                   |
| 5   | Pengendalian dan Pengawasan Pamtas Penyangga                                  | Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas Penyangga                        | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Papua  | TNI<br>UO TNI AD                                   |
| 6   | Pengendalian dan Pengawasan Pamtas RI-Malaysia (Kaltara)                      | Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas RI-Malaysia (Kaltara)            | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kaltara  | TNI<br>UO TNI AD                                   |
| 7   | Pengendalian dan Pengawasan Pamtas RI-Malaysia (Kalbar)                       | Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas RI-Malaysia (Kalbar)             | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kalbar   | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|--------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 8   | Pengendalian dan Pengawasan Pamtas RI-RDTL      | Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas RI-RDTL  | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. NTT  | TNI<br>UO TNI AD                                   |
| 9   | Pengendalian dan Pengawasan Pamtas RI-PNG       | Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas RI-PNG   | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Papua  | TNI<br>UO TNI AD                                   |
| 10  | Pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas)  | Jumlah Pos Pamtas yang dibangun  | 43     | Pos    | 13      | 10   | 12     | 4    | 4    | Prov. Kalbar,<br>Prov.<br>Kaltara,<br>Prov. Papua,<br>dan Prov.<br>NTT | TNI/<br>UO TNI AD                                  |
| 11  | Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia | Jumlah Satuan Setingkat Batalyon (SSY) yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kalbar,<br>Prov.<br>Kaltara,<br>Prov. Kaltim                     | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|--------|----------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------|--|
|     |   |  |        |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                             |  |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11                          | 12   |
| 12  | Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-RDTL   | Jumlah Satuan Setingkat Batalyon (SSY) yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL | 5      | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. NTT                   | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 13  | Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-PNG  | Jumlah Satuan Setingkat Batalyon (SSY) yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG  | 5      | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Papua                 | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 14  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air                 | Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air                                       | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Sabang (Pulau Weh)    | TNI/UO TNI AL                                      |
| 15  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Ketahanan Pangan Budi Daya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) | Ketahanan Pangan Budi Daya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA)                       | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Nias                  | TNI/UO TNI AL                                      |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 85 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|--------|----------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------|--|
|     |   |  |        |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                             |  |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11                          | 12   |
| 16  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budi Daya Udang Vaname Tambak Mini skala rumah tangga (Butamira) | Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budi Daya Udang Vaname Tambak Mini skala rumah tangga (Butamira). | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Lampung               | TNI/VO TNI AL                                      |
| 17  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budi Daya Ayam potong dan telur                                  | Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budi Daya Ayam potong dan telur.                                  | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Tarempa               | TNI/VO TNI AL                                      |
| 18  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Sidat  | Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Sidat   | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Cilacap               | TNI/VO TNI AL                                      |
| 19  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Sunu   | Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Sunu  | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Maumere               | TNI/VO TNI AL                                      |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 86 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOLUME | SATUAN   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI                        | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|--------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |        |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 20  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Nila dan Ikan lele | Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Nila dan Ikan lele | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Melonguane                                   | TNI/VO TNI AL                                      |
| 21  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Rumput laut             | Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Rumput laut             | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Nunukan                                      | TNI/VO TNI AL                                      |
| 22  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Rumput laut             | Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Rumput laut             | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Saumlaki                                     | TNI/VO TNI AL                                      |
| 23  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Nila               | Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Nila               | 1      | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Lanal Timika                                       | TNI/VO TNI AL                                      |
| 24  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Pelatihan Budi Daya Udang Vaname                   | Budi Daya Udang Vaname                                    | 10     | Kegiatan | -       | 10   | -      | -    | -    | - Lanal Dumai,<br>- Lanal Tual,<br>- Lanal Tanjung | TNI/VO TNI AL                                      |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

| NO. | KEGIATAN | INDIKATOR | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|----------|-----------|--------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |          |           |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2        | 3         | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
|     |          |           |        |        |         |      |        |      |      | Balai<br>Karimun,<br>- Lantamal<br>XII<br>Pontianak,<br>- Lanal<br>Mataram,<br>- Lanal<br>Ranai,<br>- Lanal<br>Tolitoli,<br>- Koarmada<br>III Sorong,<br>- Lanal<br>Ternate,<br>- Lantamal<br>XIII<br>Tarakan,<br>- Lanal Biak |  |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 88 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|--------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |        |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 25  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air | Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air | 8      | Kegiatan | -       | -    | 8      | -    | -    | - Lanal Tanjung Balai Asahan,<br>- Lantamal II Padang,<br>- Lantamal IV Tanjung Pinang,<br>- Lantamal VII Kupang,<br>- Lantamal VIII Manado,<br>- Lantamal IX Ambon,<br>- Lanal Aru, | TNI/ UO TNI AL                                     |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 89 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR                                   | VOLUME | SATUAN   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|--------|----------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |        |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
|     |  |   |        |          |         |      |        |      |      | - Lantamal<br>X<br>Jayapura   |  |
| 26  | Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air | Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air | 10     | Kegiatan | -       | -    | -      | 10   | -    | - Lanal Sabang,<br>- Lanal Sibolga,<br>- Lanal Bengkulu,<br>- Lanal Batam,<br>- Lanal Tarempa,<br>- Lanal Nunukan,<br>- Lanal Tahuna, | TNI/ UO TNI AL                                     |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

| NO. | KEGIATAN               | INDIKATOR                       | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |                        |                                 |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2                      | 3                               | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
|     |                        |                                 |        |        |         |      |        |      |      | - Lantamal VII Kupang,<br>- Lanal Timika,<br>- Lanal Morotai  |  |
| 27  | Pembangunan Pos TNI AL | Jumlah Pos TNI AL yang dibangun | 74     | Pos    | 14      | 14   | 14     | 16   | 16   | Prov. Aceh,<br>Prov. Sumut,<br>Prov. Sumbar,<br>Prov. Bengkulu,<br>Prov. Riau,<br>Prov. Kepri,<br>Prov. Babel,<br>Prov. Bali,<br>Prov. Sulteng, | TNI AL   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

| NO. | KEGIATAN                                       | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|--------|--------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |  |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
|     |  |  |        |        |         |      |        |      |      | Prov. Sulut,<br>Prov. Sultra,<br>Prov. Kaltim,<br>Prov. Kalbar,<br>Prov. Kalsel,<br>Prov. NTT,<br>Prov. NTB,<br>Prov.<br>Maluku,<br>Prov. Maluku,<br>Prov. Papua,<br>Prov. Papua<br>Barat |  |
| 28  | Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Thailand | Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Thailand | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-Thailand   | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI                      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|--------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |  |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 29  | Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Singapura                                    | Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Singapura      | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-Singapura                     | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 30  | Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-RDTL-Australia                               | Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-RDTL-Australia | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-RDTL-Australia                | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 31  | Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Filipina                                     | Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Filipina       | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-Filipina                      | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 32  | Patroli Terkoordinasi <i>Malacca Straits Sea Patrol</i> (Patkor MSSP) Malsindothei | Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor MSSP Malsindothei                             | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-Singapura-Malaysia - Thailand | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|--------|--------|---------|------|--------|------|------|------------------------------|--|
|     |   |  |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                              |  |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11                           | 12   |
| 33  | Patroli Terkoordinasi Operasi Tindakan Maritim (Optima) Malindo | Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor Operasi Tindakan Maritim (Optima) Malindo | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-Malaysia  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 34  | Patroli Terkoordinasi Malindo                                   | Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor Malindo                                   | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-Malaysia  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 35  | Patroli Terkoordinasi Indindo                                   | Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor India Indonesia (Indindo)                 | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-India     | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 36  | Patroli Terkoordinasi Philindo                                  | Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor Philindo                                  | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-Filipina  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 37  | Patroli Terkoordinasi Ausindo                                   | Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor Ausindo                                   | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut perbatasan RI-Australia | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR                                       | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|--------|--------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |   |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
| 38  | <i>Trilateral Maritime Patrol (TMP)</i><br>Indomalphi | Jumlah kegiatan pelaksanaan<br>TMP Indomalphi   | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut<br>perbatasan<br>RI-Malaysia-<br>Filipina                            | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 39  | <i>Trilateral Air Patrol (TMP)</i><br>Indomalphi      | Jumlah kegiatan pelaksanaan<br>TAP Indomalphi   | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut dan<br>udara<br>perbatasan<br>RI-Malaysia-<br>Filipina               | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 40  | <i>Eyes In The Sky (EIS)</i> Malsindothai             | Jumlah kegiatan pelaksanaan<br>EIS Malsindothai | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Laut dan<br>udara<br>perbatasan<br>RI-Malaysia-<br>Singapura-<br>Thailand | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR                                   | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|--------|--------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
| 41  | Operasi Pengamanan Pulau Terluar<br>(Ops Pamputer) | Jumlah kegiatan<br>pelaksanaan Ops Pamputer | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. NAD<br>- P.Rondo<br>Prov. Sumut<br>- P.Berhala<br>Prov. Riau<br>- P.Nipah<br>- P.Sekatung<br>Prov. NTT<br>- P.Batek<br>- P. Dana<br>Rote<br>Prov.<br>Sulawesi<br>Utara<br>- P. Miangas<br>- P. Marore<br>- P. Marampit<br>- P. Kawaluso | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

| NO. | KEGIATAN | INDIKATOR | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|----------|-----------|--------|--------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |          |           |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2        | 3         | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
|     |          |           |        |        |         |      |        |      |      | - P. Kabaruan<br>Prov. Maluku<br>- P. Wetar<br>- P. Lirang<br>- P. Kisar<br>- P. Leti<br>- P. Masela<br>- P. Selaru<br>- P. Larat<br>- P.<br>Batugoyang<br>- P.<br>Penambulai<br>- P.<br>Metimarang |  |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 97 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI                          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|--------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
|     |  |   |        |        |         |      |        |      |      | Prov. Papua<br>- P. Fani<br>- P. Bras<br>- P.Fanildo |  |
| 42  | Operasi Pengamanan Ambalat   | Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Ambalat                  | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Pulau Ambalat  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 43  | Pengadaan Alutsista Ranpur <i>Infantry Light Strike Vehicle (ILSV)</i> | Jumlah Ranpur yang diadakan untuk satuan TNI di Wil. Perbatasan         | 1      | Paket  | -       | 1    | -      | -    | -    | Prov. Papua  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 44  | Pengadaan Alkom Satgas Kodim Wil. Perbatasan                           | Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Kodim Wil. Perbatasan RI-PNG | 1      | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Papua<br>-Kab. Peg. Bintang                    | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 45  | Pengadaan Alkom Kodal Mabes TNI untuk Wil. Papua                       | Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya untuk Mabes TNI                 | 1      | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Pusat  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|--------|--------|---------|------|--------|------|------|-------------------------------|--|
|     |   |  |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                               |  |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11                            | 12   |
| 46  | Pengadaan Alkom Pamtas Kodam VI/Mulawarman                              | Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Kodam Wil. Perbatasan RI-Malaysia     | 1      | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Kaltara<br>Prov. Kaltim | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 47  | Pengadaan Alkom Pamtas Kodam XII/Tanjungpura                            | Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Kodam Wil. Perbatasan RI-Malaysia     | 1      | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Kalbar                  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 48  | Pengadaan Alkom Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) Kodam VI/Mulawarman | Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Pulau Terluar Wil. Kodam VI/Mlw       | 1      | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Kaltara<br>Prov. Kaltim | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 49  | Pengadaan Alkom Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) Korem 132/Tadulako  | Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Pulau Terluar Wil. Korem 132/Tadulako | 1      | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov.<br>Sulawesi<br>Utara    | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|--------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 50  | Sarana prasarana penguatan kedaulatan udara nasional     | Jumlah sarana prasarana penguatan kedaulatan udara nasional                                   | 1      | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Pusat  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 51  | Renovasi Pos Pulau Terluar                               | Jumlah Pos Pulau Terluar yang direnovasi  | 3      | Pos    | -       | -    | 3      | -    | -    | Prov. NAD<br>- P.Rondo<br>Prov. Sumut<br>- P.Berhala<br>Prov. Riau<br>- P.Nipah  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 52  | Pembangunan Faskes di Saumlaki                           | Jumlah Faskes TNI di Saumlaki   | 1      | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov.<br>Maluku  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 53  | TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Perbatasan Negara | Jumlah kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti di Wil. Perbatasan Negara | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kalbar/<br>Prov.<br>Kaltara/<br>Prov. Kaltim/<br>Prov. NTT/<br>Prov. Papua | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|--------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 54  | Penguatan masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai bagian sistem pertahanan keamanan                      | Jumlah masyarakat yang terlatih bidang pertahanan dan keamanan  | 900    | Orang  | 180     | 180  | 180    | 180  | 180  | Prov. Kalbar,<br>Prov. Kaltim,<br>Prov.<br>Kaltara,<br>Prov. Papua,<br>Prov. NTT | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan          |
| 55  | Identifikasi sarana prasarana ALKOM dan sarana bantu navigasi di PPKT tidak berpenduduk                      | Jumlah sarana prasarana ALKOM dan sarana bantu navigasi di PPKT tidak berpenduduk yang teridentifikasi                              | 49     | PPKT   | -       | -    | 16     | 16   | 17   | 49 PPKT  | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan          |
| 56  | Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk | Jumlah PPKT tidak berpenduduk yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana | 49     | PPKT   | 36      | 41   | 49     | 49   | 49   | 49 PPKT  | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan          |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

| NO.             | KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOLUME  | SATUAN                  | CAPAIAN |      | TARGET |       |       | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|---------|-------------------------|---------|------|--------|-------|-------|--|--|
|                 |  |   |         |                         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023  | 2024  |  |  |
| 1               | 2  | 3   | 4       | 5                       | 6       | 7    | 8      | 9     | 10    | 11   | 12   |
| 57              | Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Operasi Dalam Negeri) | Jumlah Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Operasi Dalam Negeri) yang terlaksana | 941     | Hari Operasi            | 21      | 10   | 180    | 365   | 365   | Prov. Kepri,<br>Prov.<br>Maluku  | Badan<br>Keamanan Laut                             |
| 58              | Operasi Udara Maritim (Operasi Dalam Negeri)                 | Jumlah Operasi Udara Maritim (Operasi Dalam Negeri) yang terlaksana                 | 9.389/8 | Jam Operasi/<br>Operasi | 221     | 8    | 3.056  | 3.056 | 3.056 | Prov. Kepri,<br>Prov.<br>Maluku,<br>Prov. Sulut                                  | Badan<br>Keamanan Laut                             |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENINGKATAN KEAMANAN<br/>DAN KETERTIBAN WILAYAH</b>       |   |         |                         |         |      |        |       |       |  |  |
| 1               | Bhakti Kesehatan Kemhan/TNI di perbatasan                    | Jumlah kegiatan Bhakti Kesehatan Kemhan/TNI   | 2       | Kegiatan                | -       | -    | -      | 1     | 1     | Prov. Kalbar/<br>Prov.<br>Kaltara/<br>Prov. Kaltim/<br>Prov. NTT/<br>Prov. Papua | Kementerian<br>Pertahanan                          |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOLUME | SATUAN   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|--------|----------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |        |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  | 12   |
| 2   | Sosialisasi Bela Negara di perbatasan  | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bela Negara di perbatasan | 5      | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kalbar/<br>Prov. Kaltara/<br>Prov. Kaltim/<br>Prov. NTT/<br>Prov. Papua | Kementerian<br>Pertahanan                          |
| 3   | Kerja sama RI-Malaysia<br><i>Coordinated Operations Control Committee (COCC)</i>                         | Jumlah pertemuan                                      | 5      | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | RI-Malaysia   | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 4   | Kerja sama RI-Singapura<br><i>Indonesia-Singapore Joint Operation and Exercise Subcommittee (ISJOEC)</i> | Jumlah pertemuan                                      | 5      | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | RI-Singapura  | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 5   | Kerja sama RI-Thailand<br><i>Joint Operation and Exercise Sub-Committee (JOESC)</i>                      | Jumlah pertemuan                                      | 5      | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | RI-Thailand   | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

| NO. | KEGIATAN   | INDIKATOR        | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|------------------|--------|--------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------|--|
|     |  |                  |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                             |  |
| 1   | 2  | 3                | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11                          | 12   |
| 6   | Kerja sama RI-Filipina <i>Joint Operation and Exercise Sub-Committee (JOESC) &amp; Indonesia-Philippines Border Committee (ID-PH BC)</i> | Jumlah pertemuan | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | RI-Filipina                 | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 7   | Kerja sama RI-Australia <i>Joint Operation and Exercise Sub-Committee (JOESC)</i>  | Jumlah pertemuan | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | RI-Australia                | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 8   | Kerja sama RI-RDTL <i>Technical Sub-Committee on Border Security (TSC BS)</i>  | Jumlah pertemuan | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | RI-RDTL                     | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 9   | Kerjasama RI-PNG <i>Joint Sub-Committee on Security Matter (JSCSM)</i>   | Jumlah pertemuan | 5      | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | RI-PNG                      | TNI<br>UO Mabes TNI                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOLUME | SATUAN   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|--------|----------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------|--|
|     |   |   |        |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                             |  |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11                          | 12   |
| 10  | Kerja sama Indomalphi <i>Trilateral Maritime Patrol Sub Working Security (TMP SWG)</i>        | Jumlah pertemuan  | 5      | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | RI-MAL-PHIL                 | TNI  |
| 11  | Kerja sama Malsindo-thai <i>Malacca Straits Patrol Joint Coordinating Committee (MSP JCC)</i> | Jumlah pertemuan  | 5      | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | MAL-SIN-RI-THAI             | TNI<br>UO Mabes TNI                                |
| 12  | <i>Joint Task Force on Narcotics</i>  | Jumlah kegiatan <i>Joint Task Force</i> yang dilaksanakan | 4      | Kegiatan | -       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kalimantan,<br>Papua        | Kementerian<br>Keuangan                            |
| 13  | Pembangunan Rumah Khusus Yon A Pelopor di Koya Koso, Jayapura                                 | Jumlah Rumah Khusus T.38 M2 yang terbangun                | 20     | Unit     | -       | -    | 20     | -    | -    | PKSN<br>Jayapura            | Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia         |
| 14  | Pembangunan Mako Polsubsektor Pulau Tiga  | Jumlah Mako Polsubsektor yang terbangun                   | 1      | Unit     | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Pulau<br>Tiga          | Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia         |
| 15  | Pembangunan Mako Polsubsektor Lakmaras  | Jumlah Mako Polsubsektor yang terbangun                   | 1      | Unit     | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec.<br>Lakmanen<br>Selatan | Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia         |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

| NO. | KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|--------|--------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------|--|
|     |   |  |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                             |  |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11                          | 12   |
| 16  | Pembangunan Rumah Dinas Danki                         | Jumlah Rumah Dinas Tipe 70 yang terbangun                                | 1      | Unit   | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Tasifeto Barat         | Kepolisian Negara Republik Indonesia               |
| 17  | Pembangunan Rumah Dinas Wadanki                       | Jumlah Rumah Dinas Tipe 70 yang terbangun                                | 1      | Unit   | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Tasifeto Barat         | Kepolisian Negara Republik Indonesia               |
| 18  | Pembangunan Rumah Dinas Danton                        | Jumlah Rumah Dinas tipe 45 yang terbangun                                | 7      | Unit   | -       | -    | 7      | -    | -    | Kec. Tasifeto Barat         | Kepolisian Negara Republik Indonesia               |
| 19  | Pembangunan Rumah Susun Anggota Kompi 2 Yon A Pelopor | Jumlah Rumah Susun yang terbangun untuk Kompi 2 Yon A Pelopor T.38/32 KK | 1      | Unit   | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Tasifeto Barat         | Kepolisian Negara Republik Indonesia               |
| 20  | Pembangunan Markas Komando Polsek Muara Tami          | Jumlah Mako Polsek Muara Tami T. 555 M2 (2 Lantai) yang terbangun        | 1      | Unit   | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Muara Tami             | Kepolisian Negara Republik Indonesia               |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

| NO. | KEGIATAN                                     | INDIKATOR   | VOLUME | SATUAN | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | PUSAT/<br>DAERAH/<br>LOKASI | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|--------|--------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------|--|
|     |  |   |        |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                             |  |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11                          | 12   |
| 21  | Pembangunan Rumah Susun<br>Polsek Muara Tami | Jumlah Rumah Susun<br>Polsek Muara Tami T. 810<br>M2/2 Lantai/27 KK yang<br>terbangun | 1      | Unit   | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Muara<br>Tami          | Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

**MATRIKS PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA**

| NO.                 | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN | INDIKATOR                              | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)          |
|---------------------|---|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|
|                     |   |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |
| 1                   | 2   | 3                                      | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  |
| <b>I</b>            | <b>PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>                      |  |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>A</b>            | <b>Kabupaten Natuna</b>                             |  |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>1</b>            | <b>Kecamatan Serasan</b>                            |  |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>PLBN Serasan</b> |   |  |      |          |         |      |        |      |      |   |
| 1                   | Pembangunan PLBN Serasan                            | Terbangunnya PLBN                      | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    |      | Kementerian<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Perumahan<br>Rakyat |
| 2                   | Operasional PLBN Serasan                            | Terlaksananya operasional PLBN Serasan | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan                   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

| NO.       | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|
|           |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |
| 1         | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   |
| 3         | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian Keuangan                               |
| <b>II</b> | <b>PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>A</b>  | <b>Kabupaten Bengkayang</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>1</b>  | <b>Kecamatan Jagoi Babang</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
|           | <b>PLBN Jagoi Babang</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1         | Pembangunan PLBN Jagoi Babang   | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    |      | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 2         | Operasional PLBN Jagoi Babang   | Terlaksananya operasional PLBN Jagoi Babang   | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                |
| 3         | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan           | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian Keuangan                               |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

| NO.      | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)          |
|----------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|
|          |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |
| 1        | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  |
|          | dan cukai   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>B</b> | <b>Kabupaten Sintang</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>1</b> | <b>Kecamatan Sintang</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
|          | <b>PLBN Sei Kelik</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| 1        | Pembangunan PLBN Sei Kelik  | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    |      | Kementerian<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Perumahan<br>Rakyat |
| 2        | Operasional PLBN Sei Kelik  | Terlaksananya operasional PLBN Sei Kelik  | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan                   |
| 3        | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian<br>Keuangan                                     |
| <b>C</b> | <b>Kabupaten Sambas</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

| NO.                  | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|----------------------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|
|                      |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |
| 1                    | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   |
| <b>1</b>             | <b>Kecamatan Sajingan Besar</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>PLBN Aruk</b>     |   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1                    | Operasional PLBN Aruk (termasuk zona pendukung)                                       | Terlaksananya operasional PLBN Aruk   | 1    | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan          |
| 2                    | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 5    | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kementerian<br>Keuangan                            |
| 3                    | Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk  | Jumlah terminal barang yang terbangun   | 1    | Unit     | 1       | -    | -      | -    | -    | Kementerian<br>Perhubungan                         |
| <b>D</b>             | <b>Kabupaten Sanggau</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>1</b>             | <b>Kecamatan Entikong</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>PLBN Entikong</b> |   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1                    | Operasional PLBN Entikong (termasuk zona pendukung)                                   | Terlaksananya operasional PLBN Entikong   | 1    | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan          |
| 2                    | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan   | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan   | 5    | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kementerian  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

| NO.        | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|------------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|
|            |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |
| 1          | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   |
|            | pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai   | pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai   |      |          |         |      |        |      |      | Keuangan   |
| <b>E</b>   | <b>Kabupaten Kapuas Hulu</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>1</b>   | <b>Kecamatan Putussibau</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
|            | <b>PLBN Badau</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1          | Operasional PLBN Badau (termasuk zona pendukung)                                      | Terlaksananya operasional PLBN Badau  | 1    | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan          |
| 2          | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 5    | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kementerian<br>Keuangan                            |
| <b>III</b> | <b>PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>A</b>   | <b>Kabupaten Nunukan</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>1</b>   | <b>Kecamatan Sebatik Utara</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
|            | <b>PLBN Sei Nyamuk</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1          | Pembangunan PLBN Sei Nyamuk   | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    |      | Kementerian<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Perumahan  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

| NO.                | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)          |
|--------------------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|
|                    |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |
| 1                  | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  |
|                    |   |   |      |          |         |      |        |      |      | Rakyat  |
| 2                  | Operasional PLBN Sei Nyamuk   | Terlaksananya operasional PLBN Sei Nyamuk   | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan                   |
| 3                  | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian<br>Keuangan                                     |
| <b>2</b>           | <b>Kecamatan Lumbis Ogong</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>PLBN Labang</b> |   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| 1                  | Pembangunan PLBN Labang   | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    | -    | Kementerian<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Perumahan<br>Rakyat |
| 2                  | Operasional PLBN Labang   | Terlaksananya operasional PLBN Labang   | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan                   |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

| NO.                     | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-------------------------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|
|                         |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |
| 1                       | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   |
| 3                       | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian Keuangan                               |
| <b>3</b>                | <b>Kecamatan Krayan</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>PLBN Long Midang</b> |   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1                       | Pembangunan PLBN Long Midang  | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    |      | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 2                       | Operasional PLBN Long Midang  | Terlaksananya operasional PLBN Long Midang  | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                |
| 3                       | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan           | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian Keuangan                               |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

| NO.       | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                    | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)          |
|-----------|--|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|
|           |  |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |
| 1         | 2  | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  |
|           | dan cukai  |  |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>B</b>  | <b>Kabupaten Malinau</b>   |  |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>1</b>  | <b>Kecamatan Krayan Hulu</b>   |  |      |          |         |      |        |      |      |   |
|           | <b>PLBN Long Nawang</b>  |  |      |          |         |      |        |      |      |   |
| 1         | Pembangunan PLBN Long Nawang   | Terbangunnya PLBN  | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    |      | Kementerian<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Perumahan<br>Rakyat |
| 2         | Operasional PLBN Long Nawang   | Terlaksananya operasional PLBN Long Nawang   | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan                   |
| 3         | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanaan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanaan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian<br>Keuangan                                     |
| <b>IV</b> | <b>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>  |  |      |          |         |      |        |      |      |   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

| NO.                | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)          |
|--------------------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|
|                    |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |
| 1                  | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  |
| <b>A</b>           | <b>Kabupaten Kupang</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>1</b>           | <b>Kecamatan Amfoang Timur</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>PLBN Oepoli</b> |   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| 1                  | Pembangunan PLBN Oepoli   | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    |      | Kementerian<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Perumahan<br>Rakyat |
| 2                  | Operasional PLBN Oepoli   | Terlaksananya operasional PLBN Oepoli   | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan                   |
| 3                  | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian<br>Keuangan                                     |
| <b>B</b>           | <b>Kabupaten Timor Tengah Utara</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>1</b>           | <b>Kecamatan Bikomi Utara</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>PLBN Napan</b>  |   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

| NO.              | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)          |
|------------------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|
|                  |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |
| 1                | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11  |
| 1                | Pembangunan PLBN Napan  | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | -       | 1    | -      | -    |      | Kementerian<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Perumahan<br>Rakyat |
| 2                | Operasional PLBN Napan  | Terlaksananya operasional PLBN Napan  | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan                   |
| 3                | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kementerian<br>Keuangan                                     |
| <b>2</b>         | <b>Kecamatan Insana Utara</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| <b>PLBN Wini</b> |   |   |      |          |         |      |        |      |      |   |
| 1                | Operasional PLBN Wini (termasuk zona pendukung)                                       | Terlaksananya operasional PLBN Wini   | 1    | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan                   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

| NO.                   | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|
|                       |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |
| 1                     | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   |
| 2                     | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 5    | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kementerian Keuangan                               |
| <b>3</b>              | <b>Kecamatan Tasifeto Timor</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>PLBN Motaain</b>   |   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1                     | Operasional PLBN Motaain (termasuk zona pendukung)                                    | Terlaksananya operasional PLBN Motaain  | 1    | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                |
| 2                     | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 5    | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kementerian Keuangan                               |
| <b>C</b>              | <b>Kabupaten Malaka</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>1</b>              | <b>Kecamatan Kobalima Timur</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>PLBN Motamasin</b> |   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1                     | Operasional PLBN Motamasin (termasuk zona pendukung)                                  | Terlaksananya operasional PLBN Motamasin  | 1    | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional Pengelola                           |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

| NO.       | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|
|           |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |
| 1         | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   |
|           |   |   |      |          |         |      |        |      |      | Perbatasan   |
| 2         | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 5    | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kementerian Keuangan                               |
| <b>VI</b> | <b>PROVINSI PAPUA</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>A</b>  | <b>Kabupaten Merauke</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>1</b>  | <b>Distrik Sota</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
|           | <b>PLBN Sota</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1         | Pembangunan PLBN Sota   | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | 1       | -    | -      | -    | -    | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 2         | Operasional PLBN Sota   | Terlaksananya operasional PLBN Sota   | 1    | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

| NO.                  | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|----------------------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|
|                      |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |
| 1                    | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   |
| 3                    | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 5    | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kementerian Keuangan                               |
| <b>B</b>             | <b>Kabupaten Boven Digoel</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>1</b>             | <b>Distrik Ninati</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>PLBN Yetetkun</b> |   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1                    | Pembangunan PLBN Yetetkun   | Terbangunnya PLBN   | 1    | Unit     | 1       | -    | -      | -    | -    | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 2                    | Operasional PLBN Yetetkun   | Terlaksananya operasional PLBN Yetetkun   | 1    | Kegiatan | -       | -    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                |
| 3                    | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan   | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan   | 3    | Paket    | -       | -    | 1      | 1    | 1    | Kementerian  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

| NO.      | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/<br>KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN                                   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|----------|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|
|          |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |
| 1        | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 11   |
|          | pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai   | pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai   |      |          |         |      |        |      |      | Keuangan   |
| <b>C</b> | <b>Kota Jayapura</b>  |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| <b>1</b> | <b>Distrik Muara Tami</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
|          | <b>PLBN Skouw</b>   |   |      |          |         |      |        |      |      |  |
| 1        | Operasional PLBN Skouw (termasuk zona pendukung)                                      | Terlaksananya operasional PLBN Skouw  | 1    | Kegiatan | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Badan Nasional<br>Pengelola<br>Perbatasan          |
| 2        | Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai | 5    | Paket    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kementerian<br>Keuangan                            |
| 3        | Pembangunan Terminal Barang Internasional Skouw                                       | Jumlah terminal barang yang terbangun   | 1    | Unit     | -       | -    | 1      | -    | -    | Kementerian<br>Perhubungan                         |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 121 -

**MATRIKS KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                       |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|-------------|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |             |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12          | 13   |
| <b>I</b>        | <b>PROVINSI ACEH</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |             |  |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN<br/>PERBATASAN NEGARA</b>  |   |      |       |         |      |        |      |      |             |  |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis<br>Peninjauan Kembali Kawasan<br>Perbatasan Negara di Provinsi<br>Aceh dan Provinsi Sumatera<br>Utara | Jumlah Materi Teknis<br>Kawasan Strategis Nasional                  | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | Prov. Aceh  | Kementerian<br>Agraria dan Tata<br>Ruang/Badan<br>Pertanahan<br>Nasional |
| 2               | Fasilitasi Legislasi Rancangan<br>Peraturan Presiden Kawasan<br>Perbatasan Negara Sabang                                       | Jumlah Rancangan<br>Peraturan Presiden<br>Kawasan Perbatasan Negara | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | PKSN Sabang | Kementerian<br>Agraria dan Tata<br>Ruang/Badan<br>Pertanahan<br>Nasional |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR                                      | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                              | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|---|--|------|------------|---------|------|--------|------|------|-------------------------------------|--|
|                 |   |  |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                     |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                  | 13   |
| 3               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Lamreh, Kuala Langsa | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara | 2    | Paket      | -       | -    | 2      | -    | -    | Kec. Masjid Raya, Kec. Langsa Barat | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>           |  |      |            |         |      |        |      |      |                                     |  |
| 1               | Pembangunan Sentra IKM Bordir   | Jumlah Sentra IKM Bordir yang terbangun        | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Aceh Besar                     | Kementerian Perindustrian                                    |
| 2               | Bimbingan teknis diversifikasi produk olahan rotan                      | Jumlah bimbingan teknis yang terlaksana        | 15   | IKM        | -       | 15   | -      | -    | -    | Kab. Aceh Besar                     | Kementerian Perindustrian                                    |
| 3               | Bimbingan teknis kerajinan bili (bemban)                                | Jumlah bimbingan teknis yang terlaksana        | 22   | IKM        | -       | 22   | -      | -    | -    | Kab. Aceh Besar                     | Kementerian Perindustrian                                    |
| 4               | Revitalisasi Sentra IKM   | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi          | 2    | Sentra IKM | -       | 2    | -      | -    | -    | Kota Sabang, Kota Langsa            | Kementerian Perindustrian                                    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.              | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|--|---|------|-------------------|---------|------|--------|------|------|------------------------------|---|
|     |  |   |      |                   | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                              |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5                 | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                           | 13  |
| 5   | Peningkatan efektif pengawasan barang beredar dan jasa               | Jumlah kegiatan pengawasan barang yang beredar sesuai ketentuan SNI, manual kartu garansi dan label | 1    | Kegiatan          | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukajaya)  | Kementerian Perdagangan   |
| 6   | Dukungan sarana ekonomi kreatif                                      | Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi kreatif  | 1    | Kegiatan          | 1       | -    | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya) | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 7   | Peningkatan kualitas amenities dan atraksi pada destinasi pariwisata | Meningkatnya kualitas amenities dan atraksi pada destinasi pariwisata                               | 1    | Kegiatan          | 1       | -    | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukajaya)  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 8   | SKPT Sabang yang mandiri   | Tingkat (skala) kemandirian SKPT Sabang   | 4    | Skala Kemandirian | 3       | 3    | 3      | 4    | 4    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya) | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL.  | SAT. | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | LOKASI                                      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|--|-------|------|---------|-------|--------|------|------|---|---|
|                 |  |  |       |      | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1               | 2  | 3  | 4     | 5    | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 9               | Pengembangan Desa Digital (P3PD)   | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan desa digital                           | 2     | Desa | -       | -     | -      | 1    | 1    | Kec. Mesjid Raya                            | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>                                 |  |       |      |         |       |        |      |      |   |   |
| 1               | Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ <i>Lastmile</i> ) | Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika | 1     | Unit | -       | -     | -      | -    | 1    | PKSN Sabang                                 | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 2               | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Pria Laot-Air Terjun                       | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan   | 0,928 | Km   | -       | 0,928 | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya)                | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 3               | Pengadaan sarana transportasi darat  | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia                                       | 2     | Unit | -       | 2     | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya) | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR                            | VOL.  | SAT. | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | LOKASI                      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|--------------------------------------|-------|------|---------|-------|--------|------|------|-----------------------------|---|
|     |   |                                      |       |      | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |                             |   |
| 1   | 2   | 3                                    | 4     | 5    | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 12                          | 13  |
| 4   | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Meunasah-Keramat                  | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan | 0,44  | Km   | -       | 0,44  | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukajaya) | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 5   | Rehabilitasi/peningkatan Terminal Langsa                                      | Peningkatan layanan terminal tipe A  | 1     | Unit | -       | -     | -      | 1    | -    | Kec. Langsa Barat           | Kementerian Perhubungan   |
| 6   | Digitalisasi Terminal Langsa  | Peningkatan layanan terminal tipe A  | 1     | Unit | -       | -     | -      | -    | 1    | Kec. Langsa Barat           | Kementerian Perhubungan   |
| 7   | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Sp. Nasional-GP. Durung           | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan | 1,75  | Km   | -       | 1,75  | -      | -    | -    | Kec. Mesjid Raya            | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 8   | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Sp. Nasional-Perumahan Ujung Bate | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan | 0,72  | Km   | -       | 0,72  | -      | -    | -    | Kec. Mesjid Raya            | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 9   | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Gp. Simpang Lhee-Gp. Seuriget     | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan | 1,068 | Km   | -       | 1,068 | -      | -    | -    | Kec. Langsa Barat           | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                    | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                         |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 10              | Pengadaan sarana transportasi darat  | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia                                  | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Masjid Raya,<br>Kec. Langsa Barat    | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 11              | Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 <i>Gross Tonnage</i> (GT) dan/atau maksimal kapasitas 25 orang | Tersedianya sarana transportasi perairan  | 1    | unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Langsa Barat                         | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa  | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 8    | Unit  | -       | -    | 2      | 3    | 3    | Prov. Aceh                                | Kementerian<br>Dalam Negeri  |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah  | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 15   | Paket | 3       | 3    | 3      | 3    | 3    | Kab. Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Langsa | Kementerian<br>Dalam Negeri  |
| 3               | Bantuan Sosial Pemerintah  | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Langsa | Kementerian Sosial   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 4   | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga             | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan                              | 10   | Penyalur | -       | 2    | 2      | 2    | 4    | PKSN Sabang  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral               |
| 5   | Penyediaan konverter kit BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan | Jumlah konverter kit BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan yang difasilitasi | 50   | Unit     | -       | -    | -      | -    | 50   | PKSN Sabang  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral               |
| 6   | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD                       | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi                            | 89   | Ruang    | -       | 34   | 17     | 18   | 20   | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya, Kec. Langsa Barat | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 7   | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD                      | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi                     | 20   | Ruang    | -       | 3    | 5      | 6    | 6    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Langsa Barat, Kec. Mesjid Raya | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 8   | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMP                      | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi                            | 49   | Ruang    | -       | 34   | 5      | 6    | 4    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya, Kec. Langsa Barat | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 9   | Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMP           | Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi | 7    | Ruang | -       | 1    | 1      | 2    | 3    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya                    | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 10  | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMP           | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi | 13   | Ruang | -       | 2    | 3      | 4    | 4    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Langsa Barat, Kec. Mesjid Raya | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 11  | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK        | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi        | 22   | Ruang | -       | 8    | 4      | 5    | 5    | PKSN Sabang (Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya, Kec. Langsa Barat                 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 12  | Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMA/SMK | Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi | 11   | Ruang | -       | 1    | 4      | 4    | 2    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya, Kec. Langsa Barat | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 13  | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMA/SMK        | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi       | 5    | Ruang | -       | 1    | -      | 3    | 1    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya                    | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 14  | Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan            | Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia           | 2    | Paket | -       | 2    | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya)                                      | Kementerian Kesehatan                                    |
| 15  | Penyediaan alat kesehatan                            | Jumlah alat kesehatan yang tersedia                           | 2    | Paket | -       | 2    | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya)                                      | Kementerian Kesehatan                                    |
| 16  | Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK | Jumlah IPAL skala permukiman kombinasi MCK yang terbangun     | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya)   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          |
| 17  | Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah | Jumlah jaringan distribusi dan sambungan rumah yang terbangun | 810  | SR    | -       | 510  | -      | 300  | -    | PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Masjid Raya, Kec. Langsa Barat | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          |
| 18  | Pembangunan/relokasi Puskesmas Rawat Inap            | Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dibangun/direlokasi          | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Mesjid Raya   | Kementerian Kesehatan                                    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                       |
|-----------------|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|                 |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                     | 13   |
| 19              | Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya   | Jumlah rumah baru secara swadaya di daerah afirmasi yang terbangun | 475  | Unit  | -       | 275  | -      | -    | 200  | Kec. Masjid Raya,<br>Kec. Langsa Barat | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat                 |
| 20              | Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK          | Jumlah IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK yang terbangun          | 6    | Unit  | -       | 3    | -      | -    | 3    | Kec. Masjid Raya,<br>Kec. Langsa Barat | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat                 |
| 21              | Pembangunan SPAM (Desa Pusung)  | Jumlah SPAM yang terbangun   | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Langsa Barat                      | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat                 |
| <b>II</b>       | <b>PROVINSI SUMATERA UTARA</b>  |  |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>   |  |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis PK Kawasan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional                    | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | Prov. Sumatera Utara                   | Kementerian<br>Agraria dan Tata<br>Ruang/Badan<br>Pertanahan<br>Nasional |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                       |
|-----------------|---|--|------|------------|---------|------|--------|------|------|------------------------------|--|
|                 |   |  |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                              |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                           | 13   |
| 2               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara di Kota Medan, Kuala Tanjung | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara   | 2    | Paket      | -       | -    | 1      | 1    | -    | PKSN Medan,<br>Kec. Sei Suka | Kementerian<br>Agraria dan Tata<br>Ruang/Badan<br>Pertanahan<br>Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>                   |  |      |            |         |      |        |      |      |                              |  |
| 1               | Revitalisasi Sentra IKM   | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi            | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Serdang Bedagai         | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 2               | Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) melalui bimtek anyaman pandan                   | Jumlah bimtek anyaman pandan WUB yang terlaksana | 25   | IKM        | -       | 25   | -      | -    | -    | Kab. Serdang Bedagai         | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 3               | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat   | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi | 1    | Unit       | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Tanjung Beringin        | Kementerian<br>Perdagangan   |
| 4               | Pelatihan kewirausahaan   | Jumlah pelatihan kewirausahaan                   | 60   | Orang      | -       | -    | -      | -    | 60   | Kec. Tanjung Beringin        | Kementerian<br>Koperasi dan<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah               |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                            | VOL.   | SAT. | CAPAIAN |        | TARGET |      |      | LOKASI                | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------|------|---------|--------|--------|------|------|-----------------------|---|
|                 |  |                                      |        |      | 2020    | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |                       |   |
| 1               | 2  | 3                                    | 4      | 5    | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 12                    | 13  |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>   |                                      |        |      |         |        |        |      |      |                       |   |
| 1               | Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Sp. 3 Desa Simodong-Sp. 3 Pekan Sabtu                          | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan | 1,1    | Km   | -       | 1,1    | -      | -    | -    | Kec. Sei Suka         | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 2               | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Dusun III Desa Tebing Tinggi                                   | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan | 0,8    | Km   | -       | 0,8    | -      | -    | -    | Kec. Tanjung Beringin | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 3               | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Dusun IV Kp. Lalang-Mangga Dua Pasar Besar Nagur               | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan | 1      | Km   | -       | 1      | -      | -    | -    | Kec. Tanjung Beringin | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 4               | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Dusun V Penggatalan-Dusun IV Kampung Baru Desa Pematang Cermai | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan | 1,2965 | Km   | -       | 1,2965 | -      | -    | -    | Kec. Tanjung Beringin | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--------------------------------------|---|
|             |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                      |   |
| 1           | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                   | 13  |
| 5           | Pengadaan sarana transportasi darat            | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia                                  | 5    | Unit  | -       | 5    | -      | -    | -    | Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| <b>KP 4</b> | <b>PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR</b> |   |      |       |         |      |        |      |      |                                      |   |
| 1           | Rehabilitasi bangunan kantor desa              | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 5    | Unit  | -       | -    | 1      | 2    | 2    | Prov. Sumatera Utara                 | Kementerian Dalam Negeri  |
| 2           | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah  | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 10   | Paket | 2       | 2    | 2      | 2    | 2    | Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara | Kementerian Dalam Negeri  |
| 3           | Bantuan Sosial Pemerintah                      | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara | Kementerian Sosial  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--------------------------------------|--|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                      |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                   | 13   |
| 4   | Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan | Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun     | 1    | Unit     | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Tanjung Beringin                | Kementerian Dalam Negeri                                 |
| 5   | Pembinaan upaya kesehatan dasar            | Terlaksananya pembinaan upaya kesehatan dasar           | 1    | Kegiatan | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Tanjung Beringin                | Kementerian Kesehatan                                    |
| 6   | Pelayanan kefarmasian                      | Jumlah pelayanan kefarmasian                            | 1    | Paket    | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Tanjung Beringin                | Kementerian Kesehatan                                    |
| 7   | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD    | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi        | 40   | Ruang    | -       | 7    | 11     | 11   | 11   | Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 8   | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD   | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi | 12   | Ruang    | -       | -    | 3      | 4    | 5    | Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 9   | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMP   | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi        | 36   | Ruang    | -       | 6    | 10     | 10   | 10   | Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--------------------------------------|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                      |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                   | 13   |
| 10  | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMP            | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi   | 12   | Ruang | -       | -    | 4      | 4    | 4    | Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 11  | Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMP      | Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi   | 9    | Ruang | -       | -    | 2      | 3    | 4    | Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 12  | Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMA/SMK        | Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi   | 7    | Ruang | -       | -    | 2      | 2    | 3    | Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 13  | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA             | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi          | 5    | Ruang | -       | -    | 1      | 2    | 2    | Kec. Sei Suka                        | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 14  | Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK | Jumlah IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK yang terbangun | 5    | Unit  | -       | 5    | -      | -    | -    | Kec. Tanjung Beringin                | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGLATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                     | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------------------------|--|
|             |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                            |  |
| 1           | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                         | 13   |
| 15          | Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih                              | Jumlah jaringan distribusi dan sambungan rumah yang tersedia  | 320  | SR    | -       | 320  | -      | -    | -    | Kec. Tanjung Beringin      | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat              |
| 16          | Pembangunan baru rumah secara swadaya  | Jumlah rumah secara swadaya yang dibangun                     | 124  | Unit  | -       | 124  | -      | -    | -    | Kec. Sei Suka              | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat              |
| <b>III</b>  | <b>PROVINSI RIAU</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |                            |  |
| <b>KP 1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>  |   |      |       |         |      |        |      |      |                            |  |
| 1           | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Bengkalis, Dumai                          | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara                | 2    | Paket | -       | 1    | 1      | -    | -    | PKSN Bengkalis, PKSN Dumai | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2           | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Bengkalis, Dumai | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara | 2    | Paket | -       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Bengkalis, PKSN Dumai | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----------------|---|--|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|                 |   |  |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 3               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Kedabu | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara   | 4    | Paket      | -       | -    | -      | -    | 4    | Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Rupert Utara, Kec. Rangsang Pesisir | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional                    |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>   |  |      |            |         |      |        |      |      |  |   |
| 1               | Revitalisasi Sentra IKM Sagu  | Jumlah Sentra IKM sagu yang direvitalisasi   | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Kep. Meranti  | Kementerian Perindustrian   |
| 2               | Pemanfaatan bahan baku/limbah dari industri besar dalam pengolahan ampas                              | Pemanfaatan bahan baku/limbah dari industri besar dalam pengolahan ampas yang terlaksana | 1    | IKM        | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Kep. Meranti  | Kementerian Perindustrian   |
| 3               | Pembangunan dermaga wisata  | Jumlah dermaga wisata yang terbangun   | 1    | Unit       | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Bengkalis (Kec. Bantan)   | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|---|--|------|------|---------|------|--------|------|------|------------------------------|---|
|     |   |  |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                              |   |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                           | 13  |
| 4   | Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (yacht)           | Jumlah titik labuh kapal yang terbangun                    | 1    | Unit | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Bengkalis (Kec. Bantan) | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 5   | BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes                      | 2    | Desa | -       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Bengkalis               | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi               |
| 6   | Pengembangan Desa Digital (P3PD)                              | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital | 2    | Desa | -       | -    | -      | 1    | 1    | PKSN Bengkalis               | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi               |
| 7   | Penyediaan Kapal <5 GT, alat tangkap, dan sarana pendukung    | Jumlah kapal dan alat tangkap yang tersedia                | 11   | Unit | -       | -    | -      | -    | 11   | Kec. Bandar Laksamana        | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |
| 8   | Pengadaan Kapal Motor 5 GT                                    | Jumlah Kapal Motor 5 GT yang tersedia                      | 40   | Unit | -       | -    | -      | -    | 40   | Kec. Rukat Utara, Kec. Rukat | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 9   | Pembangunan dermaga apung                           | Jumlah dermaga apung yang terbangun                           | 1    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Rupert  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 10  | Pembangunan pengaman sabuk pantai                   | Jumlah pengaman sabuk pantai yang terbangun                   | 2    | Lokasi   | -       | -    | -      | -    | 2    | Kec. Rupert  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 11  | Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap   | Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia   | 165  | Paket    | -       | -    | -      | -    | 165  | Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir, Kec. Rangsang | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 12  | Penyediaan sarana dan prasarana budi daya perikanan | Jumlah sarana dan prasarana budi daya perikanan yang tersedia | 170  | Paket    | -       | -    | -      | -    | 170  | Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir, Kec. Rangsang | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 13  | Pengadaan Keramba Jaring Apung                      | Jumlah Keramba Jaring Apung yang tersedia                     | 104  | Kelompok | -       | -    | -      | -    | 104  | Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir, Kec. Rangsang | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)         |
|-----------------|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                      | 13   |
| 14              | Pengadaan Kapal Patroli perbatasan/pengawas perikanan  | Jumlah Kapal Patroli perbatasan yang tersedia        | 3    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 3    | Kec. Rangsang Pesisir,<br>Kec. Rangsang | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan                   |
| 15              | Pembangunan Pasar Rakyat Non-Prototipe                 | Jumlah Pasar Rakyat Non-Prototipe yang dibangun      | 1    | Unit  | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Sinaboi                            | Kementerian<br>Perdagangan                                 |
| 16              | Pembangunan/revitalisasi Sentra IKM kopi               | Jumlah Sentra IKM kopi yang terbangun/direvitalisasi | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Rangsang Pesisir                   | Kementerian<br>Perindustrian                               |
| 17              | Pelatihan kewirausahaan                                | Jumlah pelatihan kewirausahaan yang terlaksana       | 120  | Orang | -       | -    | -      | -    | 120  | Kec. Tasik Putri Puyu                   | Kementerian<br>Koperasi dan<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b> |  |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih        | Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun        | 3    | Paket | -       | -    | 1      | 1    | 1    | PKSN Bengkalis<br>(Kec. Bengkalis)      | Kementerian<br>Perhubungan                                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|-------------------|---|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13  |
| 2   | Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ <i>Lastmile</i> )               | Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Bengkalis    | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 3   | Pembangunan pelabuhan penyeberangan Dakal  | Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun  | 3    | Paket | -       | -    | 1      | 1    | 1    | Kec. Pulau Merbau | Kementerian Perhubungan   |
| 4   | Pengadaan sarana transportasi darat  | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia                                       | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Rupal Utara  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 5   | Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang Pengadaan sarana transportasi darat | Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) yang terbangun                                  | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Rupal Utara  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 6   | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Sudirman   | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan   | 0,8  | Km    | -       | 0,8  | -      | -    | -    | Kec. Pulau Merbau | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.   | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|---|-------|--------|---------|-------|--------|------|------|---|---|
|                 |  |   |       |        | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1               | 2  | 3   | 4     | 5      | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 7               | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Pelabuhan        | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan  | 0,94  | Km     | -       | 0,94  | -      | -    | -    | Kec. Pulau Merbau                                       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 8               | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Jl. Perkebunan   | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan  | 2,53  | Km     | -       | 2,53  | -      | -    | -    | Kec. Bangko   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 9               | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Jl. Abdullah Ali | Panjang ruas jalan yang ditingkatkan  | 1,037 | Km     | -       | 1,037 | -      | -    | -    | Kec. Medang Kampai                                      | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 10              | Penyediaan Titik Lokasi dan pembangunan BTS                  | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir | 4     | Lokasi | -       | 4     | -      | -    | -    | Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Rumat Utara, Kec. Rangsang | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b>       |   |       |        |         |       |        |      |      |   |   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 1   | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah      | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 20   | Paket    | 4       | 4    | 4      | 4    | 4    | Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Meranti, Kota Dumai | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 2   | Bantuan Sosial Pemerintah                          | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %        | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Meranti, Kota Dumai | Kementerian Sosial                                 |
| 3   | Peningkatan Titik Penyalur program BBM Satu Harga  | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan                                  | 10   | Penyalur | -       | 2    | 2      | 2    | 4    | PKSN Bengkalis  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 4   | Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan | Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi     | 50   | Unit     | 10      | 10   | 10     | 10   | 10   | PKSN Bengkalis  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 5   | Pembangunan kantor kecamatan                       | Jumlah kantor kecamatan yang dibangun   | 1    | Unit     | -       | -    | -      | 1    | -    | PKSN Bengkalis (Kec. Bantan)                                    | Kementerian Dalam Negeri                           |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 6   | Peningkatan puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap | Jumlah puskesmas yang ditingkatkan                      | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Bengkalis (Kec. Bengkalis)   | Kementerian Kesehatan                                    |
| 7   | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD            | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi        | 397  | Ruang | -       | 114  | 89     | 94   | 100  | PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis) Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupert Utara, Kec. Rupert, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 8   | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD           | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi | 100  | Ruang | -       | 9    | 27     | 31   | 33   | PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis), Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai,  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 145 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
|     |   |   |      |       |         |      |        |      |      | Kec. Sungai Sembilan,<br>Kec. Bandar<br>Laksamana, Kec.<br>Rupat Utara, Kec.<br>Rupat, Kec. P.<br>Merbau, Kec. Tasik<br>Putri Puyu, Kec.<br>Rangsang Barat, Kec.<br>Rangsang Pesisir, Kec.<br>Rangsang  |   |
| 9   | Pembangunan/rehabilitasi<br>ruang kelas SMP | Jumlah ruang kelas yang<br>terbangun/direhabilitasi | 205  | Ruang | -       | 60   | 44     | 50   | 51   | PKSN Bengkalis (Kec.<br>Bantan, Kec.<br>Bengkalis), Kec. Pasir<br>Limau Kapas, Kec.<br>Bangko, Kec. Sinaboi,<br>Kec. Medang Kampai,<br>Kec. Sungai Sembilan,<br>Kec. Bandar<br>Laksamana, Kec.<br>Rupat Utara, Kec.<br>Rupat, Kec. P.<br>Merbau, Kec. Tasik | Kementerian<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan, Riset,<br>dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 146 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
|     |  |  |      |       |         |      |        |      |      | Putri Puyu, Kec.<br>Rangsang, Kec.<br>Rangsang<br>Barat, Kec. Rangsang<br>Pesisir   |   |
| 10  | Pembangunan/rehabilitasi<br>perpustakaan SMP | Jumlah ruang perpustakaan<br>yang terbangun/direhabilitasi | 71   | Ruang | -       | 5    | 17     | 24   | 25   | PKSN Bengkalis (Kec.<br>Bantan, Kec.<br>Bengkalis), Kec. Pasir<br>Limau Kapas, Kec.<br>Bangko, Kec. Sinaboi,<br>Kec. Medang Kampai,<br>Kec. Sungai Sembilan,<br>Kec. Bandar<br>Laksamana, Kec. Rupal<br>Utara, Kec. Rupal, Kec.<br>P. Merbau, Kec. Tasik<br>Putri Puyu, Kec.<br>Rangsang, Kec.<br>Rangsang<br>Barat, Kec. Rangsang<br>Pesisir | Kementerian<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan, Riset,<br>dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 11  | Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMP | Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi | 35   | Ruang | -       | 1    | 11     | 12   | 11   | PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis) Kec. Pasir Limau kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Medang Kampai, Kec. P. Merbau, Kec. Rangsang Pesisir  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 12  | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK    | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi        | 68   | Ruang | -       | -    | 19     | 20   | 29   | PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis), Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Rupal Utara, Kec. Rupal, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 148 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 13  | Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMA/SMK | Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi | 127  | Ruang | -       | 17   | 32     | 38   | 40   | PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis), Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupert Utara, Kec. Rupert, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 14  | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMA/SMK | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi | 44   | Ruang | -       | 9    | 10     | 12   | 13   | Kec. Rupert, Kec. Rupert Utara, Kec. P. Merbau, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 149 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                                  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                           | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------------------------------|--|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                               | 13   |
| 15  | Rehabilitasi bangunan kantor desa  | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi     | 2    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | 1    | Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 16  | Peningkatan pelayanan kesehatan di Kawasan Perbatasan                                      | Jumlah layanan kesehatan yang ditingkatkan | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Bandar Laksamana            | Kementerian Kesehatan                              |
| 17  | Pembangunan Puskesmas Rawat Inap (relokasi)  | Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang terbangun | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Rupert                      | Kementerian Kesehatan                              |
| 18  | Pengadaan ambulans darat   | Jumlah ambulans darat yang tersedia        | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Tasik Putri Puyu            | Kementerian Kesehatan                              |
| 19  | Pengadaan alat kesehatan Puskesmas   | Tersedianya alat kesehatan Puskesmas       | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Rangsang Barat              | Kementerian Kesehatan                              |
| 20  | Pengadaan kendaraan Puskesmas Keliling   | Tersedianya Puskesmas Keliling             | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Rangsang Barat              | Kementerian Kesehatan                              |
| 21  | Pengadaan sepeda motor untuk tenaga kesehatan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan | Tersedianya sepeda motor tenaga kesehatan  | 10   | Unit  | -       | -    | -      | -    | 10   | Kec. Rangsang Barat              | Kementerian Kesehatan                              |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI              | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|------|---------|------|--------|------|------|---------------------|--|
|     |   |  |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                     |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                  | 13   |
| 22  | Pembangunan Rumah Dinas medis dan Paramedis   | Jumlah Rumah Dinas medis dan Paramedis yang terbangun                          | 4    | Unit | -       | -    | -      | -    | 4    | Kec. Rangsang Barat | Kementerian Kesehatan                              |
| 23  | Pengadaan ambulans darat  | Tersedianya ambulans darat   | 1    | Unit | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Rangsang Barat | Kementerian Kesehatan                              |
| 24  | Pembangunan Rumah Sakit Pratama   | Jumlah Rumah Sakit Pratama yang terbangun                                      | 1    | Unit | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Rangsang       | Kementerian Kesehatan                              |
| 25  | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga   | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan                                 | 1    | Unit | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Medang Kampai  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 26  | Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi | Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya                             | 101  | Unit | -       | 101  | -      | -    | -    | Kec. Bangko         | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 27  | Pembangunan sumur dalam terlindungi   | Jumlah sambungan rumah yang terlayani dari pembangunan sumur dalam terlindungi | 85   | SR   | -       | 85   | -      | -    | -    | Kec. Medang Kampai  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|                 |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1               | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| <b>IV</b>       | <b>PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>   |  |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN<br/>PERBATASAN NEGARA</b>  |  |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Serasan, Tanjung Balai-Karimun, Letung, Tanjung Uban, Batam | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara                       | 5    | Paket | 1       | -    | 2      | -    | 2    | PKSN Batam, Kec. Karimun, Kec. Jemaja, Kec. Serasan, Kec. Bintan Utara | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2               | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Serasan, Ranai, Batam              | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara        | 3    | Paket | 1       | 1    | 1      | -    | -    | PKSN Ranai, PKSN Batam, Kec. Serasan                                   | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>  |  |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| 1               | Pelatihan pengembangan tenun di Pulau Ngenang  | Jumlah pelatihan pengembangan tenun di Pulau Ngenang yang terlaksana | 20   | IKM   | -       | 20   | -      | -    | -    | Kota Batam   | Kementerian Perindustrian                                    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                         |
|-----|--|--|------|------------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |  |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 2   | Revitalisasi Sentra IKM pangan                                     | Jumlah Sentra IKM pangan yang direvitalisasi               | 3    | Sentra IKM | -       | 3    | -      | -    | -    | Kab. Natuna,<br>Kab. Bintan,<br>Kab. Kep. Anambas | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 3   | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa           | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes                      | 5    | BUMDes     | -       | -    | -      | -    | 5    | Kab. Natuna                                       | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 4   | Percepatan pembangunan Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark | Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark                | 1    | Lokasi     | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Ranai  | Kemenko Marves   |
| 5   | Pengembangan Desa Digital (P3PD)                                   | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital | 2    | Desa       | -       | -    | -      | 1    | 1    | PKSN Ranai  | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 6   | BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan Desa      | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes                      | 2    | Desa       | -       | -    | -      | 1    | 1    | PKSN Ranai  | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                                      | VOL. | SAT.              | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|-------------------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |  |      |                   | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5                 | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 7   | SKPT Natuna yang mandiri   | Tingkat Skala kemandirian SKPT Natuna          | 5    | Skala Kemandirian | -       | -    | -      | -    | 5    | PKSN Ranai                                      | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 8   | Pengadaan mesin <i>Ice Flake</i> (1,5 Ton)                                 | Tersedianya mesin <i>Ice Flake</i>             | 2    | Unit              | -       | 2    | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Bunguran Utara), Kec. Serasan Timur | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 9   | Pembangunan Pabrik Es Mini   | Jumlah Pabrik Es Mini yang terbangun           | 1    | Unit              | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)                | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 10  | Pengadaan <i>Cool Box</i> Kapasitas 200 dan 300 Kg                         | Jumlah <i>Cool Box</i> yang tersedia           | 100  | Buah              | -       | 100  | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)                | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 11  | Pengadaan mobil roda 4 bak berpendingin                                    | Jumlah mobil yang tersedia                     | 1    | Unit              | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)                | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 12  | Pengadaan kapal ikan nelayan Kecamatan Bunguran Timur kapasitas 50-100 Ton | Tersedianya sarana dan prasarana untuk nelayan | 50   | Kapal             | -       | -    | 50     | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)                | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL.   | SAT.  | CAPAIAN |        | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|--------|-------|---------|--------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |        |       | 2020    | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5     | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 13  | Pengadaan bibit ikan kerapu   | Jumlah bibit ikan kerapu yang tersedia  | 60.000 | Ekor  | -       | 60.000 | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga),<br>Kec. Subi,<br>Kec. Bunguran Barat | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 14  | Pengembangan dan penyediaan budi daya rumput laut   | Jumlah budi daya rumput laut  | 2      | Paket | -       | -      | 2      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga)                                       | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 15  | Pengadaan kapal nelayan 10 GT beserta alat tangkap  | Tersedianya sarana dan prasarana untuk nelayan  | 10     | Paket | -       | -      | -      | 5    | 5    | PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga)                                       | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 16  | Pembangunan Gudang Non-SRG  | Jumlah Gudang Non-SRG yang terbangun  | 1      | Unit  | -       | 1      | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)                                   | Kementerian Perdagangan                            |
| 17  | Penyediaan alat tangkap ikan (Jaring Tenggiri)  | Tersedianya alat tangkap ikan (Jaring Tenggiri)   | 1      | Paket | -       | -      | 1      | -    | -    | Kec. Tebing  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 18  | Pengadaan sarana prasarana alat penangkapan ikan (Jaring Nilon Tenggiri 3,5 inc) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho | Tersedianya sarana prasarana alat penangkapan ikan (Jaring Nilon Tenggiri 3,5 inc) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho | 1.750  | Unit  | -       | -      | 1.750  | -    | -    | Kec. Tebing  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|-------------|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |             |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12          | 13   |
| 19  | Pengadaan sarana prasarana alat penangkapan ikan (Kapal Perahu <i>Full Fiber</i> 3 GT) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho | Tersedianya sarana prasarana alat penangkapan ikan (Kapal Perahu <i>Full Fiber</i> 3 GT) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho | 30   | Unit  | -       | -    | -      | 30   | -    | Kec. Tebing | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 20  | Pengadaan sarana prasarana alat penangkapan ikan di Desa Pongkar (Jaring Tangsi 3,5 inc)                                | Tersedianya sarana prasarana alat penangkapan ikan di Desa Pongkar (Jaring Tangsi 3,5 inc)                                | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Tebing | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 21  | Rehabilitasi bibit balai benih ikan dan balai benih ikan laut   | Bibit balai benih ikan dan balai benih ikan laut yang direhabilitasi  | 2    | Unit  | -       | -    | 2      | -    | -    | Kec. Tebing | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 22  | Rehabilitasi balai benih ikan laut  | Terlaksananya rehabilitasi balai benih ikan laut  | 3    | Paket | -       | -    | 3      | -    | -    | Kec. Moro   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 23  | Pengadaan bibit benih dan indukan ikan air tawar, air laut dan air asin (beserta pakan)                                 | Tersedianya bibit benih dan indukan ikan air tawar, air laut dan air asin (beserta pakan)                                 | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Tebing | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|-----------------------|--|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                       |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                    | 13   |
| 24  | Percontohan budi daya bandeng di tambak  | Terlaksananya budi daya bandeng di tambak  | 4    | Paket | -       | -    | 4      | -    | -    | Kec. Buru             | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 25  | Pembangunan tambatan perahu nelayan UPT kecamatan  | Terbangunnya tambatan perahu nelayan UPT kecamatan                                       | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Buru             | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 26  | Pengadaan kapal tangkap ikan   | Tersedianya kapal tangkap ikan   | 2    | Paket | -       | -    | 1      | 1    | -    | Kec. Moro, Kec. Belat | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 27  | Pengadaan bibit benih dan indukan ikan air tawar, air laut dan air payau (beserta pakan) | Tersedianya bibit benih dan indukan ikan air tawar, air laut dan air payau beserta pakan | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Moro             | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 28  | Pengadaan bibit rumput laut  | Tersedianya bibit rumput laut  | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Moro             | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 29  | Pengadaan kebun bibit untuk rumput laut  | Tersedianya kebun bibit untuk rumput laut  | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Moro             | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 30  | Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan berukuran 5-10 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan  | Tersedianya perahu/kapal penangkap ikan                            | 15   | Paket    | -       | -    | 1      | 5    | 9    | Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 31  | Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan berukuran 10-20 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan | Tersedianya perahu/kapal penangkap ikan                            | 10   | Paket    | -       | -    | -      | -    | 10   | Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 32  | Pengadaan Keramba Jaring Apung <i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>   | Tersedianya Pengadaan Keramba Jaring Apung <i>HDPE</i>             | 9    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 9    | Kec. Nongsa, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Batu Ampar                    | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 33  | Pembinaan pengembangan dan pengawasan perikanan  | Jumlah kelompok pengembangan dan pengawasan perikanan yang terbina | 40   | Kelompok | -       | 6    | 11     | 14   | 9    | Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL.    | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |         | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|---------|-------|---------|------|--------|------|---------|--|--|
|     |   |  |         |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024    |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4       | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10      | 12   | 13   |
| 34  | Pengadaan kapal penangkap ikan kecil 3 GT serta mesin, peralatan, dan alat bantu penangkapan ikan | Jumlah kapal penangkapan ikan yang tersedia            | 200     | Paket | -       | -    | 30     | 80   | 90      | Kec. Lubuk Baja, Kec. Sekupang, Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 35  | Pengadaan kapal penangkapan ikan (Fiber) 3-5 GT   | Jumlah kapal penangkapan ikan yang tersedia            | 60      | Unit  | -       | -    | -      | -    | 60      | Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Bengkong | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 36  | Pengadaan mesin tempel <i>boat</i> 40 PK  | Jumlah mesin tempel <i>boat</i> 40 PK yang tersedia    | 300     | Unit  | -       | -    | -      | -    | 300     | Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja                | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 37  | Pengadaan benih ikan laut   | Jumlah benih ikan laut yang tersedia                   | 160.000 | Ekor  | -       | -    | -      | -    | 160.000 | Kec. Sekupang  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 38  | Pengadaan pakan ikan laut   | Jumlah pakan ikan laut yang tersedia                   | 8.000   | Kg    | -       | -    | -      | -    | 8.000   | Kec. Sekupang  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 39  | Pengadaan mesin tempel <i>boat</i> 15-20 PK   | Jumlah mesin tempel <i>boat</i> 15-20 PK yang tersedia | 450     | Unit  | -       | -    | -      | -    | 450     | Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar                | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 159 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR  | VOL.    | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |        |         | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|---------|--------|---------|------|--------|--------|---------|---|--|
|     |   |  |         |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023   | 2024    |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4       | 5      | 6       | 7    | 8      | 9      | 10      | 12  | 13   |
| 40  | Pengadaan <i>Gill Net</i> Hanyut            | Jumlah <i>Gill Net</i> Hanyut yang tersedia            | 2.500   | Unit   | -       | -    | -      | -      | 2.500   | Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Baja, Kec. Sekupang, Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 41  | Pengadaan kawat bubu                        | Jumlah kawat bubu yang tersedia                        | 3.000   | Gulung | -       | -    | -      | -      | 3.000   | Kec. Nongsa, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang                                 | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 42  | Pengadaan perahu dan mesin ketinting        | Jumlah perahu dan mesin ketinting yang tersedia        | 600     | Unit   | -       | -    | -      | -      | 600     | Kec. Sekupang, Kec. Batu Ampar, Kec. Nongsa                                 | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 43  | Pengadaan benih ikan laut                   | Jumlah benih ikan laut yang tersedia                   | 320.000 | Ekor   | -       | -    | -      | 80.000 | 240.000 | Kec. Batu Ampar, Kec. Nongsa  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 44  | Pengadaan mesin tempel <i>boat</i> 40 PK    | Jumlah mesin tempel <i>boat</i> 40 PK yang tersedia    | 200     | Unit   | -       | -    | -      | 60     | 140     | Kec. Nongsa, Kec. Bengkong  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 45  | Pengadaan mesin tempel <i>boat</i> 15-20 PK | Jumlah mesin tempel <i>boat</i> 15-20 PK yang tersedia | 300     | Unit   | -       | -    | -      | -      | 300     | Kec. Nongsa, Kec. Bengkong  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                     | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 46  | Bantuan kapal <5 GT, alat tangkap, sarana pendukung               | Tersedianya kapal, alat tangkap dan sarana pendukung                 | 22   | Unit  | -       | -    | -      | -    | 22   | Kec. Bintang Pesisir,<br>Kec. Telok Sebong | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 47  | Pengadaan Sarana Sistem Rantai Dingin ( <i>Cool Box</i> )         | Jumlah Sarana Sistem Rantai Dingin ( <i>Cool Box</i> ) yang tersedia | 5    | Paket | -       | -    | -      | -    | 5    | Kec. Bintang Pesisir                       | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 48  | Pengadaan peralatan pengolahan pengasapan ikan                    | Jumlah peralatan pengolahan pengasapan ikan yang tersedia            | 5    | Paket | -       | -    | -      | -    | 5    | Kec. Bintang Pesisir                       | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 49  | Pembangunan dermaga rakyat/tambatan perahu pulau-pulau perbatasan | Terbangunnya dermaga rakyat/tambatan perahu                          | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Bintang Pesisir                       | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 50  | Pembangunan dan penyediaan sarana balai benih ikan                | Jumlah sarana balai benih ikan yang tersedia                         | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Jemaja Timur                          | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 51  | Pembangunan gudang rumput laut                                    | Jumlah gudang rumput laut yang terbangun                             | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja Timur                          | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.    | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|---------|---------|------|--------|------|------|-------------------|--|
|     |  |  |      |         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5       | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13   |
| 52  | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Jangkat                   | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan Jangkat yang terbangun           | 1    | Paket   | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Jemaja Timur | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 53  | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan                           | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang terbangun                   | 1    | Paket   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Siantan      | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 54  | Pembangunan sarana prasarana pendaratan perikanan            | Jumlah sarana prasarana pendaratan perikanan yang terbangun    | 1    | Paket   | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Subi         | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 55  | Pengembangan dan penyediaan budi daya rumput laut            | Jumlah budi daya rumput laut yang tersedia                     | 2    | Paket   | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Serasan      | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 56  | Pembangunan pasar rakyat                                     | Jumlah pasar rakyat yang terbangun                             | 1    | Unit    | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Meral Barat  | Kementerian Perdagangan                            |
| 57  | Penyediaan Sarana Metrologi Legal Kabupaten/Kota             | Peralatan pengawasan untuk SPBU dan pasar                      | 1    | Paket   | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Meral        | Kementerian Perdagangan                            |
| 58  | Bimtek peningkatan usaha dan manajemen pengusaha mikro kecil | Jumlah usaha dan manajemen pengusaha mikro kecil yang tersedia | 100  | Peserta | -       | -    | 100    | -    | -    | Kec. Karimun      | Kementerian Perdagangan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI             | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--------------------|---|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                    |   |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                 | 13  |
| 59  | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat                                       | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi                             | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Moro          | Kementerian Perdagangan   |
| 60  | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat                                       | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi                             | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Serasan Timur | Kementerian Perdagangan   |
| 61  | Pembangunan/revitalisasi kompleks pusat jajanan Tanjung Rambut Coastal Area | Jumlah pusat jajanan Tanjung Rambut Coastal Area yang terbangun/ditingkatkan | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Meral Barat   | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 62  | Konservasi daerah objek wisata Air Panas Tanjung Utan                       | Terkonservasinya daerah objek wisata air                                     | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Buru          | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 63  | Pelatihan kewirausahaan   | Jumlah pelatihan kewirausahaan yang terlaksana                               | 180  | Orang | -       | -    | -      | -    | 180  | Kec. Batam Kota    | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                               |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.    | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|--|------|---------|---------|------|--------|------|------|-----------------|--|
|                 |  |  |      |         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                 |  |
| 1               | 2  | 3  | 4    | 5       | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12              | 13   |
| 64              | Operasi Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM              | Jumlah Operasi Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM       | 1    | Unit    | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Batam Kota | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 65              | Bantuan permodalan bagi wirausaha pemula               | Jumlah bantuan permodalan bagi wirausaha pemula        | 10   | WP      | -       | -    | -      | -    | 10   | Kec. Batam Kota | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 66              | Pelatihan perkoperasian                                | Jumlah pelatihan perkoperasian yang terlaksana         | 60   | Orang   | -       | -    | -      | -    | 60   | Kec. Batam Kota | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b> |  |      |         |         |      |        |      |      |                 |  |
| 1               | Pengembangan <i>Integrated Land Transport System</i>   | Terlayani oleh <i>Integrated Land Transport System</i> | 1    | Lokasi  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kota Batam      | Kementerian Perhubungan                            |
| 2               | Subsidi Angkutan Umum Perkotaan                        | Terlayani oleh angkutan umum bersubsidi                | 1    | Layanan | -       | -    | 1      |      |      | Kota Batam      | Kementerian Perhubungan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.    | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|---------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |  |  |      |         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5       | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 3   | Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ Lastmile) | Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika | 1    | Unit    | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Ranai   | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 4   | Pengembangan Bandar Udara Natuna   | Jumlah bandar udara yang dikembangkan  | 1    | Bandara | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Ranai   | Kementerian Perhubungan   |
| 5   | Pembangunan jalan desa strategis pada ruas jalan Segeram-Seminte               | Panjang ruas jalan yang dibangun   | 2,74 | Km      | -       | 2,74 | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Utara)   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 6   | Penyediaan Titik Lokasi dan Pembangunan BTS                                    | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir          | 23   | Lokasi  | -       | 23   | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Pulau Tiga), Kec. Jemaja, Kec. Jemaja Timur, Kec. Siantan Selatan, Kec. Palmatak, Kec. Bunguran Barat, Kec. Subi, Kec. Serasan, Kec. Serasan Timur | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|--------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |  |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 7   | Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah (Sei Bati)                                | Jumlah bandar udara yang dikembangkan                                      | 1    | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Tebing   | Kementerian Perhubungan   |
| 8   | Pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Lagoi Bintan                | Fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Lagoi Bintan yang terbangun | 1    | Lokasi | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Telok Sebong   | Kementerian Perhubungan   |
| 9   | Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa dan Sedanau                                | Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun                              | 2    | Unit   | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kec. Siantan, Kec. Bunguran Barat   | Kementerian Perhubungan   |
| 10  | Pengadaan sarana transportasi darat  | Tersedianya sarana transportasi darat                                      | 11   | Unit   | -       | 11   | -      | -    | -    | Kec. Teluk Sebong, Kec. Moro, Kec. Belat, Kec. Jemaja, Kec. Jemaja Timur, Kec. Palmatak, Kec. Pulau Laut, Kec. Subi, Kec. Serasan Timur | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 11  | Pengadaan sarana transportasi perairan di bawah 20 GT/ maksimal kapasitas 25 penumpang | Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia                          | 1    | Unit   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                                      | VOL.  | SAT. | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | LOKASI               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|-------|------|---------|-------|--------|------|------|----------------------|---|
|     |  |  |       |      | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |                      |   |
| 1   | 2  | 3  | 4     | 5    | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 12                   | 13  |
| 12  | Peningkatan jalan desa strategis (Ruas Jalan Jl. Karet)  | Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan | 1,15  | Km   | -       | 1,15  | -      | -    | -    | Kec. Bintan Utara    | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 13  | Peningkatan jalan desa strategis (Ruas Jalan Jl. Sei Seram)                                      | Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan | 1     | Km   | -       | 1     | -      | -    | -    | Kec. Bintan Utara    | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 14  | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Jl. Pelabuhan Parit I-Jl. Selat Mendaun (Desa Parit) | Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan | 2,481 | Km   | -       | 2,481 | -      | -    | -    | Kec. Karimun         | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 15  | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Kampung Baru Atas                                    | Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan | 0,258 | Km   | -       | 0,258 | -      | -    | -    | Kec. Siantan         | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 16  | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan lingkaran Pulau Belakang Padang                      | Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan | 0,95  | Km   | -       | 0,95  | -      | -    | -    | Kec. Belakang Padang | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b> |   |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa                      | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 5    | Unit  | -       | 2    | 1      | 1    | 1    | Prov. Kep. Riau   | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah          | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 20   | Paket | 4       | 4    | 4      | 4    | 4    | Kab. Karimun, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Batam              | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 3               | Bantuan Sosial Pemerintah                              | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Batam | Kementerian Sosial                                 |
| 4               | Penambahan ruang Puskesmas Kelarik                     | Jumlah ruang Puskesmas Kelarik yang terbangun                                   | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Natuna   | Kementerian Kesehatan                              |
| 5               | Pembangunan pagar Puskesmas Kelarik                    | Terbangunnya pagar Puskesmas  | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kab. Natuna   | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 6   | Pembangunan ruang rawat inap kelas III dua lantai RSUD Natuna   | Terbangunnya ruang rawat inap kelas III Rumah sakit                         | 1    | Paket    | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)                           | Kementerian Kesehatan                              |
| 7   | Pembangunan ruang program dan ruang pertemuan Puskesmas Tanjung | Terbangunnya ruang program dan ruang pertemuan Puskesmas                    | 1    | Paket    | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bungur Timur Laut)                        | Kementerian Kesehatan                              |
| 8   | Pembangunan Puskesmas Cemaga                                    | Jumlah Puskesmas Cemaga yang terbangun                                      | 1    | Paket    | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Selatan)                         | Kementerian Kesehatan                              |
| 9   | Pengadaan <i>speed boat</i> puskesmas keliling                  | Tersedianya kapal puskesmas keliling  | 1    | Unit     | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga)                               | Kementerian Kesehatan                              |
| 10  | Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan              | Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi | 50   | Unit     | 10      | 10   | 10     | 10   | 10   | PKSN Ranai   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 11  | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga               | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan                              | 10   | Penyalur | 3       | 2    | 2      | 2    | 1    | PKSN Ranai   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 12  | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD                         | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi                            | 686  | Ruang    | -       | 126  | 177    | 184  | 199  | PKSN Ranai (Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur, Kec. | Kementerian Pendidikan,                            |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN | INDIKATOR | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|-----------------------|-----------|------|------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |                       |           |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2                     | 3         | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     |                       |           |      |      |         |      |        |      |      | Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Pulau Tiga), Kec. Meral Barat, Kec. Tebing, Kec. Meral, Kec. Karimun, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa, Kec. Batu Ampar, Kec. Telok Sebong, Kec. Bintan Utara, Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Jemaja Timur, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja, Kec. Pulau | Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
|     |   |   |      |       |         |      |        |      |      | Laut, Kec. Siantan,<br>Kec. Palmatak, Kec.<br>Bunguran Barat, Kec.<br>Serasan, Kec. Subi,<br>Kec. Serasan Timur  |   |
| 13  | Pembangunan/rehabilitasi<br>perpustakaan SD | Jumlah ruang<br>perpustakaan yang<br>terbangun/direhabilitasi | 317  | Ruang | -       | 21   | 87     | 100  | 109  | PKSN Ranai (Kec.<br>Bunguran Utara, Kec.<br>Bunguran Timur, Kec.<br>Bunguran Timur Laut,<br>Kec. Bunguran<br>Selatan, Kec. Pulau<br>Tiga), Kec. Meral<br>Barat, Kec. Tebing,<br>Kec. Meral, Kec.<br>Karimun, Kec. Buru,<br>Kec. Belat, Kec. Moro,<br>Kec. Belakang Padang,<br>Kec. Sekupang, Kec.<br>Lubuk Baja, Kec.<br>Bengkong, Kec. Batam<br>Kota, Kec. Nongsa,<br>Kec. Batu Ampar, Kec. | Kementerian<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan, Riset,<br>dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
|     |   |   |      |       |         |      |        |      |      | Telok Sebong, Kec.<br>Bintan Utara, Kec.<br>Gunung Kijang, Kec.<br>Bintan Pesisir, Kec.<br>Jemaja Timur, Kec.<br>Siantan Selatan, Kec.<br>Jemaja, Kec. Pulau<br>Laut, Kec. Siantan,<br>Kec. Palmatak, Kec.<br>Bunguran Barat, Kec.<br>Serasan, Kec. Subi,<br>Kec. Serasan Timur |   |
| 14  | Pembangunan/rehabilitasi<br>ruang kelas SMP | Jumlah ruang kelas yang<br>terbangun/direhabilitasi | 229  | Ruang | -       | 81   | 44     | 51   | 53   | PKSN Ranai (Kec.<br>Bunguran Timur Laut,<br>Kec. Bunguran Utara,<br>Kec. Bunguran<br>Selatan, Kec.<br>Bunguran Timur, Kec.<br>Pulau Tiga), Kec.<br>Meral Barat, Kec.<br>Tebing, Kec. Buru,<br>Kec. Belat, Kec. Meral,   | Kementerian<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan, Riset,<br>dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 172 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     |   |   |      |       |         |      |        |      |      | Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Batam Kota, Kec. Bintan Utara, Kec. Bengkong, Kec. Nongsa, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Telok Sebong, Kec. Jemaja, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja Timur, Kec. Pulau Laut |  |
| 15  | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMP | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi | 147  | Ruang | -       | 17   | 40     | 45   | 45   | PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Selatan), Kec. Meral  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 173 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
|     |  |  |      |       |         |      |        |      |      | Barat, Kec. Tebing,<br>Kec. Buru, Kec. Belat,<br>Kec. Meral, Kec. Moro,<br>Kec. Belakang<br>Padang, Kec.<br>Sekupang, Kec. Lubuk<br>Baja, Kec. Batu<br>Ampar, Kec. Batam<br>Kota, Kec. Bintan<br>Utara, Kec. Bengkong,<br>Kec. Nongsa, Kec.<br>Bintan Pesisir, Kec.<br>Telok Sebong, Kec.<br>Jemaja, Kec.<br>Palmatok, Kec.<br>Siantan Selatan, Kec.<br>Jemaja Timur, Kec.<br>Pulau Laut |   |
| 16  | Pembangunan/rehabilitasi<br>laboratorium SMP | Jumlah ruang laboratorium<br>yang terbangun/<br>direhabilitasi | 97   | Ruang | -       | 7    | 23     | 34   | 33   | PKSN Ranai (Kec.<br>Pulau Tiga, Kec.<br>Bunguran Timur Laut,<br>Kec. Bunguran Utara,   | Kementerian<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan, Riset,<br>dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN | INDIKATOR | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|-----------------------|-----------|------|------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |                       |           |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2                     | 3         | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
|     |                       |           |      |      |         |      |        |      |      | Kec. Bunguran Timur,<br>Kec.<br>Bunguran Selatan),<br>Kec. Meral Barat, Kec.<br>Tebing, Kec. Buru,<br>Kec. Belat, Kec. Meral,<br>Kec. Moro, Kec.<br>Belakang Padang,<br>Kec. Sekupang, Kec.<br>Lubuk Baja, Kec. Batu<br>Ampar, Kec. Batam<br>Kota, Kec. Bintan<br>Utara, Kec. Bengkong,<br>Kec. Nongsa, Kec.<br>Bintan Pesisir, Kec.<br>Telok Sebong, Kec.<br>Jemaja, Kec.<br>Palmatok, Kec.<br>Siantan Selatan, Kec.<br>Jemaja Timur, Kec.<br>Pulau Laut |  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 17  | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi | 235  | Ruang | -       | 26   | 63     | 71   | 75   | PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur), Kec. Telok Sebong, Kec. Nongsa, Kec. Belakang Padang, Kec. Batam Kota, Kec. Sekupang, Kec. Moro, Kec. Buru, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Bengkong, Kec. Bintan Utara, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Jemaja Timur, Kec. Palmatak, Kec. Bunguran Barat | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 18  | Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMA/SMK | Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi | 138  | Ruang | -       | 9    | 35     | 46   | 48   | PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Kec. Timur Laut, Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Selatan), Kec. Meral Barat, Kec. Tebing, Kec. Meral, Kec. Karimun, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa, Kec. Batu Ampar, Kec. Telok Sebong, Kec. Bintan Utara, Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Jemaja | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     |   |  |      |       |         |      |        |      |      | Timur, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja, Kec. Pulau Laut, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Bunguran Barat, Kec. Serasan, Kec. Subi, Kec. Serasan Timur |  |
| 19  | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMA/SMK   | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi                  | 9    | Ruang | -       | 2    | 2      | 3    | 2    | Kec. Serasan Timur, Kec. Buru, Kec. Bintan Utara, Kec. Gunung Kijang, Kec. Palmatak  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 20  | Pembangunan balai pertemuan umum kecamatan  | Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun                      | 5    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 5    | Kec. Meral Barat, Kec. Meral, Kec. Karimun, Kec. Jemaja, Kec. Siantan  | Kementerian Dalam Negeri                                 |
| 21  | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana prasarana dan alat kesehatan) | Jumlah pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan | 6    | Paket | -       | 6    | -      | -    | -    | Kec. Serasan Timur   | Kementerian Kesehatan                                    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 22  | Penyediaan alat kesehatan Puskesmas               | Tersedianya alat kesehatan Puskesmas                | 6    | Paket | -       | 2    | 4      | -    | -    | Kec. Tebing, Kec. Moro, Kec. Jemaja Barat, Kec. Karimun, Kec. Siantan Utara | Kementerian Kesehatan                              |
| 23  | Penyediaan Prasarana Puskesmas                    | Tersedianya Prasarana Puskesmas Tebing              | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Tebing   | Kementerian Kesehatan                              |
| 24  | Pengadaan Prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah | Tersedianya Prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Meral  | Kementerian Kesehatan                              |
| 25  | Pengadaan alat laboratorium kesehatan daerah      | Tersedianya alat laboratorium kesehatan daerah      | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Meral  | Kementerian Kesehatan                              |
| 26  | Pembangunan gedung/relokasi Puskesmas             | Terbangunnya gedung/relokasi Puskesmas              | 3    | Unit  | -       | -    | 3      | -    | -    | Kec. Karimun, Kec. Moro   | Kementerian Kesehatan                              |
| 27  | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas                 | Terbangunnya Rumah Dinas Puskesmas                  | 5    | Unit  | -       | 1    | 4      | -    | -    | Kec. Karimun, Kec. Moro, Kec. Jemaja Barat, Kec. Siantan Utara              | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR                                  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 28  | Penyediaan prasarana Puskesmas                | Tersedianya prasarana Puskesmas            | 2    | Paket | -       | -    | 2      | -    | -    | Kec. Moro   | Kementerian Kesehatan                              |
| 29  | Pembangunan Puskesmas                         | Jumlah Puskesmas yang terbangun            | 3    | Unit  | -       | 1    | 1      | -    | 1    | Kec. Karimun, Kec. Telok Sebong, Kec. Jemaja Barat                                      | Kementerian Kesehatan                              |
| 30  | Pengadaan Puskesmas Keliling Darat            | Jumlah Puskesmas Keliling Darat            | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja Barat   | Kementerian Kesehatan                              |
| 31  | Pengadaan Ambulans Darat <i>Double Gardan</i> | Jumlah Ambulans Darat <i>Double Gardan</i> | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja Barat, Kec. Siantan Utara   | Kementerian Kesehatan                              |
| 32  | Pengadaan alat kesehatan RSUD                 | Jumlah alat kesehatan RSUD yang tersedia   | 3    | Paket | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja, Kec. Siantan, Kec. Palmatak  | Kementerian Kesehatan                              |
| 33  | Pembangunan kamar operasi RSUD                | Jumlah Kamar Operasi RSUD yang terbangun   | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja   | Kementerian Kesehatan                              |
| 34  | Pengadaan IPAL Puskesmas                      | Jumlah IPAL Puskesmas yang tersedia        | 5    | Paket | -       | 5    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Palmatak | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 180 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 35  | Peningkatan sarana dan prasarana instalasi farmasi              | Jumlah peningkatan sarana dan prasarana instalasi farmasi yang ditingkatkan | 3    | Paket | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja  | Kementerian Kesehatan                              |
| 36  | Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit                      | Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang tersedia                       | 3    | Paket | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja  | Kementerian Kesehatan                              |
| 37  | Pengadaan sarana dan prasarana fisik program Keluarga Berencana | Jumlah sarana dan prasarana fisik program Keluarga Berencana yang tersedia  | 4    | Paket | -       | 4    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja  | Kementerian Kesehatan                              |
| 38  | Pengadaan Ambulans Laut   | Jumlah Ambulans Laut yang tersedia  | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Jemaja, Kec. Siantan Selatan  | Kementerian Kesehatan                              |
| 39  | Pengadaan Puskesmas Keliling Laut/Perairan                      | Jumlah Puskesmas Keliling Laut/Perairan yang tersedia                       | 6    | Unit  | -       | 6    | -      | -    | -    | Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Palmatak, Kec. Jemaja Barat | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                     | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------------------------|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                            |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                         | 13   |
| 40  | Pengadaan Transportasi Puskesmas Keliling (Transportasi Laut) | Jumlah Puskesmas Keliling (Transportasi Laut) yang tersedia | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Siantan Selatan       | Kementerian Kesehatan                              |
| 41  | Pembangunan Puskesmas   | Jumlah Puskesmas yang terbangun                             | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Siantan Utara         | Kementerian Kesehatan                              |
| 42  | Pengadaan Puskesmas Keliling Darat                            | Jumlah Puskesmas Keliling Darat yang tersedia               | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Siantan Utara         | Kementerian Kesehatan                              |
| 43  | Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Dua                         | Jumlah Puskesmas Keliling Roda Dua yang tersedia            | 4    | Unit  | -       | 4    | -      | -    | -    | Kec. Siantan Utara         | Kementerian Kesehatan                              |
| 44  | Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas                      | Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang tersedia         | 9    | Paket | -       | 9    | -      | -    | -    | Kec. Siantan               | Kementerian Kesehatan                              |
| 45  | Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit                    | Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang tersedia       | 3    | Paket | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Siantan               | Kementerian Kesehatan                              |
| 46  | Penyediaan alat prasarana (Pusling Perairan)                  | Jumlah alat prasarana yang tersedia                         | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Siantan               | Kementerian Kesehatan                              |
| 47  | Revitalisasi berat RSUD                                       | Jumlah RSUD yang direvitalisasi                             | 2    | Paket | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Palmatak, Kec. Jemaja | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI              | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---------------------|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                     |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                  | 13   |
| 48  | Pembangunan kamar operasi RSUD                              | Jumlah kamar operasi RSUD yang terbangun           | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Palmatak       | Kementerian Kesehatan                              |
| 49  | Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit (Gedung IGD)       | Jumlah Rumah Sakit yang direhabilitasi             | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Palmatak       | Kementerian Kesehatan                              |
| 50  | Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit (Gudang Farmasi)   | Jumlah Rumah Sakit yang terbangun                  | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Palmatak       | Kementerian Kesehatan                              |
| 51  | Pengadaan kapal Puskesmas keliling                          | Tersedianya kapal Puskesmas keliling               | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Pulau Laut     | Kementerian Kesehatan                              |
| 52  | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan | Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan | 5    | Paket | -       | 5    | -      | -    | -    | Kec. Pulau Laut     | Kementerian Kesehatan                              |
| 53  | Pembangunan ruang Puskesmas Sedanau                         | Jumlah ruang Puskesmas Sedanau yang terbangun      | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Bunguran Barat | Kementerian Kesehatan                              |
| 54  | Pembangunan pagar Puskesmas                                 | Jumlah pagar Puskesmas yang terbangun              | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Subi           | Kementerian Kesehatan                              |
| 55  | Penyediaan alat laboratorium Puskesmas Serasan              | Tersedianya alat laboratorium Puskesmas Serasan    | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Serasan        | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 56  | Pengadaan alat penunjang pelayanan kebidanan | Tersedianya alat penunjang pelayanan kebidanan        | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Serasan  | Kementerian Kesehatan                              |
| 57  | Pengadaan pompong Puskel GT.20               | Tersedianya pompong Puskel GT.20                      | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Serasan  | Kementerian Kesehatan                              |
| 58  | Pembangunan tambah ruang Puskesmas Tanjung   | Jumlah ruang Puskesmas yang terbangun                 | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Serasan Timur  | Kementerian Kesehatan                              |
| 59  | Pembangunan jaringan distribusi listrik      | Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun     | 21   | Paket | 15      | 3    | 1      | 2    | -    | Kec. Karimun, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Moro, Kec. Nongsa, Kec.<br>Bintan Utara, Kec. Telok Sebong, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan, Kec. Palmatak | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |
| 60  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya  | Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun | 3    | Paket | -       | 1    | 1      | 1    | -    | Kec. Moro, Kec. Belakang Padang   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|---|---|------|------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |   |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2   | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 61              | Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah                                | Jumlah distribusi dan sambungan rumah yang dikembangkan                                 | 241  | SR   | -       | 241  | -      | -    | -    | Kec. Telok Sebong, Kec. Gunung Kijang, Kec. Serasan Timur | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 62              | Pembangunan baru rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi | Jumlah rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi yang dibangun | 45   | Unit | -       | 45   | -      | -    | -    | Kec. Gunung Kijang  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 63              | Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)-<br><i>Tematik Stunting</i>       | Jumlah tangki septik yang terbangun   | 5    | Unit | -       | 5    | -      | -    | -    | Kec. Pulau Laut   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 64              | Pengembangan sanitasi   | Jumlah sanitasi yang dikembangkan   | 11   | Unit | -       | 11   | -      | -    | -    | Kec. Serasan Timur  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| <b>V</b>        | <b>PROVINSI KALIMANTAN<br/>BARAT</b>  |   |      |      |         |      |        |      |      |   |  |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN<br/>PERBATASAN NEGARA</b>                                 |   |      |      |         |      |        |      |      |   |  |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 185 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|--|---|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|                 |  |   |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan  | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional               | 1    | Paket      | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Kalimantan Barat   | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2               | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang, Paloh Aruk, Entikong, Nangabadau, Jasa-Sei Kelik | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara | 5    | Paket      | -       | -    | 5      | -    | -    | PKSN Jagoi Babang, PKSN Paloh Aruk, PKSN Entikong, PKSN Nanga Badau, PKSN Jasa | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>  |   |      |            |         |      |        |      |      |  |  |
| 1               | Kegiatan Bimtek Diversifikasi Olahan Kayu  | Jumlah Bimtek yang terlaksana                                 | 20   | IKM        | -       | 20   | -      | -    | -    | Kab. Sanggau   | Kementerian Perindustrian                                    |
| 2               | Pembangunan Sentra IKM Tahu Tempe  | Jumlah Sentra IKM yang terbangun                              | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Sanggau   | Kementerian Perindustrian                                    |
| 3               | Kegiatan Bimtek Diversifikasi Anyaman Bambu  | Jumlah Bimtek yang terlaksana                                 | 20   | IKM        | -       | 20   | -      | -    | -    | Kab. Bengkayan   | Kementerian Perindustrian                                    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR   | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |  |   |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 4   | Revitalisasi Sentra IKM Anyaman Rotan                    | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi                               | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Bengkayan   | Kementerian Perindustrian   |
| 5   | Pelatihan Pemasaran <i>Online</i> Produk/IKM             | Jumlah pelatihan Pemasaran <i>Online</i> Produk/IKM yang terlaksana | 80   | IKM        | -       | 80   | -      | -    | -    | Kab. Sambas  | Kementerian Perindustrian   |
| 6   | Revitalisasi Sentra IKM Tenun                            | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi                               | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Sambas  | Kementerian Perindustrian   |
| 7   | Pengembangan IKM Tenun Sidan                             | Jumlah Sentra IKM yang terbangun                                    | 1    | IKM        | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Kapuas Hulu   | Kementerian Perindustrian   |
| 8   | Revitalisasi Sentra IKM Tenun Ikat                       | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi                               | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Kapuas Hulu   | Kementerian Perindustrian   |
| 9   | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan Desa | Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes                               | 20   | BUMDes     | -       | -    | 4      | 4    | 12   | Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 10  | Pembangunan/revitalisasi sentra IKM                      | Jumlah sentra IKM yang dibangun/direvitalisasi                      | 1    | IKM        | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Paloh Aruk  | Kementerian Perindustrian   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|-----------------|--|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                 |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12              | 13   |
| 11  | Pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor                              | Terselesaikannya pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor            | 1    | Paket    | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perindustrian                          |
| 12  | Pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk                   | Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk | 1    | Paket    | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perindustrian                          |
| 13  | Pengembangan industri pengolahan dan <i>packaging</i> /kemasan komoditas beras | Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan komoditas beras             | 1    | Paket    | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perindustrian                          |
| 14  | Pengembangan industri pengolahan kelapa di Kawasan Industri Semparuk (KIS)     | Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan kelapa di KIS               | 1    | Paket    | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perindustrian                          |
| 15  | Pembangunan Gudang/Depo Non-SRG  | Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya                 | 1    | Unit     | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perdagangan                            |
| 16  | Penyedia jasa logistik sektor perdagangan yang diberikan pembinaan             | Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan                                 | 10   | Kegiatan | 2       | 2    | 2      | 2    | 2    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perdagangan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|-------------------|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13   |
| 17  | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat   | Terselesaikannya pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat   | 3    | Unit  | -       | -    | 3      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Perdagangan                            |
| 18  | Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana          | Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi   | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Jagoi Babang | Kementerian Perdagangan                            |
| 19  | Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi/ kelompok di daerah tertinggal, perbatasan, dan pascabencana | Jumlah pasar rakyat yang dibangun   | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 20  | Pengembangan area sentra industri lada  | Luas area kawasan industri lada yang dikembangkan   | 500  | Ha    | -       | -    | 500    | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Pertanian                              |
| 21  | Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada                            | Terselesaikannya pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Pertanian                              |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 189 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL.   | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|--------|-------|---------|------|--------|------|------|-----------------|--|
|     |  |  |        |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                 |  |
| 1   | 2  | 3  | 4      | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12              | 13   |
| 22  | Pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA)  | Terselesaikannya pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi BUJANGSETA | 1.000  | Ha    | -       | -    | 1.000  | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Pertanian                              |
| 23  | Pengembangan budi daya Padi Rawa dan Padi Inbrida.   | Terselesaikannya pengembangan budi daya Padi Rawa dan Padi Inbrida                                       | 1      | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Pertanian                              |
| 24  | Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan Beras Premium (Bantuan Benih Padi Hibrida)            | Terselesaikannya pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan Beras Premium      | 10.800 | Ha    | -       | -    | 10.800 | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Pertanian                              |
| 25  | Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan Beras Premium (Pengembangan Budi daya Padi Kaya Gizi) | Terselesaikannya pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan Beras Premium      | 300    | Ha    | -       | -    | 300    | -    | -    |                 |  |
| 26  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa  | Terselesaikannya pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa   | 1      | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Pertanian                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 27  | Pembangunan Gudang Non-SRG berpendingin <i>Controlled Atmosphere Storage</i> (CAS) | Jumlah Gudang Non-SRG yang terbangun  | 1    | Unit | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Perdagangan   |
| 28  | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat  | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi  | 3    | Unit | -       | -    | 3      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk (Pasar Temajuk, Pasar Sejangkung, Pasar Galing) | Kementerian Perdagangan   |
| 29  | Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan                             | Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya | 85   | Ha   | 17      | 17   | 17     | 17   | 17   | PKSN Jagoi Babang   | Kementerian Pertanian   |
| 30  | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa                           | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes   | 8    | Desa | -       | -    | 2      | 3    | 3    | PKSN Jagoi Babang, PKSN Paloh Aruk                              | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 31  | Pengembangan Desa Digital (P3PD)   | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital                                | 3    | Desa | -       | -    | 1      | 1    | 1    | PKSN Jagoi Babang   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 32              | Pengadaan mesin pengolah tepung tapioka di Desa Mungguk Gelombang | Jumlah mesin pengolah tepung tapioka yang tersedia | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Ketungau Tengah                        | Kementerian Perindustrian                          |
| 33              | Pengadaan mesin pengolah tepung tapioka di Desa Swadaya           | Jumlah mesin pengolah tepung tapioka yang tersedia | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Ketungau Tengah                        | Kementerian Perindustrian                          |
| 34              | Pengadaan mesin pengolah tepung lada di 10 desa                   | Jumlah mesin pengolah tepung lada yang tersedia    | 10   | Unit  | -       | -    | 10     | -    | -    | Kec. Ketungau Tengah                        | Kementerian Perindustrian                          |
| 35              | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat                             | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi   | 2    | Unit  | -       | -    | 2      | -    | -    | Kec. Ketungau Hulu,<br>Kec. Ketungau Tengah | Kementerian Perdagangan                            |
| 36              | Penyediaan Sarana Metrologi Legal Kab/Kota                        | Jumlah peralatan pengawasan untuk SPBU dan pasar   | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Ketungau Hulu                          | Kementerian Perdagangan                            |
| 37              | Pembangunan Gudang Non-SRG  | Jumlah Gudang Non-SRG yang terbangun               | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Ketungau Tengah                        | Kementerian Perdagangan                            |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>            |  |      |       |         |      |        |      |      |   |  |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 192 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.    | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |   |
|-----|--|--|------|---------|---------|------|--------|------|------|-------------------|---|---|
|     |  |  |      |         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5       | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13  |   |
| 1   | Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana nya dikembangkan dan fungsional | Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan transmigrasi prioritas | 2    | Kawasan | -       | -    | 2      |      |      | Kab. Sambas       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |   |
| 2   | Kawasan Transmigrasi Prioritas yang dikembangkan ekonominya                              | Berkembangnya ekonomi Kawasan Transmigrasi Prioritas                                       | 2    | Kawasan | 2       |      |        |      |      |                   | Kab. Sambas   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 3   | Pembangunan Terminal Temajuk   | Jumlah terminal yang terbangun   | 1    | Unit    | -       | -    | -      | 1    |      | Kec. Paloh        | Kementerian Perhubungan   |   |
| 4   | Pembangunan Terminal Jagoi Babang  | Jumlah terminal yang terbangun   | 1    | Unit    | -       | -    | 1      |      | -    | Kec. Jagoi Babang | Kementerian Perhubungan   |   |
| 5   | Pembangunan Jalan Aruk-Batas Kec. Siding/Seluas  | Panjang ruas jalan yang dibangun   | 12   | Km      | 12      | -    | -      | -    | -    | Kab. Sambas       | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |   |
| 6   | Pembangunan Jalan Temajuk Aruk   | Panjang ruas jalan yang dibangun   | 22   | Km      | -       | 22   | -      | -    | -    | Kab. Sambas       | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |   |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 193 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.   | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|-------|--------|---------|-------|--------|------|------|-----------------|--|
|     |  |   |       |        | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |                 |  |
| 1   | 2  | 3   | 4     | 5      | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 12              | 13   |
| 7   | Pembangunan Jalan Batas Kec. Siding Seluas - Batas Kec. Sekayam/Entikong (Total 40,5 Km) | Panjang jalan yang dibangun                                 | 22,53 | Km     | -       | 22,53 | -      | -    | -    | Kab. Sanggau    | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 8   | Pembangunan Jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang Naga Badau                                   | Panjang ruas jalan yang dibangun                            | 14,4  | Km     | -       | 14,4  | -      | -    | -    | Kab. Sintang    | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 9   | Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Sintete  | Panjang ruas jalan yang dibangun                            | 5,0   | Km     | -       | 5,0   | -      | -    | -    | Kab. Sambas     | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 10  | Pembangunan Terminal Aruk  | Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan      | 1     | Lokasi | -       | -     | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perhubungan                            |
| 11  | Pembangunan Terminal Temajuk   | Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan      | 1     | Unit   | -       | -     | -      | 1    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perhubungan                            |
| 12  | Pengembangan terminal barang dan penumpang PLBN Aruk                                     | Terselesaikannya pengembangan terminal barang dan penumpang | 1     | Paket  | -       | 1     | -      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk | Kementerian Perhubungan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|--------|---------|------|--------|------|------|-------------------|---|
|     |  |  |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13  |
| 13  | Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Internet)         | Jumlah titik Bakti Internet yang dibangun  | 1    | Lokasi | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 14  | Peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi (seluler dan internet)           | Terselesaikannya peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi                       | 1    | Paket  | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 15  | Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ Lastmile) | Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika | 1    | Unit   | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Jagoi Babang | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 16  | Peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh                     | Terselesaikannya peningkatan jalan perbatasan  | 2,16 | Km     | -       | -    | 2,16   | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 17  | Jalan perbatasan Kalimantan Barat  | Panjang ruas jalan yang dibangun   | 12   | Km     | -       | -    | -      | -    | 12   | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |
| 18  | Pembangunan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat:                      | Panjang ruas jalan yang terbangun  | 174  | Km     | -       | 98   | 76     | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Pekerjaan Umum  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|--|------|--------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |  |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
|     | a. Temajuk-Aruk-Nanga<br>Badau;<br>b. Nanga Era-Batas<br>Kalimantan Timur  |  |      |        |         |      |        |      |      |   | dan Perumahan<br>Rakyat                                  |
| 19  | Pembangunan Jalan Nasional<br>di Kabupaten Sambas,<br>Kalimantan Barat:<br>a. Ruas Merbau-Temajuk;<br>b. Ruas Tebas-Jembatan<br>Sambas Besar; dan<br>c. Jembatan Sambas Besar-<br>Merbau | Panjang ruas jalan yang<br>terbangun   | 1    | Paket  | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat |
| 20  | Peningkatan jalan Teluk Atong,<br>Desa Temajuk, Kecamatan<br>Paloh   | Panjang ruas jalan yang<br>ditingkatkan  | 4,8  | Km     | -       | -    | 4,8    | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat |
| 21  | Penyediaan titik lokasi dan<br>pembangunan BTS   | Jumlah titik lokasi<br>penyediaan BTS khususnya<br>di kelautan dan daerah<br>pesisir | 62   | Lokasi | -       | 62   | -      | -    | -    | PKSN Jagoi Babang,<br>PKSN Nanga Badau,<br>PKSN Paloh-Aruk<br>(Kec.Paloh), Kec.<br>Siding, Ketungau<br>Hulu, Ketungau | Kementerian<br>Komunikasi dan<br>Informatika             |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 196 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
|     |   |   |      |       |         |      |        |      |      | Tengah, Puring<br>Kencana, Batang<br>Lupar, Embaloh Hulu,<br>Putussibau Utara,<br>Putussibau Selatan |   |
| 22  | Pengembangan Bandar Udara Pangsuma  | Jumlah bandar udara yang dikembangkan             | 1    | Paket | 1       |      | -      | -    | -    | Kec. Putussibau Selatan  | Kementerian Perhubungan   |
| 23  | Pembangunan jalan desa strategis pada ruas jalan Kapot-Batu Ampar                             | Panjang ruas jalan desa strategis yang dibangun   | 1,88 | Km    | -       | 1,88 | -      | -    | -    | Kec. Sidsing   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 24  | Pengadaan sarana transportasi darat   | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia    | 3    | Unit  | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Jagoi Babang,<br>Kec. Batang Lupar,<br>Kec. Entikong  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 25  | Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang | Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Ketungau Tengah   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 197 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR                                     | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|------|---------|------|--------|------|------|-----------------------|---|
|     |   |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                       |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                    | 13  |
| 26  | Peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Nanga Awın-Kırın Nangka    | Jumlah jalan desa strategis yang ditingkatkan | 9,47 | Km   | -       | 9,47 | -      | -    | -    | Kec. Putussibau Utara | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 27  | Pembangunan jalan desa strategis pada ruas jalan Jl. Dusun Sei Dungun       | Jumlah jalan desa strategis yang dibangun     | 1    | Km   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Paloh            | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 28  | Peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Sungai Tekam-Perimpah      | Jumlah jalan desa strategis yang ditingkatkan | 1,50 | Km   | -       | 1,50 | -      | -    | -    | Kec. Sekayam          | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 29  | Penggantian jembatan dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120 m) | Jumlah jembatan yang diganti dan direnovasi   | 120  | m    | -       | 120  | -      | -    | -    | Kec. Ketungau Tengah  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 30  | Pengadaan sarana transportasi darat   | Tersedianya sarana transportasi darat         | 1    | Unit | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Putussibau Utara | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b>                             |   |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa  | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 5    | Unit  | -       | -    | 1      | 2    | 2    | Prov. Kalimantan Barat  | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah                                      | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 20   | Paket | 4       | 4    | 4      | 4    | 4    | Kab. Sambas, Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu               | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 3               | Bantuan Sosial Pemerintah  | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Sambas, Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu | Kementerian Sosial                                 |
| 4               | Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK- Tematik Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah IPAL Skala Permukiman yang terbangun                                     | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Jagoi Babang   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|-------------------|--|
|     |   |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13   |
| 5   | Pengembangan jaringan distribusi listrik di Kawasan Perbatasan Aruk | Terselesaikannya pengembangan jaringan distribusi listrik       | 2    | Paket  | -       | -    | 2      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 6   | Pembangunan SPAM  | Terselesaikannya pembangunan SPAM                               | 2    | Paket  | -       | 1    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 7   | Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan                        | Total debit air baku yang dihasilkan                            | 0,19 | m3/det | -       | -    | -      | -    | 0,19 | PKSN Jagoi Babang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 8   | Pembangunan SPBU di Aruk  | Terselesaikannya pembangunan SPBU di Aruk                       | 1    | Unit   | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 9   | Pembangunan Pasar Tipe C  | Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya | 1    | Unit   | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Paloh Aruk   | Kementerian Perdagangan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 10  | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga   | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan        | 10   | Penyalur | -       | 2    | 2      | 2    | 4    | PKSN Jagoi Babang  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 11  | Pembangunan balai pertemuan umum kecamatan  | Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun   | 5    | Unit     | -       | -    | -      | 1    | 4    | PKSN Paloh Aruk, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Puring Kencana, Kec. Putussibau Utara | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 12  | Pembangunan kantor desa/kelurahan   | Jumlah kantor desa/kelurahan yang dibangun            | 4    | Unit     | -       | 1    | 1      | -    | 2    | PKSN Paloh Aruk, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Hulu   | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 13  | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana prasarana dan alat kesehatan) | Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan    | 3    | Paket    | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Badau   | Kementerian Kesehatan                              |
| 14  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya   | Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun | 3    | Unit     | -       | -    | -      | 2    | 1    | PKSN Jagoi Babang (Kec. Jagoi Babang), Kec. Ketungau Tengah                                    | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN    |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 15  | Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik  | Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun                                     | 26   | Paket  | 1       | 7    | 11     | 5    | 2    | PKSN Jagoi Babang (Kec. Jagoi Babang), Kec. Siding, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Embaloh Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Kayan Hulu | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |
| 16  | Pembangunan Rumah Sakit Rujukan  | Jumlah rumah sakit rujukan yang terbangun   | 1    | Paket  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Entikong  | Kementerian Kesehatan                              |
| 17  | Puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan                                   | Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan                       | 2    | Unit   | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Entikong, Kec. Sekayam  | Kementerian Kesehatan                              |
| 18  | Bimtek pencegahan dan pengendalian penyakit  | Jumlah bimtek pencegahan dan pengendalian penyakit yang terbangun                     | 2    | Bimtek | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Entikong, Kec. Sekayam  | Kementerian Kesehatan                              |
| 19  | Penyelenggaraan bimtek penanggulangan <i>stunting</i> secara terpadu di Kawasan Perbatasan | Jumlah bimtek <i>stunting</i> secara terpadu di Kawasan Perbatasan yang ditanggulangi | 2    | Bimtek | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Entikong, Sekayam   | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

| NO.       | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR  | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------|---|--|------|--------|---------|------|--------|------|------|------------------------|--|
|           |   |  |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                        |  |
| 1         | 2   | 3  | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                     | 13   |
| 20        | Penyelenggaraan bimtek Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | Jumlah bimtek yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | 2    | Bimtek | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Entikong, Sekayam | Kementerian Kesehatan                              |
| 21        | Peningkatan kualitas rumah secara swadaya             | Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan                             | 88   | Unit   | -       | 88   | -      | -    | -    | Kec. Sekayam           | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 22        | Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah  | Jumlah jaringan distribusi dan sambungan rumah yang dikembangkan   | 50   | SR     | -       | 50   | -      | -    | -    | Kec. Batang Lupar      | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 23        | Pengembangan perumahan                                | Jumlah perumahan yang dikembangkan                                 | 175  | Unit   | -       | 175  | -      | -    | -    | Kec. Embaloh Hulu      | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| <b>VI</b> | <b>PROVINSI KALIMANTAN<br/>TIMUR</b>                  |  |      |        |         |      |        |      |      |                        |  |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 203 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|------------------------|--|
|                 |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                        |  |
| 1               | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                     | 13   |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN<br/>PERBATASAN NEGARA</b>  |  |      |       |         |      |        |      |      |                        |  |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan  | Jumlah Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Strategis Nasional | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Kalimantan Timur | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2               | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional                    | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Kalimantan Timur | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 3               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Long Apari  | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara                     | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | PKSN Long Apari        | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI             | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-------------|---|---|-------|-------|---------|------|--------|------|------|--------------------|--|
|             |   |   |       |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                    |  |
| 1           | 2   | 3   | 4     | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                 | 13   |
| 4           | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Long Pahangai | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara                             | 1     | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | PKSN Long Pahangai | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP 2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>                                     |   |       |       |         |      |        |      |      |                    |  |
| 1           | Bimtek pengolahan bahan makanan berbasis lokal bagi wirausaha baru                        | Jumlah bimtek pengolahan bahan makanan berbasis lokal bagi wirausaha baru yang terlaksana | 20    | IKM   | -       | 20   | -      | -    | -    | Kab. Mahakam Ulu   | Kementerian Perindustrian                                    |
| 2           | Program penyelenggaraan/ revitalisasi pasar rakyat  | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi  | 1     | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Maratua       | Kementerian Perdagangan                                      |
| <b>KP 3</b> | <b>PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS</b>  |   |       |       |         |      |        |      |      |                    |  |
| 1           | Pembangunan Jalan Long Bagun-Tering   | Panjang ruas jalan yang dibangun  | 36,52 | Km    | 7,32    | 8,2  | 7      | 7    | 7    | Kab. Mahakam Ulu   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.  | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | LOKASI             | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|-------|-------|---------|-------|--------|------|------|--------------------|---|
|     |  |   |       |       | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |                    |   |
| 1   | 2  | 3   | 4     | 5     | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 12                 | 13  |
| 2   | Pengembangan Bandar Udara Maratua  | Jumlah bandar udara yang dikembangkan               | 1     | Paket | -       | 1     | -      | -    | -    | Kec. Maratua       | Kementerian Perhubungan   |
| 3   | Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Long Pahangai-Datah Suling    | Panjang jalan desa strategis yang terbangun         | 0,514 | Km    | -       | 0,514 | -      | -    | -    | Kec. Long Pahangai | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 4   | Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Jl. Tanjung Bahaba-Tugu Merah | Panjang jalan desa strategis yang terbangun         | 1     | Km    | -       | 1     | -      | -    | -    | Kec. Long Pahangai | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 5   | Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang                               | Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) yang terbangun | 1     | Unit  | -       | 1     | -      | -    | -    | Kec. Long Pahangai | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 6   | Pengadaan sarana transportasi darat  | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia      | 1     | Unit  | -       | 1     | -      | -    | -    | Kec. Maratua       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|-------|--------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |   |       |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4     | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 7   | Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir | 16    | Lokasi | -       | 16   | -      | -    | -    | Kec. Long Pahangai, Kec. Maratua, Kec. Long Apari | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| 8   | Pembangunan Jalan Tiong Ohang-Long Apari    | Panjang jalan yang dibangun   | 23,7  | Km     | -       | -    | 6      | 8    | 9,7  | Kec. Long Apari                                   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 9   | Pembangunan Jalan Batas Kalbar-Tiong Ohang  | Panjang jalan yang dibangun   | 20    | Km     | 2       | 5    | 3      | 5    | 5    | Kec. Long Apari                                   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 10  | Pembangunan Jalan Tiong Ohang Long Pahangai | Panjang jalan yang dibangun   | 28,64 | Km     | 13,64   | 6,0  | 3,0    | 3,0  | 3,0  | Kec. Long Apari                                   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 11  | Pembangunan Jalan Long Pahangai-Long Boh    | Panjang jalan yang dibangun   | 21,5  | Km     | 4,5     | 5,0  | 3,0    | 4,5  | 4,5  | Kec. Long Apari                                   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                           | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------------------------------|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                  |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                               | 13   |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b> |   |      |       |         |      |        |      |      |                                  |  |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa                      | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 5    | Unit  | -       | -    | 1      | 2    | 2    | Prov. Kalimantan Timur           | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah          | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 10   | Paket | 2       | 2    | 2      | 2    | 2    | Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau     | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 3               | Bantuan Sosial Pemerintah                              | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau     | Kementerian Sosial                                 |
| 4               | Pembangunan jaringan distribusi listrik                | Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun                               | 7    | Paket | 3       | -    | 1      | 3    | -    | PKSN Long Pahangai, Kec. Maratua | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                    | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                       |
|-----------------|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---------------------------|--|
|                 |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                           |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                        | 13   |
| <b>VII</b>      | <b>PROVINSI KALIMANTAN<br/>UTARA</b>  |  |      |       |         |      |        |      |      |                           |  |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN<br/>PERBATASAN NEGARA</b>   |  |      |       |         |      |        |      |      |                           |  |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis<br>Peninjauan Kembali Kawasan<br>Perbatasan Negara di Pulau<br>Kalimantan  | Jumlah Materi Teknis<br>Peninjauan Kawasan<br>Strategis Nasional | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Kalimantan<br>Utara | Kementerian<br>Agraria dan Tata<br>Ruang/Badan<br>Pertanahan<br>Nasional |
| 2               | Penyusunan Materi Teknis<br>Peninjauan Kembali Kawasan<br>Perbatasan Negara di Provinsi<br>Sulawesi Utara, Gorontalo,<br>Sulawesi Tengah, Kalimantan<br>Timur, dan Kalimantan Utara | Jumlah Materi Teknis<br>Kawasan Strategis Nasional               | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Kalimantan<br>Utara | Kementerian<br>Agraria dan Tata<br>Ruang/Badan<br>Pertanahan<br>Nasional |
| 3               | Penyusunan Materi Teknis<br>Kawasan Perbatasan Negara<br>Tarakan  | Jumlah Materi Teknis<br>Kawasan Perbatasan Negara                | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Tarakan              | Kementerian<br>Agraria dan Tata<br>Ruang/Badan<br>Pertanahan<br>Nasional |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|---|------|------------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|                 |  |   |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 4               | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Nunukan, Sei Pancang, Long Nawang, Long Midang, Tou Lumbis-Labang, Sei Manggaris | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara | 6    | Paket      | 2       | -    | 3      | 1    | -    | PKSN Nunukan, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Sei Manggaris, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional      |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>  |   |      |            |         |      |        |      |      |   |   |
| 1               | Bimtek 20 Wirausaha Baru IKM pengelasan dan sertifikasi kompetensi SKKNI   | Jumlah bimtek yang terlaksana                                 | 20   | IKM        | -       | 20   | -      | -    | -    | Kab. Nunukan  | Kementerian Perindustrian   |
| 2               | Revitalisasi Sentra IKM Garam  | Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi                         | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Nunukan  | Kementerian Perindustrian   |
| 3               | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan Desa   | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes                         | 10   | BUMDes     | -       | -    | 3      | 5    | 2    | Kab. Malinau, Kab. Nunukan  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR   | VOL. | SAT.        | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|-------------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5           | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 4   | Pembangunan gedung/Depo Non-SRG                            | Jumlah gedung/Depo Non-SRG yang terbangun   | 1    | Unit        | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Nunukan  | Kementerian Perdagangan                            |
| 5   | Penyediaan Jasa Logistik sektor perdagangan                | Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan   | 10   | Paket       | -       | -    | 10     | -    | -    | PKSN Nunukan  | Kementerian Perdagangan                            |
| 6   | Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan     | Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya | 240  | Ha          | 48      | 48   | 48     | 48   | 48   | PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis | Kementerian Pertanian                              |
| 7   | Pengembangan Aplikasi Informatika UMKM <i>Go Online</i>    | Jumlah <i>user</i> aktif <i>selling</i> UMKM  | 250  | <i>User</i> | -       | -    | -      | -    | 250  | PKSN Nunukan  | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| 8   | Pengembangan Aplikasi Informatika Nelayan <i>Go Online</i> | Jumlah <i>user</i> aktif nelayan yang mendaftar   | 250  | <i>User</i> | -       | -    | -      | -    | 250  | PKSN Nunukan  | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| 9   | Pengembangan Aplikasi Informatika Petani <i>Go Online</i>  | Jumlah <i>user</i> aktif petani yang mendaftar  | 250  | <i>User</i> | -       | -    | -      | -    | 250  | PKSN Nunukan  | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 10  | BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes                      | 39   | Desa  | -       | -    | -      | -    | 39   | PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Nunukan | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 11  | Pengembangan Desa Digital (P3PD)                              | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital | 24   | Desa  | -       | 6    | 6      | 6    | 6    | PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis               | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 12  | Pengadaan kapal perikanan tangkap                             | Pengadaan kapal perikanan tangkap                          | 9    | Paket | -       | -    | -      | 9    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)                               | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |
| 13  | Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap              | Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap           | 43   | Unit  | -       | -    | -      | 43   | -    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)                               | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |
| 14  | Alat Bantu Penangkapan Ikan (Cool Box)                        | Alat Bantu Penangkapan Ikan (Cool Box)                     | 100  | Unit  | -       | -    | -      | -    | 100  | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)                               | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |
| 15  | Pengadaan keramba jaring apung                                | Tersedianya keramba jaring apung                           | 2    | Paket | -       | -    | -      | 2    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)                               | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 16  | Penyediaan bibit unggul   | Penyediaan bibit unggul   | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)   | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |
| 17  | Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan pembudi daya ikan | Tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan pembudi daya ikan | 3    | Paket | -       | -    | -      | 3    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)   | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |
| 18  | Peningkatan atau penyediaan sarana dan prasarana budi daya ( <i>Marine Technopark</i> )                           | Jumlah sarana dan prasarana budi daya yang ditingkatkan   | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)   | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |
| 19  | Pengadaan <i>Cold Storage</i>   | Jumlah <i>Cold Storage</i> yang tersedia  | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Sebatik Utara)   | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |
| 20  | Bimtek pengembangan pariwisata  | Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata  | 7    | Paket | -       | 1    | -      | 6    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan, Kec. Sebatik Utara), Kec. Kayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Sebatik | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI              | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|---|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|---------------------|--|
|                 |   |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                     |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                  | 13   |
| 21              | Pembangunan pabrik pengolahan ( <i>Miniplant</i> ) pengolahan rumput laut menjadi agar-agar dan karagenan | Jumlah pabrik pengolahan rumput laut yang terbangun                | 2    | Kelompok | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Sebatik Tengah | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 22              | Pengembangan SKPT (pengolahan lanjutan)   | Jumlah SKPT (pengolahan lanjutan) yang dikembangkan                | 1    | Unit     | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Sebatik Timur  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 23              | Pembangunan/peningkatan sarana prasarana potensi wisata (hutan alam darat, mangrove dan pantai)           | Jumlah sarana prasarana potensi wisata yang terbangun/ditingkatkan | 2    | Paket    | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Sebatik        | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 24              | Alat tangkap dan alat bantu penangkapan untuk kapal berukuran <3 GT                                       | Jumlah alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang tersedia       | 1    | Paket    | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Sebatik        | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>  |  |      |          |         |      |        |      |      |                     |  |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 214 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |   |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 1   | Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Simp. Kanan II Jl. Panamas menuju kantor Kelurahan Mansapa | Panjang ruas jalan yang terbangun   | 1,41 | Km     | -       | 1,41 | -      | -    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 2   | Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Simp. Kanan I Jl. Ujang Dewa menuju Membunut Dalam         | Panjang ruas jalan yang terbangun   | 0,87 | Km     | -       | 0,87 | -      | -    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 3   | Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS   | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir | 152  | Lokasi | -       | 152  | -      | -    | -    | PKSN Long Nawang (Kec. Kayan Hulu), PKSN Long Midang (Kec. Krayan), PKSN Tau Lumbis (Lumbis Ogong), Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Selatan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Seimanggaris, Kec. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                         |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     |   |  |      |       |         |      |        |      |      | Tulin Onsoi, Kec.<br>Krayan Tengah, Kec.<br>Krayan Barat |  |
| 4   | Peningkatan/Pemantapan<br>Bandar Udara Long Apung   | Jumlah bandar udara yang<br>ditingkatkan   | 1    | Paket | 1       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Krayan Selatan                                      | Kementerian<br>Perhubungan   |
| 5   | Pembangunan dan peningkatan<br>jalan desa strategis pada ruas<br>jalan menuju Rumah Sakit<br>Pratama Long Apung | Panjang ruas jalan yang<br>terbangun   | 1,12 | Km    | -       | 1,12 | -      | -    | -    | Kec. Kayan Selatan                                       | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 6   | Pengadaan sarana transportasi<br>darat  | Jumlah sarana transportasi<br>darat yang tersedia                                  | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kayan Hulu  | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 7   | Pembangunan dermaga rakyat<br>(sungai/danau) untuk orang<br>dan barang  | Jumlah dermaga rakyat<br>(sungai/danau) untuk<br>orang dan barang yang<br>dibangun | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Pujungan  | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                     | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------------------------|---|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                            |   |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                         | 13  |
| 8               | Penggantian dan renovasi jembatan gantung              | Jumlah jembatan gantung yang diganti dan direnovasi (bentang maksimal 120 M)    | 120  | M     | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Lumbis Ogong          | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b> |   |      |       |         |      |        |      |      |                            |   |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa                      | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 4    | Unit  | -       | -    | 1      | 1    | 2    | Prov. Kaltara              | Kementerian Dalam Negeri  |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah          | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 10   | Paket | 2       | 2    | 2      | 2    | 2    | Kab. Malinau, Kab. Nunukan | Kementerian Dalam Negeri  |
| 3               | Bantuan Sosial Pemerintah                              | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Malinau, Kab. Nunukan | Kementerian Sosial  |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.    | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|---------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |  |   |      |         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5       | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 4   | Satuan pemukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas          | Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas | 1    | Kawasan | -       | -    | 1      | 1    | 1    | Kab. Nunukan   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 5   | Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana nya dikembangkan dan fungsional | Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas  | 1    | Kawasan | 1       | -    | 1      | 1    | 1    | Kab. Nunukan   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 6   | Kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya                              | Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas  | 1    | Kawasan | 1       | -    | 1      | -    | 1    | Kab. Nunukan   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 7   | Pembangunan balai pertemuan umum kecamatan   | Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun   | 4    | Unit    | -       | -    | 2      | 2    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Sebatik Utara), Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Sebatik Timur | Kementerian Dalam Negeri  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 8   | Renovasi Gedung Puskesmas Data Dian dan Long Nawang  | Jumlah gedung puskesmas yang direnovasi             | 2    | Unit     | -       | 2    | -      | -    | -    | PKSN Long Nawang (Kec.Kayan Hulu),<br>Kec. Kayan Hilir                                    | Kementerian Kesehatan                              |
| 9   | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan  | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan   | 2    | Paket    | -       | -    | -      | 2    | -    | PKSN Tou Lumbis (Kec. Lumbis Ogong).  | Kementerian Kesehatan                              |
| 10  | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling  | Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas keliling | 1    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | -    | PKSN Tou Lumbis (Kec. Lumbis Ogong)   | Kementerian Kesehatan                              |
| 11  | Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana | Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi             | 3    | Unit     | -       | -    | -      | 1    | 2    | PKSN Long Nawang,<br>PKSN Long Midang,<br>PKSN Tou Lumbis                                 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 12  | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga  | Jumlah penyalur BBM yang difasilitasi/ditingkatkan  | 41   | Penyalur | -       | 8    | 8      | 8    | 17   | PKSN Long Midang,<br>PKSN Long Nawang,<br>PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, Kec. Kayan Hilir | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 13  | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana-prasarana dan alat kesehatan) | Pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan | 4    | Paket | -       | 4    | -      | -    | -    | PKSN Nunukan (Kec. Sebatik Utara), Kec. Sebatik Timur | Kementerian Kesehatan                              |
| 14  | Rehabilitasi bangunan kantor desa   | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi                            | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Krayan Selatan                                   | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 15  | Pembangunan gedung Puskesmas Long Pujungan  | Jumlah gedung puskesmas yang terbangun                            | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Pujungan   | Kementerian Kesehatan                              |
| 16  | Penyediaan IPAL Puskesmas   | Tersedianya IPAL Puskesmas  | 3    | Paket | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Bahau Hulu      | Kementerian Kesehatan                              |
| 17  | Penyediaan IPAL RS Pratama Long Apung   | Tersedianya IPAL RS Pratama Long Apung                            | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kayan Selatan                                    | Kementerian Kesehatan                              |
| 18  | Pembangunan Puskesmas Long Ampung   | Jumlah puskesmas yang dibangun                                    | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kayan Selatan                                    | Kementerian Kesehatan                              |
| 19  | Pengadaan alat kesehatan RS Pratama Long Ampung dan RS Pratama                                    | Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang tersedia                   | 2    | Paket | -       | 1    | -      | 1    | -    | Kec. Krayan Selatan                                   | Kementerian Kesehatan                              |
| 20  | Penyediaan solar cell Puskesmas   | Tersedianya solar cell Puskesmas                                  | 6    | Unit  | -       | 6    | -      | -    | -    | Kec. Kayan Selatan                                    | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 21  | Penyediaan Pengolahan limbah padat Puskesmas  | Tersedianya Pengolahan limbah padat Puskesmas     | 6    | Unit  | -       | 6    | -      | -    | -    | Kec. Kayan Selatan  | Kementerian Kesehatan                              |
| 22  | Kalibrasi alat kesehatan Puskesmas            | Tersedianya Kalibrasi alat kesehatan Puskesmas    | 6    | Unit  | -       | 6    | -      | -    | -    | Kec. Kayan Selatan  | Kementerian Kesehatan                              |
| 23  | Pembangunan Rumah Dinas Medis Puskesmas Lapri | Tersedianya Rumah Dinas Medis Puskesmas Lapri     | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Sebatik Barat  | Kementerian Kesehatan                              |
| 24  | Pengadaan sarana dan perlengkapan Puskesmas   | Pengadaan sarana dan perlengkapan puskesmas       | 3    | Paket | -       | -    | -      | 3    | -    | Kec. Krayan Tengah,<br>Kec. Krayan Timur,<br>Kec. Krayan Barat                | Kementerian Kesehatan                              |
| 25  | Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas           | Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas               | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Krayan Tengah  | Kementerian Kesehatan                              |
| 26  | Pengadaan Puskesmas Keliling roda empat       | Pengadaan Puskesmas Keliling roda empat           | 12   | Unit  | -       | -    | -      | 12   | -    | Kec. Krayan timur   | Kementerian Kesehatan                              |
| 27  | Pengadaan Puskesmas Keliling roda dua         | Pengadaan Puskesmas Keliling roda dua             | 12   | Unit  | -       | -    | -      | 12   | -    | Kec. Krayan timur   | Kementerian Kesehatan                              |
| 28  | Pembangunan jaringan distribusi listrik       | Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun | 33   | Paket | -       | 10   | 21     | 2    | -    | Kec. Lumbis Ogong,<br>Kec. Krayan Timur,<br>Kec. Krayan Barat,<br>Kec. Krayan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-------------|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|             |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1           | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 29          | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya   | Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun         | 7    | Unit  | -       | -    | 1      | 2    | 4    | Kec. Krayan, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Sei Menggaris | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN               |
| <b>VIII</b> | <b>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| <b>KP 1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| 1           | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur     | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional               | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Nusa Tenggara Timur                          | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2           | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Atambua, Kalabahi, Kefamenanu | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara | 3    | Paket | 1       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Atambua, PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu       | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|---|---|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|                 |   |   |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1               | 2   | 3   | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 3               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Turiskain, Haumeni Ana   | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara                | 2    | Paket      | -       | -    | -      | 2    | -    | Kec. Raihat, Kec. Bikomi Nilulat   | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 4               | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Motaain, Motamasin, Wini, Oepoli, Napan | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara | 5    | Paket      | 3       | -    | -      | 2    | -    | Kec. Tasifeto Timur, Kec. Kobalima Timur, Kec. Insana Utara, Kec. Amfoang Timur, Kec. Bikomi Utara | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>   |   |      |            |         |      |        |      |      |  |  |
| 1               | Pendampingan IK Logam dan Mesin di Kota Kupang dan Kab. Kupang  | Jumlah pendampingan yang terlaksana                           | 12   | IKM        | -       | 12   | -      | -    | -    | Kab. Kupang  | Kementerian Perindustrian                                    |
| 2               | Revitalisasi Sentra IKM   | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi                         | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kota Kupang  | Kementerian Perindustrian                                    |
| 3               | Revitalisasi Sentra IKM Gula Lontar   | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi                         | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Rote Ndao   | Kementerian Perindustrian                                    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |  |  |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 4   | Revitalisasi Sentra IKM Pande Besi   | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi  | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Sabu Raijua                               | Kementerian Perindustrian   |
| 5   | Revitalisasi Sentra IKM Garam  | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi  | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Timur Tenga Utara                         | Kementerian Perindustrian   |
| 6   | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa                                 | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes  | 20   | BUMDes     | -       | -    | 11     | 2    | 7    | Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Alor, Kab. Kupang | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 7   | Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal                                  | Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal                                   | 300  | Orang      | -       | -    | 100    | 200  | -    | Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Kupang            | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 8   | Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di daerah tertinggal                           | Meningkatnya nilai tambah Prukades di daerah tertinggal                                    | 3    | Unit       | -       | -    | 1      | 1    | 1    | Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Kupang            | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 9   | Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana nya dikembangkan dan fungsional | Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas | 1    | Kawasan    | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kab. Timor Tengah Utara                        | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL.  | SAT.        | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                        | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|--|-------|-------------|---------|------|--------|------|------|-------------------------------|---|
|     |   |  |       |             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                               |   |
| 1   | 2   | 3  | 4     | 5           | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                            | 13  |
| 10  | Kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya           | Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas       | 1     | Kawasan     | 1       |      |        |      |      | Kab. Timor Tengah Utara       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 11  | Penyediaan moda kapal ternak  | Jumlah moda kapal ternak yang tersedia                     | 1     | Rute        | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | PKSN Atambua                  | Kementerian Perhubungan   |
| 12  | Penyedia jasa logistik sektor perdagangan yang diberikan pembinaan    | Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan              | 10    | Kegiatan    | 2       | 2    | 2      | 2    | 2    | PKSN Atambua                  | Kementerian Perdagangan   |
| 13  | Pembangunan industri pakan ternak ayam                                | Terselesalkannya pembangunan industri pakan ternak ayam    | 1     | Unit        | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Atambua                  | Kementerian Perindustrian   |
| 14  | Pengembangan Aplikasi Informatika UMKM <i>Go Online</i>               | Jumlah <i>user</i> aktif <i>selling</i> UMKM               | 500   | <i>User</i> | -       | -    | -      | -    | 500  | PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 15  | Pengembangan Aplikasi Informatika Petani dan Nelayan <i>Go Online</i> | Jumlah <i>user</i> aktif petani dan nelayan yang mendaftar | 1.000 | <i>User</i> | -       | 250  | 250    | 250  | 250  | PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--------------|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |              |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12           | 13   |
| 16  | Pelatihan vokasional  | Jumlah peserta pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya  | 100  | Orang | -       | -    | -      | -    | 100  | PKSN Atambua | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 17  | Pengadaan kendaraan traktor roda empat untuk komoditas jagung                       | Pengadaan kendaraan traktor roda untuk komoditas jagung  | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua | Kementerian Pertanian                              |
| 18  | Pengadaan kendaraan traktor roda untuk komoditas bawang merah                       | Pengadaan kendaraan traktor roda untuk komoditas bawang merah  | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua | Kementerian Pertanian                              |
| 19  | Pengembangan sarana industri alat mesin pertanian jagung                            | Jumlah sarana prasarana produksi pertanian jagung  | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua | Kementerian Pertanian                              |
| 20  | Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan   | Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan                          | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua | Kementerian Pertanian                              |
| 21  | Pelatihan penanganan penyakit ternak, teknologi produksi dan pembuatan pakan ternak | Jumlah pelatihan penanganan penyakit ternak, teknologi produksi dan pembuatan pakan ternak yang terlaksana | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua | Kementerian Pertanian                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                       | 13   |
| 22  | Pelatihan sistem agribisnis usaha tani ternak sapi   | Jumlah pelatihan sistem agribisnis usaha tani ternak sapi yang terlaksana   | 1    | Paket    | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua                             | Kementerian Pertanian                              |
| 23  | Pelatihan budi daya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan | Jumlah pelatihan budi daya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan yang terlaksana | 1    | Paket    | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua                             | Kementerian Pertanian                              |
| 24  | Pelatihan penanganan penyakit hama, teknologi produksi untuk komoditas jagung dan bawang merah     | Jumlah pelatihan mengenai penanganan penyakit hama untuk komoditas jagung dan bawang merah yang terlaksana                | 1    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua                             | Kementerian Pertanian                              |
| 25  | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat  | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi  | 2    | Unit     | -       | -    | 2      | -    | -    | PKSN Atambua (Pasar Sabete, Pasar Henes) | Kementerian Perdagangan                            |
| 26  | Pelaksanaan inseminasi buatan  | Jumlah inseminasi buatan yang terlaksana  | 1    | Akseptor | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu                          | Kementerian Pertanian                              |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 227 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|-----------------|--|
|     |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                 |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12              | 13   |
| 27  | Pelatihan penggemukan sapi dan kambing            | Jumlah pelatihan yang terlaksana untuk penggemukan sapi dan kambing                   | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pertanian                              |
| 28  | Pelatihan pembuatan pakan ternak sapi dan kambing | Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pakan ternak sapi dan kambing           | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pertanian                              |
| 29  | Pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong | Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pertanian                              |
| 30  | Fasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos   | Jumlah masyarakat yang difasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos              | 1    | Paket    | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pertanian                              |
| 31  | Pelatihan budi daya kambing                       | Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan budi daya kambing                          | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pertanian                              |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 228 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR                                      | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|-------------------|---|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |   |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13  |
| 32  | Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong                    | Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong     | 100  | Ekor  | -       | -    | -      | -    | 100  | PKSN Kefamenanu   | Kementerian Pertanian   |
| 33  | BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes          | 11   | Desa  | -       | -    | -      | -    | 11   | PKSN Kefamenanu   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 34  | Fasilitasi lahan garam  | Luas lahan garam yang difasilitasi             | 20   | Ha    | -       | -    | -      | -    | 20   | PKSN Kefamenanu   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |
| 35  | Pembangunan sarana niaga garam rakyat                         | Jumlah sarana niaga garam rakyat yang dibangun | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |
| 36  | Pengadaan Kapal Ikan 2 GT <i>Fiber Glass</i>                  | Tersedianya Kapal Ikan 2 GT <i>Fiber Glass</i> | 15   | Unit  | -       | 15   | -      | -    | -    | Kec. Alor Selatan | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |
| 37  | Pengadaan alat penangkapan ikan                               | Tersedianya alat penangkap ikan                | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Alor Selatan | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------------------|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                      |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                   | 13   |
| 38  | Pengadaan <i>speed boat</i> patroli                            | Tersedianya <i>speed boat</i> patroli                                     | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Alor Barat Daya | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 39  | Pengadaan 4 unit Kapal Ikan<br><i>Fiber Glass 7 GT</i>         | Jumlah kapal yang tersedia  | 4    | Unit  | -       | 4    | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 40  | Pengadaan sampan ketinting<br>kedap air dan kelengkapan        | Jumlah sampan ketinting<br>yang tersedia                                  | 32   | Unit  | -       | 32   | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 41  | Pembuatan lahan permanen<br>budi daya rumput laut air<br>dalam | Jumlah lahan permanen<br>budi daya rumput laut air<br>dalam yang tersedia | 16   | Lahan | -       | 16   | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 42  | Pengadaan sampan angkut<br>rumput laut                         | Jumlah sampan angkut<br>rumput laut yang tersedia                         | 32   | Unit  | -       | 32   | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 43  | Bantuan bibit rumput laut                                      | Jumlah bibit rumput laut<br>yang tersedia                                 | 8    | Paket | -       | 8    | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |       | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|-------|-------|---------|------|--------|------|-------|---|--|
|     |  |   |       |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024  |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4     | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10    | 12  | 13   |
| 44  | Pengadaan sarana budi daya rumput laut                   | Tersedianya sarana budi daya rumput laut                            | 365   | Paket | -       | -    | 25     | 100  | 240   | Kec. Rote Barat, Kec. Rote Timur, Kec. Lobalain, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya                  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 45  | Pembuatan gudang penyimpanan rumput laut dan kelengkapan | Jumlah gudang penyimpanan rumput laut dan kelengkapan yang tersedia | 8     | Unit  | -       | 8    | -      | -    | -     | Kec. Amfoang Timur  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 46  | Pengadaan <i>Gill Net</i>                                | Tersedianya <i>Gill Net</i>   | 1.655 | Unit  | -       | -    | -      | 300  | 1.355 | Kec. Landu Leko, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Barat, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 47  | Pengadaan alat tangkap jaring cumi                       | Tersedianya alat tangkap jaring cumi                                | 1.500 | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1.500 | Kec. Rote Timur, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 48  | Pengadaan kapal  | Tersedianya kapal   | 70    | Unit  | -       | -    | -      | 20   | 50    | Kec. Rote Barat, Kec. Rote Timur  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 49  | Pengadaan mesin kapal                                | Jumlah mesin kapal yang tersedia                               | 760  | Unit  | -       | -    | -      | 300  | 460  | Kec. Landu Leko, Kec. Rote Barat, Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain, Kec. Rote Timur | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 50  | Pengadaan <i>Cool Box</i>                            | Jumlah pengadaan <i>Cool Box</i> yang tersedia                 | 500  | Unit  | -       | -    | -      | 130  | 370  | Kec. Rote Timur, Kec. Rote Barat, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Lobalain   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 51  | Pembangunan tempat pelelangan ikan di Papela         | Jumlah tempat pelelangan ikan yang terbangun                   | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Rote Timur   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 52  | Penyediaan sarana pemasaran bergerak dan berinsulasi | Jumlah sarana pemasaran bergerak dan berinsulasi yang tersedia | 100  | Unit  | -       | -    | -      | 30   | 70   | Kec. Rote Barat, Kec. Rote Timur  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 53  | Pembangunan tambatan perahu                          | Tersedianya tambatan perahu                                    | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Rote Barat   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 232 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 54  | Pengadaan kapal >3 GT   | Jumlah kapal >3 GT yang tersedia                          | 30   | Unit     | -       | -    | 4      | 12   | 14   | Kec. Lobalain, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 55  | Pengadaan Perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan | Jumlah perahu/kapal penangkap ikan yang tersedia          | 30   | Unit     | -       | -    | 6      | 11   | 13   | Kec. Lobalain, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 56  | Pembinaan ekonomi kelompok pembudi daya   | Jumlah ekonomi kelompok pembudi daya yang terbina         | 65   | Kelompok | -       | -    | 5      | 10   | 50   | Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain, Kec. Rote Barat Daya | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 57  | Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap  | Jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap yang didampingi | 24   | Kelompok | -       | -    | -      | -    | 24   | Kec. Lobalain, Kec. Rote Barat Daya                    | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 58  | Peningkatan sarana usaha perdagangan  | Jumlah sarana usaha perdagangan yang ditingkatkan         | 10   | Unit     | -       | 10   | -      | -    | -    | Kec. Alor Selatan                                      | Kementerian Perdagangan                            |
| 59  | Peningkatan PMKM mitra binaan   | Jumlah PMKM mitra binaan yang ditingkatkan                | 25   | Kelompok | -       | 25   | -      | -    | -    | Kec. Alor Selatan                                      | Kementerian Perdagangan                            |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 233 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 60  | Pembangunan pasar mingguan rakyat                 | Jumlah pasar yang terbangun                            | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Pureman, Kec. Alor Selatan                                     | Kementerian Perdagangan                            |
| 61  | Pembangunan gudang komoditas pertanian            | Jumlah gudang komoditas pertanian yang terbangun       | 4    | Unit  | -       | 4    | -      | -    | -    | Kec. Alor Selatan, Kec. Pureman, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Mataru  | Kementerian Perdagangan                            |
| 62  | Peningkatan sarana usaha perdagangan              | Jumlah sarana usaha perdagangan yang ditingkatkan      | 40   | Unit  | -       | 40   | -      | -    | -    | Kec. Alor Selatan, Kec. Pureman, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Mataru    | Kementerian Perdagangan                            |
| 63  | Peningkatan sarana distribusi perdagangan (pasar) | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan | 2    | Paket | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Pureman, Kec. Alor Barat Daya                                  | Kementerian Perdagangan                            |
| 64  | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat             | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi       | 4    | Unit  | -       | -    | -      | 2    | 2    | Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Rote Selatan, Kec. Hawu Mehara | Kementerian Perdagangan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)   |
|-----|--|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|----------------------|--|
|     |  |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                      |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                   | 13   |
| 65  | Pembangunan<br><i>cottage/homestay</i>   | Jumlah <i>cottage/homestay</i><br>yang terbangun | 7    | Unit     | -       | 7    | -      | -    | -    | Kec. Alor Barat Daya | Kementerian<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi<br>Kreatif/Badan<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif |
| 66  | Pelatihan masyarakat bidang<br>(tata kelola destinasi<br>pariwisata, pelatihan<br>manajemen <i>homestay</i> , selam,<br>paralayang, pilihan, TIC, dan<br><i>supporting</i> ) | Jumlah pelatihan yang<br>terlaksana              | 1    | Kegiatan | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi<br>Kreatif/Badan<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif |
| 67  | Pengembangan Kawasan<br>Wisata Pantai dan Bahari di<br>Ds. Netemnanu Utara,<br>Netemnanu Selatan, Kifu,<br>Nunuanah dan P. Batek   | Jumlah kawasan wisata<br>yang terbangun          | 1    | Lokasi   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi<br>Kreatif/Badan<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR  | VOL.  | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |       | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|-------|-------|---------|------|--------|------|-------|--|--|
|     |   |  |       |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024  |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4     | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10    | 12   | 13   |
| 68  | Pelatihan perkoperasian                         | Jumlah pelatihan perkoperasian                         | 180   | Orang | -       | -    | -      | -    | 180   | Kec. Landu Leko  | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 69  | Kerja sama kemitraan usaha, kecil, dan menengah | Jumlah kerja sama kemitraan usaha, kecil, dan menengah | 10    | UMKM  | -       | -    | -      | -    | 10    | Kec. Landu Leko  | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 70  | Pelatihan kewirausahaan                         | Jumlah pelatihan kewirausahaan                         | 2720  | Orang | -       | -    | -      | -    | 1.020 | Kec. Landu Leko, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 71  | Pendataan dan identifikasi KUMKM                | Terlaksananya pendataan dan identifikasi KUMKM         | 1.250 | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1.250 | Kec. Landu Leko  | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 72  | Fasilitas pendirian akta notaris                | Jumlah fasilitas pendirian akta notaris                | 9     | Akta  | -       | -    | -      | -    | 9     | Kec. Landu Leko, Kec. Rote Barat Daya  | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 236 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR  | VOL.  | SAT.  | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|--|-------|-------|---------|-------|--------|------|------|---|---|
|                 |  |  |       |       | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1               | 2  | 3  | 4     | 5     | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 73              | Pelatihan perkoperasian                                | Jumlah pelatihan perkoperasian yang terlaksana                 | 180   | Orang | -       | -     | -      | -    | 180  | Kec. Rote Timur, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 |
| 74              | Pengadaan sarana produksi pertanian                    | Jumlah sarana produksi pertanian untuk LU II T+3 yang tersedia | 1     | Paket | 1       | -     | -      | -    | -    | Kec. Teluk Mutiara  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 75              | Pengembangan Desa Digital (P3PD)                       | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital     | 4     | Desa  | -       | 1     | 1      | 1    | 1    | Kec. Naibenu  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b> |  |       |       |         |       |        |      |      |   |   |
| 1               | Pembangunan Jalan Oepoli-Noelelo                       | Panjang ruas jalan yang dibangun                               | 18,38 | km    | -       | 18,38 | -      | -    | -    | Kab. Kupang   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL.  | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|-------|-------|---------|------|--------|------|------|-----------------|--|
|     |  |  |       |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                 |  |
| 1   | 2  | 3  | 4     | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12              | 13   |
| 2   | Pembangunan Jalan Noelelo-Oenaek   | Panjang ruas jalan yang dibangun                     | 12,1  | km    | -       | -    | 12,1   | -    | -    | Kab. Kupang     | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 3   | Pembangunan Jalan Oenaek-Saenam  | Panjang ruas jalan yang dibangun                     | 18,24 | km    | -       | -    | 13     | 5,24 | -    | Kab. Kupang     | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 4   | Pembangunan Jalan Motaain-Haliwen-Haikesak-Nualain-Latutus-Motamasin-(Motaain-Dafala-Laktutus-Motamasin) | Panjang ruas jalan yang dibangun                     | 37,8  | km    | 20      | 10   | 7,8    | -    | -    | Kab. Malaka     | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 5   | Pembangunan Terminal Motaain   | Jumlah terminal antarnegara yang dibangun            | 1     | Unit  | 1       |      | -      | -    | -    | PKSN Atambua    | Kementerian Perhubungan                            |
| 6   | Pengembangan Bandar Udara Haliwen Atambua  | Jumlah bandar udara yang direhabilitasi/dikembangkan | 1     | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | PKSN Atambua    | Kementerian Perhubungan                            |
| 7   | Pengembangan Pelabuhan Wini  | Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan     | 1     | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Perhubungan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|-------|--------|---------|------|--------|------|------|-----------------|---|
|     |  |   |       |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                 |   |
| 1   | 2  | 3   | 4     | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12              | 13  |
| 8   | Pembangunan Terminal Wini  | Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan            | 1     | Unit   | 1       |      | -      | -    | -    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Perhubungan   |
| 9   | Penyediaan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti Internet) | Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun                         | 1     | Lokasi | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Atambua    | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 10  | Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran di Desa Tukuneno                 | Terselesainya Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran               | 0,8   | Km     | -       | -    | 0,8    | -    | -    | PKSN Atambua    | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 11  | Pembangunan jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur       | Terbangunnya jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur | 0,6   | Km     | -       | -    | 0,6    | -    | -    | PKSN Atambua    | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 12  | Pembangunan Jalan Perbatasan Nusa Tenggara Timur                       | Panjang jalan yang dibangun                                       | 176,5 | Km     | 32,6    | 49,7 | 44,8   | 44,8 | 4,6  | PKSN Atambua    | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|-------|-------|---------|------|--------|------|------|-----------------|--|
|     |  |   |       |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                 |  |
| 1   | 2  | 3   | 4     | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12              | 13   |
| 13  | Penanganan jalan yang menghubungkan Atapupu-Oekusi (RDTL)  | Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan Atapupu-Oekusi (RDTL)  | 14,24 | Km    | -       | -    | 14,24  | -    | -    | PKSN Atambua    | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 14  | Penanganan jalan yang menghubungkan Kupang-RDTL, melalui Kupang-Timor Tengah Selatan (TTS)-Timor Tengah Utara (TTU)-Simpang (Sp.) Halilulik-Atambua-Atapupu-Motaain-RDTL | Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan Kupang-RDTL, melalui Kupang-TTS-TTU-Sp. Halilulik - Atambua - Atapupu - Motaain - RDTL di Kecamatan Tasifeto Barat | 1     | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Atambua    | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 15  | Pembangunan Jalan Saenam-Nunpo (Haumeniana)  | Panjang ruas jalan yang dibangun  | 14,8  | km    | -       | -    | 5      | 5    | 4,8  | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 16  | Pembangunan Jalan Nunpo (Haumeniana)-Inbate  | Panjang ruas jalan yang dibangun  | 9,6   | km    | -       | -    | 3,2    | 3,2  | 3,2  | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 240 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR                        | VOL.  | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI          | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|----------------------------------|-------|------|---------|------|--------|------|------|-----------------|--|
|     |  |                                  |       |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                 |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4     | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12              | 13   |
| 17  | Pembangunan Jalan Inbate-Faenake (Napan) | Panjang ruas jalan yang dibangun | 11,71 | km   | -       | -    | 4      | 4    | 3,71 | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 18  | Pembangunan Jalan Sp Amol-Manamas        | Panjang ruas jalan yang dibangun | 22,62 | km   | -       | -    | 8,3    | 8,2  | 6,12 | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 19  | Pembangunan Jalan Manamas-Wini           | Panjang ruas jalan yang dibangun | 11,89 | km   | -       | -    | 4      | 4    | 3,89 | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 20  | Pembangunan Jalan Akses PLBN Oepoli      | Panjang ruas jalan yang dibangun | 1,22  | km   | -       | -    | 1,22   | -    | -    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 21  | Pembangunan Jalan Akses PLBN Napan       | Panjang ruas jalan yang dibangun | 3,66  | km   | -       | -    | 3,66   | -    | -    | PKSN Kefamenanu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 241 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                                 | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |  |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 22  | Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan Ruas Jalan Desa Halibasar-Desa Badarai | Panjang ruas jalan desa yang ditingkatkan | 2    | Km   | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Wewiku  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 23  | Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan Ruas Jalan Desa Weoe-Desa Biris        | Panjang ruas jalan desa yang ditingkatkan | 1    | Km   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Wewiku  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 24  | Pembangunan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Desa Fahluka-Sp. Trans Kotun                     | Jumlah ruas jalan desa yang terbangun     | 1    | Km   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Malaka Tengah   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 25  | Pembangunan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Desa Harekaka-Lafaekulun                         | Panjang ruas jalan desa yang terbangun    | 1    | Km   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Malaka Tengah   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 26  | Pengadaan sarana transportasi darat  | Tersedianya sarana transportasi darat     | 26   | Unit | -       | 26   | -      | -    | -    | Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Sabu Liae, Kec. Sabu Timur, Kec. | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     |   |  |      |       |         |      |        |      |      | Hawu Mehara, Kec.<br>Alor Barat Daya, Kec.<br>Mataru, Kec. Alor<br>Timur, Kec. Teluk<br>Mutiara, Kec. Pantar<br>Tengah, Kec. Alor<br>Selatan, Kec.<br>Pureman, Kec.<br>Amfoang Timur, Kec.<br>Miomaffo Barat, Kec.<br>Insana Utara |  |
| 27  | Pembangunan fasilitas perawatan dan parkir RIB ( <i>Floating RIB Dock</i> )             | Jumlah fasilitas perawatan dan parkir RIB yang terbangun   | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian Perhubungan                            |
| 28  | Pengadaan pelampung Suar diameter 2,6 M ( <i>steel</i> ) lengkap dengan penjangkarannya | Jumlah pelampung Suar diameter 2,6 M ( <i>steel</i> ) lengkap dengan penjangkarannya yang tersedia | 5    | Unit  | -       | 5    | -      | -    | -    | Kec. Amfoang Timur   | Kementerian Perhubungan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|------|---------|------|--------|------|------|----------------------|---|
|     |  |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                      |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                   | 13  |
| 29  | Pembangunan Ruas Jalan Desa Halilulik-Buburlaran                 | Jumlah ruas jalan desa yang terbangun   | 1,65 | Km   | -       | 1,65 | -      | -    | -    | Kec. Tasifeto Barat  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 30  | Pembangunan Ruas Jalan Desa Beremuti-Dubesi-Talerun              | Jumlah ruas jalan desa yang terbangun   | 2    | Km   | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Nanaet Dubesi   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 31  | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Mbokak-Dasioen       | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 1    | Km   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Rote Barat Daya | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 32  | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Danoheo-Dete         | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 1,3  | Km   | -       | 1,3  | -      | -    | -    | Kec. Rote Barat Daya | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 33  | Peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Inaoe-Tolanamon | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 1    | Km   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Rote Selatan    | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI              | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|------|---------|------|--------|------|------|---------------------|---|
|     |   |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                     |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                  | 13  |
| 34  | Peningkatan ruas jalan Eahub-Kimadale   | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 2,5  | Km   | -       | 2,5  | -      | -    | -    | Kec. Rote Timur     | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 35  | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Tuaneo-Bunioen                                | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 2    | Km   | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Rote Barat     | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 36  | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Mokdale-Sanggaoen (SLB)                       | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 1,9  | Km   | -       | 1,9  | -      | -    | -    | Kec. Lobalain       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 37  | Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Daeurendale-Sipu                              | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 2,5  | Km   | -       | 2,5  | -      | -    | -    | Kec. Landu Leko     | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 38  | Pembangunan jalan desa strategis ruas Jalan Desa Eban Menuju Desa Satab dan Desa Fatuneno | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 4    | Km   | -       | 4    | -      | -    | -    | Kec. Miomaffo Barat | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL.   | SAT.   | CAPAIAN |        | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|--------|--------|---------|--------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |        |        | 2020    | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5      | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 39  | Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS  | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir                         | 34     | Lokasi | -       | 34     | -      | -    | -    | Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Pantar Tengah, Kec. Mutis, Kec. Landu Leko, Kec. Rote Timur, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Selatan, Kec. Raijua | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| 40  | Pembangunan pelabuhan penyeberangan Maritaing  | Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun  | 1      | Unit   | -       | -      | 1      | 1    | 1    | Kec. Alor Timur   | Kementerian Perhubungan                            |
| 41  | Penanganan jalan penghubung PLBN Motaain-Atapupu                                       | Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan PLBN Motaain-Atapupu                           | 238,66 | Km     | -       | 119,33 | 119,33 | -    | -    | PKSN Atambua  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 42  | Penanganan jalan dalam kota Atambua yang terhubung dengan Jalan simpang (Sp.) Haliluik | Terselesaikannya penanganan jalan dalam kota Atambua yang terhubung dengan Sp. Haliluik di Atambua. |        |        |         |        |        |      |      |   |  |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 246 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 43              | Penanganan ruas jalan Lalu-Turiskain                   | Terselesaikannya penanganan ruas jalan Lalu-Turiskain di Lasiolat, Raihat   | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | -    | PKSN Atambua  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 44              | Penanganan ruas jalan Fulur-Nualain-Henes              | Terselesaikannya penanganan ruas jalan Fulur-Nualain-Henes                  | 3,24 | Km    | -       | 3,24 | -      | -    | -    | PKSN Atambua  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b> |   |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa                      | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi                                      | 7    | Unit  | -       | 1    | 2      | 2    | 2    | Prov. NTT   | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah          | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran) | 30   | Paket | 6       | 6    | 6      | 6    | 6    | Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Malaka, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Sabu Raijua | Kementerian Dalam Negeri                           |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL.  | SAT.    | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|-------|---------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |   |   |       |         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4     | 5       | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 3   | Bantuan Sosial Pemerintah   | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah               | 100   | %       | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua | Kementerian Sosial  |
| 4   | Satuan pemukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas       | Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas   | 1     | Kawasan | -       | -    | -      | -    | 1    | Kab. Malaka   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 5   | Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL | Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi                        | 1.752 | Ha      | 1.752   | -    | -      | -    | -    | Kab. Malaka   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 6   | Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana dikembangkan dan fungsional  | Berkembangnya dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan transmigrasi prioritas | 1     | Kawasan | -       | -    | 1      |      |      | Kab. Malaka   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                        | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|------|---------|------|--------|------|------|-------------------------------|---|
|     |   |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                               |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                            | 13  |
| 7   | Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan  | Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan | 200  | KK   | -       | -    | 100    | -    | 100  | Kab. Malaka                   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 8   | Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat   | Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat            | 3    | Unit | -       | -    | 3      | -    | -    | PKSN Atambua                  | Kementerian Perdagangan   |
| 9   | Pembangunan Pasar Tipe B  | Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya   | 1    | Unit | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu               | Kementerian Perdagangan   |
| 10  | Pembangunan Pasar Tipe C  | Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya   | 1    | Unit | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Kefamenanu               | Kementerian Perdagangan   |
| 11  | Pembangunan Gudang/Depo Non-SRG   | Jumlah Gudang/Depo Non-SRG yang dibangun                          | 2    | Unit | -       | -    | 1      | -    | 1    | PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu | Kementerian Perdagangan   |
| 12  | Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola koperasi/keompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pascabencana | Jumlah pasar rakyat yang dibangun                                 | 2    | Unit | -       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.        | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|-------------|---------|------|--------|------|------|--------------|---|
|     |  |   |      |             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |              |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5           | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12           | 13  |
| 13  | Pengembangan jaringan distribusi listrik di Kawasan Perbatasan Motaain | Terselesaikannya Pengembangan jaringan distribusi listrik di Kawasan Perbatasan Motaain | 3    | Paket       | -       | -    | 3      | -    | -    | PKSN Atambua | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                        |
| 14  | Pembangunan SPBU di Motaain  | Terselesaikannya pembangunan SPBU di Motaain  | 1    | Unit        | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Atambua | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                        |
| 15  | Pembangunan embung teknis Desa Naekasa dan Desa Lookeu                 | Terselesaikannya Pembangunan embung teknis Desa Naekasa dan Desa Lookeu                 | 2    | Unit        | -       | -    | 2      | -    | -    | PKSN Atambua | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 16  | Pembangunan embung air baku di Kecamatan Lakmanen                      | Terselesaikannya pembangunan embung air baku di Kecamatan Lakmanen                      | 1    | Liter/detik | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Atambua | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |
| 17  | Pembangunan sumur bor air tanah dalam                                  | Terselesaikannya pembangunan sumur bor air tanah dalam                                  | 2    | Unit        | -       | -    | 2      | -    | -    | PKSN Atambua | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 18  | Pembangunan kantor kecamatan  | Jumlah kantor kecamatan yang dibangun                             | 4    | Unit  | -       | -    | -      | 2    | 2    | Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pantar Tengah, Kec. Alor Selatan, Kec. Malaka Tengah                          | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 19  | Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan  | Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun               | 6    | Unit  | -       | -    | -      | 3    | 3    | Kec. Malaka Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Naibanu, Kec. Landu Leko, Kec. Rote Selatan, Kec. Pantai Baru | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 20  | Pembangunan kantor desa/kelurahan   | Jumlah kantor desa/kelurahan yang dibangun                        | 2    | Unit  | -       | -    | 1      | 1    | -    | Kec. Bikomi Utara, Kec. Bikomi Tengah  | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 21  | Pembangunan Balai Pertemuan Umum Desa/Kelurahan   | Jumlah Balai Pertemuan Umum Desa/Kelurahan yang dibangun          | 2    | Unit  | -       | -    | 1      | 1    | -    | Kec. Bikomi Utara, Kec. Bikomi Tengah  | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 22  | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana-prasarana dan alat kesehatan) | Pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan | 25   | Paket | -       | 25   | -      | -    | -    | Kec. Alor Barat Daya, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Pantai baru, Kec. Hawu Mehara                             | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 23  | Pembangunan/peningkatan gedung RSUD Kalabahi   | Jumlah gedung rumah RSUD Kalabahi yang terbangun                         | 1    | Paket    | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Teluk Mutiara                                     | Kementerian Kesehatan                              |
| 24  | Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah RSUD Kalabahi   | Jumlah IPAL RSUD Kalabahi yang terbangun                                 | 1    | Unit     | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Teluk Mutiara                                     | Kementerian Kesehatan                              |
| 25  | Pembangunan rumah dinas Puskesmas  | Jumlah rumah dinas puskesmas yang terbangun                              | 2    | Unit     | 1       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Lamaknen  | Kementerian Kesehatan                              |
| 26  | Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) puskesmas perbatasan  | Jumlah Bantuan Operasional Kegiatan puskesmas perbatasan yang terlaksana | 4    | Paket    | -       | -    | -      | 4    | -    | Kec. Kobalima Timur                                    | Kementerian Kesehatan                              |
| 27  | Pembangunan puskesmas  | Jumlah puskesmas yang terbangun  | 3    | Unit     | -       | -    | -      | 2    | 1    | Kec. Rote Selatan, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima          | Kementerian Kesehatan                              |
| 28  | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang | Jumlah penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang vitamin A      | 15   | Kegiatan | -       | -    | -      | -    | 15   | Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     | vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya                            | dan kekurangan zat gizi mikro yang terlaksana                         |      |            |         |      |        |      |      |  |  |
| 29  | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi               | Jumlah masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi                | 15   | Kegiatan   | -       | -    | -      | -    | 15   | Kec. Rote Selatan,<br>Kec. Rote Barat Daya                   | Kementerian Kesehatan                              |
| 30  | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah                           | Jumlah vaksinasi bagi balita dan anak sekolah yang terlayani          | 40   | Kegiatan   | -       | -    | -      | -    | 40   | Kec. Rote Selatan,<br>Kec. Rote Barat Daya                   | Kementerian Kesehatan                              |
| 31  | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tropis terabaikan | Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan                    | 20   | Kegiatan   | -       | -    | -      | -    | 20   | Kec. Rote Barat Daya,<br>Kec. Lobalain                       | Kementerian Kesehatan                              |
| 32  | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular                   | Jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang terlaksana | 15   | Kegiatan   | -       | -    | -      | -    | 15   | Kec. Rote Selatan,<br>Kec. Rote Barat Daya,<br>Kec. Lobalain | Kementerian Kesehatan                              |
| 33  | Pemberian tambahan makanan dan vitamin                                     | Jumlah makanan dan vitamin yang tersedia                              | 110  | Desa/Paket | -       | -    | -      | -    | 110  | Kec. Rote Selatan  | Kementerian Kesehatan                              |
| 34  | Sosialisasi percepatan pencegahan <i>stunting</i>                          | Jumlah percepatan pencegahan <i>stunting</i> yang tersosialisasi      | 200  | Desa       | -       | -    | -      | -    | 200  | Kec. Rote Selatan,<br>Kec. Rote Barat Daya,<br>Kec. Lobalain | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 35  | Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik               | Jumlah pencegahannya penularan penyakit endemik/epidemik yang terlaksana  | 45   | Desa     | -       | -    | -      | -    | 45   | Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain   | Kementerian Kesehatan                              |
| 36  | Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | Jumlah surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah yang ditingkatkan | 30   | Kegiatan | -       | -    | -      | -    | 30   | Kec. Rote Barat Daya, Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain   | Kementerian Kesehatan                              |
| 37  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya                  | Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun                     | 2    | Unit     | -       | -    | 2      | -    | -    | Kec. Alor Selatan, Kec. Mataru   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |
| 38  | Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik                      | Jumlah jaringan distribusi listrik yang tersedia                          | 24   | Unit     | 10      | 6    | 5      | -    | 3    | Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Pureman | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |
| 39  | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga            | Jumlah jaringan listrik PLN yang tersedia                                 | 1    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Naibenu   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 254 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 40  | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD  | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi        | 402  | Ruang | -       | 34   | 114    | 125  | 129  | Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pureman, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Pantar Tengah, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Lasiolat, Kec. Raihat, Kec. Lamaknen, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Nanaet Dubesi, Kec. Naibenu, Kec. Bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Amfoang Timur | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 41  | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi | 122  | Ruang | -       | -    | 34     | 36   | 52   | Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Nanaet Dubesi, Kec.  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
|     |   |   |      |       |         |      |        |      |      | Tasifeto Barat, Kec.<br>Lamaknen Selatan,<br>Kec. Lamaknen, Kec.<br>Raihat, Kec. Lasiolat,<br>Kec. Tasifeto Timur,<br>Kec. Pantar Tengah,<br>Kec. Teluk Mutiara,<br>Kec. Alor Timur, Kec.<br>Mataru, Kec.<br>Pureman, Kec.<br>Alor Barat Daya, Kec.<br>Alor Selatan |   |
| 42  | Pembangunan/rehabilitasi<br>ruang kelas SMP | Jumlah ruang kelas yang<br>terbangun/direhabilitasi | 230  | Ruang | -       | 10   | 67     | 72   | 81   | Kec. Alor Barat Daya,<br>Kec. Pureman, Kec.<br>Mataru, Kec. Alor<br>Timur, Kec. Teluk<br>Mutiara, Kec. Pantar<br>Tengah, Kec. Tasifeto<br>Timur, Kec. Lasiolat,<br>Kec. Raihat, Kec.<br>Lamaknen, Kec.<br>Lamaknen Selatan,   | Kementerian<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan, Riset,<br>dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
|     |  |   |      |       |         |      |        |      |      | Kec. Amfoang Timur,<br>Kec. Miomaffo Barat,<br>Kec. Tasifeto Barat,<br>Kec. Bikomi Utara,<br>Kec. Naibenu   |   |
| 43  | Pembangunan/rehabilitasi<br>perpustakaan SMP | Jumlah ruang<br>perpustakaan yang<br>terbangun/direhabilitasi | 93   | Ruang | -       | 1    | 28     | 32   | 32   | Kec. Naibenu, Kec.<br>Bikomi Utara, Kec.<br>Tasifeto Barat, Kec.<br>Miomaffo Barat, Kec.<br>Amfoang Timur, Kec.<br>Lamaknen Selatan,<br>Kec. Lamaknen, Kec.<br>Raihat, Kec. Lasiolat,<br>Kec. Tasifeto Timur,<br>Kec. Pantar Tengah,<br>Kec. Teluk Mutiara,<br>Kec. Alor<br>Timur, Kec. Mataru,<br>Kec. Pureman, Kec.<br>Alor Barat Daya, Kec.<br>Alor Selatan, Kec.<br>Nanaet Dubesi | Kementerian<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan, Riset,<br>dan Teknologi |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 44  | Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMP | Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi | 71   | Ruang | -       | -    | 22     | 23   | 26   | Kec. Amfoang Timur, Kec. Nanaet Dubesi, Kec. Naibenu, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Alor Timur, Kec. Alor Selatan, Kec. Mataru, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pureman, Kec. Pantar Tengah, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Lamaknen | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 45  | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK    | Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi        | 58   | Ruang | -       | -    | 18     | 20   | 20   | Kec. Lamaknen, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pureman, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk   | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 258 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
|     |   |   |      |       |         |      |        |      |      | Mutiara, Kec. Pantar Tengah, Kec. Lasiolat, Kec. Naibenu, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barat   |  |
| 46  | Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMA/SMK | Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi | 45   | Ruang | -       | -    | 11     | 20   | 14   | Kec. Lamaknen, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Naibenu, Kec. Lasiolat, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pantar Tengah, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Tasifeto Barat, | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
|     |  |  |      |       |         |      |        |      |      | Kec. Bikomi Utara,<br>Kec. Amfoang Timur  |   |
| 47  | Pembangunan/rehabilitasi<br>laboratorium SMA/SMK | Jumlah ruang laboratorium<br>yang terbangun/<br>direhabilitasi | 66   | Ruang | -       | 2    | 17     | 24   | 23   | Kec. Bikomi Utara,<br>Kec. Alor Selatan, Kec.<br>Alor Barat Daya, Kec.<br>Pureman, Kec.<br>Mataru, Kec. Alor<br>Timur, Kec. Teluk<br>Mutiara, Kec. Pantar<br>Tengah, Kec. Tasifeto<br>Timur, Kec. Lasiolat,<br>Raihat, Kec.<br>Lamaknen, Kec.<br>Lamaknen Selatan,<br>Kec. Tasifeto Barat,<br>Kec. Naibenu, Kec.<br>Miomaffo Barat, Kec.<br>Amfoang Timur | Kementerian<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan, Riset,<br>dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                       |
|-----------------|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| <b>IX</b>       | <b>SULAWESI TENGAH</b>  |  |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN<br/>PERBATASAN NEGARA</b>   |  |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis<br>Peninjauan Kembali Kawasan<br>Perbatasan Negara di Provinsi<br>Sulawesi Utara, Gorontalo,<br>Sulawesi Tengah, Kalimantan<br>Timur, dan Kalimantan Utara | Jumlah Materi Teknis<br>Kawasan Strategis Nasional | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Sulawesi Tengah   | Kementerian<br>Agraria dan Tata<br>Ruang/Badan<br>Pertanahan<br>Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>   |  |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Bimtek Desain dan Finishing<br>Meubel Rotan   | Jumlah Bimtek yang<br>terlaksana                   | 20   | IKM   | -       | 20   | -      | -    | -    | Kab. Toli-toli  | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 2               | Program penyelenggaraan jalan<br>industri pengolahan ikan   | Jumlah industri pengolahan<br>ikan yang terbangun  | 3    | Unit  | -       | -    | 3      | -    | -    | Kec. Toli-toli Utara,<br>Kec. Dako Pamean,<br>Kec. Dampal Utara | Kementerian<br>Perindustrian   |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 261 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|                 |  |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 3               | Program penyelenggaraan industri pengolahan minyak atsiri  | Jumlah industri pengolahan minyak atsiri yang terbangun                                       | 5    | Unit   | -       | -    | 5      | -    | -    | Kec. Toli-toli Utara,<br>Kec. Dako Pamean,<br>Kec. Dampal Utara | Kementerian Perindustrian   |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>   |   |      |        |         |      |        |      |      |   |   |
| 1               | Penyelenggaraan subsidi angkutan laut perintis (trayek) di Pelabuhan Toli-Toli (Pelabuhan Singgah) | Penyelenggaraan subsidi angkutan laut perintis (trayek) yang terselenggara                    | 5    | Trayek | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kec. Toli-Toli Utara  | Kementerian Perhubungan   |
| 2               | Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS  | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir                   | 7    | Lokasi | -       | 7    | -      | -    | -    | Kec. Toli-Toli Utara,<br>Kec. Dampal Utara                      | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 3               | Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Sp. Galumpang-GIO KP 1                                 | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 2    | Km     | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Dako Pamean  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|-----------------------|---|
|                 |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                       |   |
| 1               | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                    | 13  |
| 4               | Pengadaan sarana transportasi darat   | Tersedianya sarana transportasi darat                                       | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Dampal Utara     | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 5               | Pengadaan Sarana transportasi perairan dibawah 20 GT dan/atau maksimal kapasitas 25 orang | Tersedianya sarana transportasi perairan                                    | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Dampal Utara     | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b>                                    |   |      |       |         |      |        |      |      |                       |   |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa   | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi                                      | 4    | Unit  | -       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Sulawesi Tengah | Kementerian Dalam Negeri  |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah   | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran) | 5    | Paket | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kab. Toli-Toli        | Kementerian Dalam Negeri  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                     | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 4   | Bantuan Sosial Pemerintah  | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah                           | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Toli-Toli                             | Kementerian Sosial                                 |
| 3   | Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan   | Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun   | 2    | Unit  | -       | -    | -      | 2    | -    | Kec. Toli-Toli Utara,<br>Kec. Dampal Utara | Kementerian<br>Dalam Negeri                        |
| 5   | Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dasar             | Jumlah puskesmas yang dibangun/direvitalisasi   | 3    | Unit  | -       | -    | 3      | -    | -    | Kec. Toli-Toli Utara,<br>Kec. Dako Pamean  | Kementerian<br>Kesehatan                           |
| 6   | Pengadaan sarana pendukung puskesmas (alat kesehatan, peralatan dan kendaraan operasional) | Jumlah sarana pendukung puskesmas yang tersedia   | 5    | Unit  | -       | -    | 5      | -    | -    | Kec. Toli-toli Utara                       | Kementerian<br>Kesehatan                           |
| 7   | Pengadaan sarana pendukung puskesmas   | Jumlah sarana pendukung puskesmas yang ditingkatkan (alat kesehatan, peralatan dan kendaraan operasional) | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Dako Pamean                           | Kementerian<br>Kesehatan                           |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 264 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|---|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|-------------------|--|
|                 |   |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13   |
| 8               | Pembinaan upaya promotif dan preventif kesehatan  | Jumlah kegiatan pembinaan upaya promotif dan preventif kesehatan yang terlaksana | 40   | Kegiatan | -       | -    | 40     | -    | -    | Kec. Dako Pamean  | Kementerian Kesehatan                              |
| 9               | Pembangunan jaringan distribusi listrik           | Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun                                | 1    | Paket    | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Dako Pamean  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |
| 10              | Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) | Jumlah tangki septik skala komunal (5-10 KK) yang terbangun                      | 7    | Unit     | -       | 7    | -      | -    | -    | Kec. Dampal Utara | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| <b>X</b>        | <b>PROVINSI GORONTALO</b>                         |  |      |          |         |      |        |      |      |                   |  |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>   |  |      |          |         |      |        |      |      |                   |  |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                                       | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------------------|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                      |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                   | 13   |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Gorontalo      | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Ilangata  | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara  | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Anggrek         | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>  |   |      |       |         |      |        |      |      |                      |  |
| 1               | Bimtek pengirisan dan sulaman karawo   | Jumlah Bimtek yang terlaksana                   | 20   | IKM   | -       | 20   | -      | -    | -    | Kab. Gorontalo Utara | Kementerian Perindustrian                                    |
| 2               | Pengadaan kapal pengawas perikanan   | Jumlah kapal pengawas perikanan yang tersedia   | 5    | Unit  | -       | -    | 1      | 2    | 2    | Kec. Anggrek         | Kementerian Kelautan dan Perikanan                           |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|----------------------|---|
|                 |  |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                      |   |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                   | 13  |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b> |   |      |        |         |      |        |      |      |                      |   |
| 1               | Pengadaan sarana transportasi darat                    | Tersedianya sarana transportasi darat                                       | 1    | Unit   | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Anggrek         | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 2               | Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS            | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir | 1    | Lokasi | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Anggrek         | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b> |   |      |        |         |      |        |      |      |                      |   |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa                      | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi                                      | 4    | Unit   | -       | 1    | 1      | 1    | 1    | Prov. Gorontalo      | Kementerian Dalam Negeri  |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah          | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran) | 5    | Paket  | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | Kab. Gorontalo Utara | Kementerian Dalam Negeri  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|----------------------|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                      |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                   | 13   |
| 3               | Bantuan Sosial Pemerintah  | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Gorontalo Utara | Kementerian Sosial                                 |
| 4               | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan                          | Pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan               | 2    | Paket | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Anggrek         | Kementerian Kesehatan                              |
| 5               | Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)- tematik penanggulangan kemiskinan | Jumlah tangki septik yang terbangun   | 7    | Unit  | -       | 7    | -      | -    | -    | Kec. Anggrek         | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| <b>XI</b>       | <b>PROVINSI SULAWESI UTARA</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |                      |  |
| <b>KP<br/>1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>                                      |   |      |       |         |      |        |      |      |                      |  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|------------------------------|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                              |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                           | 13   |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional               | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Sulawesi Utara         | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2               | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Tahuna, Melonguane   | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara | 2    | Paket | -       | -    | -      | 1    | 1    | PKSN Tahuna, PKSN Melonguane | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 3               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Karatung  | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara                | 1    | Paket | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Nanusa                  | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>  |   |      |       |         |      |        |      |      |                              |  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR                             | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                         |
|-----|--|---------------------------------------|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |                                       |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3                                     | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                     | 13   |
| 1   | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan Desa | Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes | 10   | BUMDes     | -       | -    | 10     | -    | -    | Kab. Kep. Talaud,<br>Kab. Kep. Sangihe | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 2   | Bimtek Pengolahan Ikan Bagi Wirausaha Baru               | Jumlah Bimtek yang terlaksana         | 25   | IKM        | -       | 25   | -      | -    | -    | Kab. Kep. Talaud                       | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 3   | Revitalisasi Sentra IKM                                  | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Kep. Talaud                       | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 4   | Bimtek Kerajinan Berbahan Baku Serat Abaka               | Jumlah Bimtek yang terlaksana         | 25   | IKM        | -       | 25   | -      | -    | -    | Kab. Kep. Sangihe                      | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 5   | Bimtek Kerajinan Berbahan Baku Rotan                     | Jumlah Bimtek yang terlaksana         | 25   | IKM        | -       | 25   | -      | -    | -    | Kab. Bolaang<br>Mongondow Utara        | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 6   | Bimtek Kerajinan Berbahan Baku Turunan Kelapa            | Jumlah Bimtek yang terlaksana         | 25   | IKM        | -       | 25   | -      | -    | -    | Kab. Siau<br>Tagulandang Biaro         | Kementerian<br>Perindustrian   |
| 7   | Bimtek Pengolahan Pala Bagi Wirausaha Baru               | Jumlah Bimtek yang terlaksana         | 20   | IKM        | -       | 20   | -      | -    | -    | Kab. Minahasa Utara                    | Kementerian<br>Perindustrian   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.              | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|-------------------|---------|------|--------|------|------|------------------------------|---|
|     |  |  |      |                   | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                              |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5                 | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                           | 13  |
| 8   | Sosialisasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai dalam rangka pengembangan ekonomi daerah perbatasan | Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai | 1    | Kegiatan          | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Melonguane              | Kementerian Keuangan  |
| 9   | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa   | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes  | 4    | Desa              | -       | -    | -      | 2    | 2    | PKSN Melonguane, PKSN Tahuna | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 10  | Pengembangan SKPT Talaud   | Jumlah SKPT yang dikembangkan  | 1    | Skala Kemandirian | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Melonguane              | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |
| 11  | Pembangunan Desa Digital (P3PD)  | Terbangunnya Desa Digital  | 5    | Desa              | -       | -    | -      | 2    | 3    | PKSN Melonguane, PKSN Tahuna | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 12  | Pengadaan kapal penangkap ikan 3-4 GT  | Jumlah kapal penangkap ikan 3-4 GT yang tersedia                                 | 27   | Unit              | -       | -    | -      | 27   | -    | Kec. Siau Barat              | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)   |
|-----|--|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|-------------------|--|
|     |  |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13   |
| 13  | Pembuatan Pengaman Pantai<br>( <i>Boulder</i> )        | Jumlah pengaman pantai<br>( <i>Boulder</i> ) yang terbangun    | 450  | Meter    | -       | -    | -      | 450  | -    | Kec. Siau Barat   | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan   |
| 14  | Pengadaan <i>Cold Storage</i>                          | Jumlah <i>Cold Storage</i> yang<br>tersedia                    | 1    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Pinogaluman  | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan   |
| 15  | Pengadaan alat pengering ikan                          | Jumlah alat pengering ikan<br>yang tersedia                    | 1    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Pinogaluman  | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan   |
| 16  | Pembangunan tambatan<br>perahu                         | Jumlah tambatan perahu<br>yang terbangun                       | 6    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 6    | Kec. Pinogaluman  | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan   |
| 17  | Pengembangan jaringan kerja<br>sama promosi pariwisata | Jaringan kerja sama<br>promosi pariwisata yang<br>dikembangkan | 1    | Kegiatan | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Nusa Tabukan | Kementerian<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi<br>Kreatif/Badan<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|                 |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1               | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>  |   |      |       |         |      |        |      |      |   |   |
| 1               | Pengembangan pelabuhan laut Tahuna  | Pengembangan/<br>Pembangunan<br>pelabuhan laut  | 1    | Unit  | 1       |      | -      | -    | -    | PKSN Tahuna   | Kementerian<br>Perhubungan  |
| 2               | Pengembangan Bandara Melonguane   | Jumlah bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/<br>dikembangkan | 1    | Paket | 1       |      | -      | -    | -    | PKSN Melonguane   | Kementerian<br>Perhubungan  |
| 3               | Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang | Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia   | 4    | Unit  | -       | 4    | -      | -    | -    | Kec. Kabaruan, Kec. Kendahe, Kec. Melonguane, Kec. Nanusa | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 4               | Pembangunan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Kampung Utaurano                             | Panjang ruas jalan desa strategis yang terbangun  | 1,2  | Km    | -       | 1,2  | -      | -    | -    | Kec. Tabukan Utara  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-------------|---|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|             |   |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1           | 2   | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 5           | Pembangunan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Mantehage Buhias | Panjang ruas jalan desa strategis yang terbangun                            | 2    | Km     | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Wori                                      | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 6           | Pengadaan sarana transportasi darat                               | Tersedianya sarana transportasi darat                                       | 4    | Unit   | -       | 4    | -      | -    | -    | Kec. Wori                                      | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 7           | Penyediaan Titik Lokasi dan Pembangunan BTS                       | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir | 9    | Lokasi | -       | 9    | -      | -    | -    | Kec. Nanusa, Kec. Kep. Marore                  | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| <b>KP 4</b> | <b>PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR</b>                    |   |      |        |         |      |        |      |      |  |   |
| 1           | Rehabilitasi bangunan kantor desa                                 | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi                                      | 10   | Unit   | -       | 2    | 2      | 3    | 3    | Prov. Sulawesi Utara                           | Kementerian Dalam Negeri  |
| 2           | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah                     | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah                               | 25   | Paket  | 5       | 5    | 5      | 5    | 5    | Kab. Talaud, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Siau | Kementerian Dalam Negeri  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     |   | (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)   |      |          |         |      |        |      |      | Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara   |  |
| 3   | Bantuan Sosial Pemerintah                         | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %        | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Kep. Talaud, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Siao Tangulandang Biaro, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, | Kementerian Sosial                                 |
| 4   | Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan        | Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun                             | 5    | Unit     | -       | -    | 2      | 1    | 2    | PKSN Tahuna (Kec. Tahuna Timur), Kec. Kep. Marore, Kec. Kendahe, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Wori                              | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 5   | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan                                  | 20   | Penyalur | -       | 4    | 4      | 8    | 4    | PKSN Melonguane, PKSN Tahuna   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 6   | Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan   | Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi | 100  | Unit  | -       | -    | -      | 100  | -    | PKSN Melonguane, PKSN Tahuna  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 7   | Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana | Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi                                     | 2    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Melonguane, PKSN Tahuna  | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 8   | Pembangunan jaringan distribusi listrik  | Jumlah jaringan distribusi listrik yang tersedia                            | 17   | Paket | 5       | 3    | 3      | 1    | 5    | PKSN Melonguane, Kec. Kabaruan, Kec. Tabukan Utara, Kec. Kendahe, Kec. Wori, Kec. Pinogaluman | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 9   | Pembangunan Kantor Desa/Kelurahan  | Jumlah Kantor Desa/Kelurahan yang dibangun                                  | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Siau Barat   | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 10  | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan  | Jumlah layanan kesehatan yang ditingkatkan                                  | 16   | Paket | -       | 16   | -      | -    | -    | Kec. Damau, Kec. Tahuna   | Kementerian Kesehatan                              |
| 11  | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas  | Jumlah Rumah Dinas Puskesmas yang terbangun                                 | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Damau  | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI             | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--------------------|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                    |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                 | 13   |
| 12  | Pembangunan Rumah Paramedis                 | Jumlah rumah paramedis yang terbangun                | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Tabukan Utara | Kementerian Kesehatan                              |
| 13  | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas           | Jumlah rumah dinas puskesmas yang terbangun          | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Nusa Tabukan  | Kementerian Kesehatan                              |
| 14  | Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Makalehi | Jumlah rumah sakit pratama di makalehi terbangun     | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Siau Barat    | Kementerian Kesehatan                              |
| 15  | Penyediaan alat kesehatan RS Pratama        | Jumlah alat kesehatan RS pratama yang tersedia       | 1    | Paket | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Siau Barat    | Kementerian Kesehatan                              |
| 16  | Pengembangan Puskesmas Desa Buko            | Jumlah Puskesmas Desa Buko yang dikembangkan         | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | Kec. Pinogaluman   | Kementerian Kesehatan                              |
| 17  | Pembangunan rumah dinas dokter dan perawat  | Jumlah rumah dinas dokter dan perawat yang terbangun | 8    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 8    | Kec. Pinogaluman   | Kementerian Kesehatan                              |
| 18  | Pengadaan mobil ambulans                    | Jumlah mobil ambulans yang tersedia                  | 2    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 2    | Kec. Pinogaluman   | Kementerian Kesehatan                              |
| 19  | Pengadaan alat kesehatan                    | Jumlah alat kesehatan yang tersedia                  | 2    | Paket | -       | -    | -      | -    | 2    | Kec. Pinogaluman   | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 277 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|             |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1           | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 20          | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya  | Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Kendahe   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN               |
| <b>XII</b>  | <b>PROVINSI MALUKU</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| <b>KP 1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>  |   |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| 1           | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Kepulauan Maluku      | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional       | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Maluku   | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2           | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Tapa, Wonreli, Tiakur, Benjina, Batu Goyang | Jumlah Materi Kawasan Perbatasan                      | 5    | Paket | -       | -    | 1      | 4    | -    | Kec. Pulau-Pulau Babar, Kec. Pulau-Pulau Terselatan, Kec. Pulau Lakor, Kec. Aru Tengah, Kec. Aru Selatan timur | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 278 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|--|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 3               | Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Tapa, Wonreli, Tiakur  | Jumlah Materi Kawasan Perbatasan   | 3    | Paket    | -       | -    | -      | 3    | -    | Kec. Pulau-Pulau Babar, Kec. Pulau-Pulau Terselatan, Kec. Pulau Lakor | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN<br/>NEGARA</b>  |  |      |          |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Pendidikan dan pelatihan pengolahan kelapa menjadi VCO kepada IKM dan pengadaan peralatan usaha  | Jumlah SDM yang mampu memproduksi VCO yang tersedia  | 1    | Kegiatan | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Maluku  | Kementerian Perindustrian                                    |
| 2               | Pelatihan pengolahan tempurung kelapa menjadi kerajinan, minyak asap cair, pupuk organik cair kepada IKM dan pengadaan peralatan usaha | Jumlah terciptanya SDM dalam IKM yang mampu mengolah tempurung kelapa menjadi produk yang lebih bernilai yang tersedia | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Maluku  | Kementerian Perindustrian                                    |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 279 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|--------------|--|
|     |  |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |              |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12           | 13   |
| 3   | Pendidikan dan pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi aneka kerajinan dan sabut kepala menjadi pupuk organik cair dan pengadaan peralatan usaha | Jumlah terciptanya SDM yang mampu mengolah sabut kelapa menjadi produk yang lebih bernilai | 1    | Kegiatan | -       | -    | -      | -    | 1    | Prov. Maluku | Kementerian Perindustrian                          |
| 4   | Bantuan peralatan industri pertukangan bagi IKM  | Jumlah bantuan peralatan industri yang terdistribusi                                       | 1    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Maluku | Kementerian Perindustrian                          |
| 5   | Pembangunan rumah produksi pengrajin minyak kayu putih   | Jumlah rumah pengrajin yang terbangun  | 1    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Maluku | Kementerian Perindustrian                          |
| 6   | Pembangunan rumah produksi pengrajin pandai besi   | Jumlah rumah pengrajin yang terbangun  | 1    | Paket    | -       | -    | -      | 1    | -    | Prov. Maluku | Kementerian Perindustrian                          |
| 7   | Pembangunan gedung industri kerajinan tangan   | Jumlah gedung industri kerajinan tangan  | 1    | Paket    | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Maluku | Kementerian Perindustrian                          |
| 8   | Pembangunan sarana-prasarana pendukung pengoperasian pabrik pengelolaan rumput laut  | Jumlah sarana-prasarana pendukung pengoperasian pabrik pengelolaan rumput laut             | 1    | Paket    | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Maluku | Kementerian Perindustrian                          |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.              | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------------------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |                   | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5                 | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 9   | Bimtek pemanfaatan pangan lokal menjadi aneka makanan dan minuman                                 | Jumlah Bimtek yang terlaksana   | 50   | IKM               | -       | 50   | -      | -    | -    | Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya                                     | Kementerian Perindustrian                          |
| 10  | SKPT Saumlaki yang mandiri  | Skala kemandirian SKPT  | 5    | Skala Kemandirian | -       | -    | -      | -    | 5    | PKSN Saumlaki  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 11  | Pelatihan teknis <i>vocational</i> wilayah perbatasan bagi pelaku UMKM (pencelupan dan pewarnaan) | Jumlah pelatihan teknis <i>vocational</i> wilayah perbatasan bagi pelaku UMKM | 180  | Orang             | -       | -    | 180    | -    | -    | PKSN Saumlaki (Kec. Tanimbar Utara), Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas            | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 12  | Pelatihan kewirausahaan   | Jumlah pelatihan kewirausahaan  | 240  | Orang             | -       | -    | 240    | -    | -    | PKSN Saumlaki (Kec. Tanimbar Utara), Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 13  | Pembangunan kapal penangkap ikan 5-10 GT  | Tersedianya kapal penangkap ikan  | 1    | Paket             | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Wetar   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR  | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 14  | Pembangunan sarana-prasarana budi daya rumput laut          | Tersedianya sarana-prasarana budi daya rumput laut   | 1    | Lokasi | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Wetar                                   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 15  | Pengadaan sarana penangkapan ikan dan alat tangkap          | Tersedianya sarana penangkapan ikan dan alat tangkap | 1    | Paket  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Wertamrian                              | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 16  | Pengadaan Kapal <i>Gill Net</i> (1,5 GT)                    | Jumlah kapal penangkap Ikan 1,5 GT tersedia          | 20   | Unit   | -       | 5    | 15     | -    | -    | Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan Barat | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 17  | Pembangunan <i>Cold Storage</i> 50 Ton                      | Jumlah <i>Cold Storage</i> 50 Ton yang terbangun     | 10   | Unit   | -       | -    | -      | 5    | 5    | Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan Barat | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 18  | Pembangunan pabrik es 10 Ton                                | Jumlah pabrik es 10 Ton yang terbangun               | 5    | Unit   | -       | -    | 5      | -    | -    | Kec. Kei Besar                               | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 19  | Pembangunan kapal penangkapan ikan 5 GT ( <i>Gill Net</i> ) | Jumlah kapal penangkapan ikan 5 GT yang tersedia     | 2    | Unit   | -       | -    | 2      | -    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur                   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR  | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|------|---------|------|--------|------|------|------------------------------|--|
|     |  |  |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                              |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                           | 13   |
| 20  | Pembangunan kapal purse seine 10 GT                        | Jumlah kapal purse seine 10 GT yang tersedia             | 3    | Unit | -       | -    | -      | 3    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 21  | Pengadaan kapal penangkap ikan <3 GT                       | Jumlah kapal penangkap ikan <3 GT yang tersedia          | 1    | Unit | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 22  | Pembangunan Cold Storage (30 Ton)                          | Jumlah Cold Storage (30 ton) yang terbangun              | 3    | Unit | -       | -    | -      | 3    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 23  | Pembangunan Pabrik Es (5 Ton)                              | Jumlah pabrik es (5 ton) yang terbangun                  | 3    | Unit | -       | -    | 3      | -    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 24  | Pembangunan Air Blast Freezer/ABF (Pembekuan Ikan) (3 Ton) | Jumlah ABF (pembekuan ikan) (3 ton) yang terbangun       | 3    | Unit | -       | -    | -      | -    | 3    | Kec. Kei Besar Utara Timur   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 25  | Pengadaan keramba jaring apung                             | Jumlah keramba jaring apung <i>aquatec</i> yang tersedia | 20   | Unit | -       | -    | 8      | 12   | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR  | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |  |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 26  | Pembangunan kapal ikan <i>pole and line</i> (20 GT) | Jumlah kapal <i>pole and line</i> 20 GT yang terbangun | 1    | Unit | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 27  | Pembangunan kapal ikan <i>pole and line</i> (30 GT) | Jumlah kapal <i>pole and line</i> 30 GT yang terbangun | 1    | Unit | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 28  | Pembangunan pabrik es 10 Ton                        | Jumlah pabrik es 10 Ton yang terbangun                 | 5    | Unit | -       | -    | -      | 5    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat  | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 29  | Pembangunan Gudang Non-SRG                          | Jumlah Gudang Non-SRG yang terbangun                   | 1    | Unit | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Mdonia Hiera   | Kementerian Perdagangan                            |
| 30  | Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat               | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi       | 6    | Unit | -       | -    | 2      | 4    | -    | Kec. Mdonia Hiera, Kec. Wetar, Kec. Wetar Timur, Kec. Wetar Barat, Kec. Kormomolin, Kec. Yaru | Kementerian Perdagangan                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                     | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 31  | Pembangunan Pasar  | Jumlah pasar yang terbangun  | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Pulau Masela                          | Kementerian Perdagangan                            |
| 32  | Pembangunan Gudang SRG   | Jumlah Gudang SRG yang terbangun   | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Selaru                                | Kementerian Perdagangan                            |
| 33  | Pembangunan/revitalisasi gedung produksi olahan enbal/ubi kayu di dalam sentra IKM Ohoi/Desa Weduar            | Jumlah gedung produksi olahan enbal/ubi kayu yang terbangun/direvitalisasi       | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan                     | Kementerian Perindustrian                          |
| 34  | Pembangunan sentra produksi terpadu di Desa Elat   | Jumlah terbangunnya sentra produksi kelapa terpadu                               | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar                             | Kementerian Perindustrian                          |
| 35  | Pembangunan/revitalisasi gedung produksi olahan sagu di dalam sentra IKM Ohoi/Desa Wulurat, Haar               | Jumlah gedung produksi olahan sagu yang terbangun/direvitalisasi                 | 2    | Paket | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Utara Timur | Kementerian Perindustrian                          |
| 36  | Pembangunan/revitalisasi gedung produksi olahan keripik keladi dan singkong di dalam sentra IKM Ohoi/Desa Waur | Jumlah gedung produksi olahan pertanian khusus umbi-umbian keladi yang terbangun | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar                             | Kementerian Perindustrian                          |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 285 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                     | 13  |
| 37  | Bantuan Peralatan olahan minyak atsiri (minyak lawang) di Ohoi/Desa Renfaan                                   | Jumlah peralatan bagi IKM minyak atsiri yang tersedia                | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur             | Kementerian Perindustrian   |
| 38  | Pembangunan/revitalisasi gedung produksi kerajinan logam/mas adat di dalam sentra IKM Ohoi/Desa Banda Elly    | Jumlah gedung produksi kerajinan logam yang terbangun/direvitalisasi | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur             | Kementerian Perindustrian   |
| 39  | Pembangunan/revitalisasi gedung produksi olahan ikan asin dan abon ikan di dalam sentra IKM di Ohoi/Desa Ngan | Jumlah gedung produksi olahan ikan asin dan abon ikan yang terbangun | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat           | Kementerian Perindustrian   |
| 40  | Pembangunan wisata gazebo pada objek  | Jumlah sarana dan prasarana terbangun                                | 97   | Unit  | -       | 15   | 30     | 34   | 18   | Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR                             | VOL.  | SAT.           | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|--|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |  |                                       |       |                | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3                                     | 4     | 5              | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                     | 13  |
| 41  | Pembangunan jalan setapak dalam objek wisata         | Jumlah sarana dan prasarana terbangun | 1.000 | M <sup>2</sup> | -       | 100  | 200    | 500  | 200  | Kec. Kei Besar Selatan                 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 42  | Pembangunan toilet dan ruang ganti pada objek wisata | Jumlah sarana dan prasarana terbangun | 8     | Unit           | -       | 2    | 2      | 3    | 1    | Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 43  | Pembangunan pondok wisata/bungalow                   | Jumlah sarana dan prasarana terbangun | 10    | Unit           | -       | 2    | 2      | 3    | 3    | Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR                                      | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|---|--|------|------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |   |  |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                     | 13  |
| 44  | Pengadaan perlengkapan pondok wisata/bungalow | Jumlah perlengkapan pondok wisata tersedia     | 10   | Set  | -       | 2    | 2      | 4    | 2    | Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 45  | Pembangunan <i>diving center</i>              | Jumlah sarana dan prasarana terbangun          | 3    | Unit | -       | 1    | 2      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 46  | Pengadaan peralatan <i>diving center</i>      | Jumlah peralatan <i>diving center</i> tersedia | 40   | Set  | -       | 6    | 9      | 16   | 9    | Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR                                | VOL.  | SAT.           | CAPAIAN |      | TARGET |       |      | LOKASI                                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|--|--|-------|----------------|---------|------|--------|-------|------|--|---|
|     |  |  |       |                | 2020    | 2021 | 2022   | 2023  | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3  | 4     | 5              | 6       | 7    | 8      | 9     | 10   | 12                                     | 13  |
| 47  | Pengadaan <i>glass bottom boat</i>           | Jumlah fasilitas pendukung yang tersedia | 2     | Unit           | -       | 2    | -      | -     | -    | Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 48  | Pembangunan jalan setapak dalam objek wisata | Jumlah sarana dan prasarana terbangun    | 3.000 | M <sup>2</sup> | -       | 500  | 700    | 1.000 | 800  | Kec. Kei Besar                         | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 49  | Pembangunan panggung kesenian                | Jumlah sarana dan prasarana terbangun    | 1     | Unit           | -       | 1    | -      | -     | -    | Kec. Kei Besar                         | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 50  | Fasilitas dana bergulir bagi Koperasi                                  | Jumlah fasilitas dana bergulir bagi koperasi                                    | 5    | Koperasi | -       | -    | 5      | -    | -    | Kec. Kormomolin   | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 |
| 51  | Pelatihan akuntansi dan laporan keuangan                               | Jumlah pelatihan perkoperasian  | 120  | Orang    | -       | -    | 120    | -    | -    | Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas  | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 |
| 52  | Bantuan permodalan bagi wirausaha pemula                               | Jumlah bantuan permodalan bagi wirausaha pemula                                 | 30   | WP       | -       | -    | 30     | -    | -    | Kec. Kormomolin, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 |
| 53  | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja               | Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang terlaksana | 1    | Kegiatan | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Selaru   | Kementerian Ketenagakerjaan                                       |
| 54  | Pengadaan alat pengolahan pascapanen produk unggulan daerah perbatasan | Jumlah pengadaan alat pengolahan pascapanen produk unggulan daerah perbatasan   | 1    | Paket    | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Selaru   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|--|---|------|------|---------|------|--------|------|------|---------------------------------------|---|
|                 |  |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                       |   |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                    | 13  |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>   |   |      |      |         |      |        |      |      |                                       |   |
| 1               | Pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar (status jalan provinsi) Ruas Elat Simpang Ngurdu-Fakoholat (panjang total 65,9 Km) | Panjang jalan yang dibangun   | 4    | Km   | -       | 4    | -      | -    | -    | Kab. Maluku Tenggara                  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |
| 2               | Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan  | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 8    | Km   | -       | -    | 4      | 4    | -    | Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kep. Aru | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 3               | Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Elat   | Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun   | 1    | Unit | 1       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Maluku Tenggara                  | Kementerian Perhubungan   |
| 4               | Pengembangan pelabuhan laut Saumlaki   | Jumlah pelabuhan laut yang dikembangkan   | 1    | Unit | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Saumlaki                         | Kementerian Perhubungan   |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 291 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR                                     | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                       | 13  |
| 5   | Pengembangan Bandara Saumlaki                | Jumlah bandara yang dikembangkan              | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | PKSN Saumlaki                            | Kementerian Perhubungan   |
| 6   | Pengembangan Bandar Udara Mathilda Batlayeri | Jumlah bandar udara yang dikembangkan         | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | PKSN Saumlaki (Kec. Wertamrian)          | Kementerian Perhubungan   |
| 7   | Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sermata  | Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun | 1    | Unit  | -       | 1    |        |      | -    | Kec. Mndona Hiera                        | Kementerian Perhubungan   |
| 8   | Pengembangan Bandar Udara Moa                | Jumlah bandar udara yang dikembangkan         | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Moa Lakor                           | Kementerian Perhubungan   |
| 9   | Pengembangan Pelabuhan Moa                   | Jumlah pelabuhan yang dikembangkan            | 1    | Unit  | 1       |      | -      | -    | -    | Kec. Moa Lakor                           | Kementerian Perhubungan   |
| 10  | Peningkatan/Pemantapan Bandar Udara Dobo     | Jumlah bandar udara yang ditingkatkan         | 1    | Unit  | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Pulau-Pulau Aru                     | Kementerian Perhubungan   |
| 11  | Pengadaan sarana transportasi darat          | Tersedianya sarana transportasi darat         | 3    | Unit  | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Wertamrian | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 12              | Penyediaan Titik Lokasi dan Pembangunan BTS            | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir | 92   | Lokasi | -       | 92   | -      | -    | -    | Kec. Pulau-Pulau Babar, Kec. Mndona Hiera, Kec. Pulau-Pulau Terselatan, Kec. Wetar, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Timur, Kec. Wetar Barat, Kec. Pulau Leti, Kec. Pulau Masela, Kec. Pulau Lakor, Kec. Moa Lakor, Kec. Kisar Utara, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Selaru, Kec. Wertamrian, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Yaru | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b> |   |      |        |         |      |        |      |      |   |  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 1   | Rehabilitasi bangunan kantor desa                                  | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 4    | Unit  | -       | -    | 1      | 1    | 2    | Prov. Maluku  | Kementerian Dalam Negeri  |
| 2   | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah                      | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 20   | Paket | 4       | 4    | 4      | 4    | 4    | Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kep. Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara | Kementerian Dalam Negeri  |
| 3   | Bantuan Sosial Pemerintah  | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kep. Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara | Kementerian Sosial  |
| 4   | Sarana dan Prasarana air bersih yang dibangun di daerah perbatasan | Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan               | 200  | KK    | -       | -    | -      | 200  | -    | Kab. Kep. Aru, Kepulauan Tanimbar (PKSN Saumlaki)                               | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 5   | Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan                         | Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun                             | 4    | Unit  | -       | -    | 2      | 1    | 1    | PKSN Saumlaki (Kec. Tanimbar Selatan), Kec. Aru Selatan Timur, Kec.             | Kementerian Dalam Negeri  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                       | 13   |
|     |   |   |      |          |         |      |        |      |      | Wertamrian, Kec. Kei Besar               |  |
| 6   | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga   | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan                              | 10   | Penyalur | -       | 2    | 2      | 2    | 4    | PKSN Saumlaki                            | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 7   | Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan  | Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi | 50   | Unit     | -       | -    | -      | -    | 50   | PKSN Saumlaki                            | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 8   | Pembangunan gedung Puskesmas  | Terbangunnya gedung puskesmas   | 2    | Unit     | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Wetar Utara, Kec. Kei Besar Selatan | Kementerian Kesehatan                              |
| 9   | Pembangunan baru Rumah Sakit Pratama  | Jumlah baru rumah sakit pratama yang terbangun                              | 1    | Unit     | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Wetar Barat                         | Kementerian Kesehatan                              |
| 10  | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan   | Pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan           | 7    | Paket    | -       | 7    | -      | -    | -    | Kec. Pulau Lakor                         | Kementerian Kesehatan                              |
| 11  | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana dan prasarana dan alat kesehatan) | Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan                          | 3    | Paket    | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Kisar Utara                         | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--------------------------------------|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                      |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                   | 13   |
| 12  | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | Jumlah sarana dan prasarana puskesmas dan jaringan tersedia yang ditingkatkan/diperbaiki | 6    | Paket | -       | -    | -      | -    | 6    | Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Sir-Sir | Kementerian Kesehatan                              |
| 13  | Pengadaan alat kesehatan Puskesmas  | Jumlah alat kesehatan puskesmas yang tersedia  | 3    | Paket | -       | -    | -      | -    | 3    | Kec. Sir-Sir                         | Kementerian Kesehatan                              |
| 14  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling                                   | Jumlah sarana dan prasarana puskesmas keliling   | 3    | Paket | -       | -    | -      | -    | 3    | Kec. Sir-Sir                         | Kementerian Kesehatan                              |
| 15  | Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas  | Jumlah Puskesmas yang dibangun/direhabilitasi  | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | Kec. Wertamrian                      | Kementerian Kesehatan                              |
| 16  | Pembangunan/relokasi gedung Puskesmas Larat Kei                                     | Jumlah Puskesmas Larat Kei yang terbangun  | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan               | Kementerian Kesehatan                              |
| 17  | Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 4 Puskesmas Larat Kei                             | Jumlah puskesmas keliling roda 4 puskesmas yang tersedia                                 | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan               | Kementerian Kesehatan                              |
| 18  | Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Elat dan Alat Kesehatan                          | Jumlah rumah sakit pratama yang terbangun  | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar                       | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|------------------------------|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                              |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                           | 13   |
| 19  | Pembangunan baru Puskesmas Watsin dan Ohoiel beserta alat kesehatan             | Jumlah gedung baru Puskesmas Watsin yang terbangun               | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar               | Kementerian Kesehatan                              |
| 20  | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Watsin, Mataholat dan Ohoiel         | Jumlah rumah dinas Puskesmas Pembantu yang terbangun             | 3    | Unit  | -       | 3    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar               | Kementerian Kesehatan                              |
| 21  | Pembangunan Baru Puskesmas Mataholat  | Jumlah gedung baru Puskesmas Mataholat yang terbangun            | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar               | Kementerian Kesehatan                              |
| 22  | Pembangunan/relokasi gedung puskesmas Banda Ely                                 | Jumlah puskesmas baru yang terbangun                             | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur   | Kementerian Kesehatan                              |
| 23  | Puskesmas perairan Hollat   | Jumlah puskesmas perairan yang terbangun                         | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur   | Kementerian Kesehatan                              |
| 24  | Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Puskesmas Hollat                          | Jumlah puskesmas keliling perairan yang tersedia                 | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Utara Timur   | Kementerian Kesehatan                              |
| 25  | Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas | Jumlah prasarana dan sarana kegiatan kesehatan yang dikembangkan | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat | Kementerian Kesehatan                              |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     | dan/atau pelayanan jasa medis Weduar Feer                          |  |      |       |         |      |        |      |      |  |  |
| 26  | Pengadaan puskesmas keliling perairan Kec. Kei Besar Selatan Barat | Jumlah puskesmas keliling Perairan yang tersedia                 | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat                               | Kementerian Kesehatan                              |
| 27  | Penyediaan Puskesmas perairan Desa Feer                            | Jumlah puskesmas perairan Fer yang tersedia                      | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat                               | Kementerian Kesehatan                              |
| 28  | Pembangunan Baru Pukesmas Desa Feer                                | Jumlah gedung baru Pukesmas Feer yang terbangun                  | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat                               | Kementerian Kesehatan                              |
| 29  | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Desa Feer                        | Jumlah rumah dinas Puskesmas Feer yang terbangun                 | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat                               | Kementerian Kesehatan                              |
| 30  | Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Puskesmas Desa Feer          | Jumlah puskesmas keliling perairan Puskesmas Feer yang terbangun | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Kec. Kei Besar Selatan Barat                               | Kementerian Kesehatan                              |
| 31  | Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik                            | Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun                | 46   | Paket | 15      | 1    | 14     | 16   | -    | Kec. Pulau-Pulau Aru, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Sir-Sir, | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 298 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     |   |   |      |      |         |      |        |      |      | Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Timur, Kec. Wetar, Kec. Tanimbar Utara                       |  |
| 32  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun | 17   | Unit | -       | -    | 11     | 6    | -    | Kec. Pulau-Pulau Aru, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Moa Lakor, Kec. Mndona Hiera, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Utara, Kec. P. Masela, | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                                    | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                 | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-------------|--|--|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|             |  |  |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1           | 2  | 3  | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                     | 13   |
|             |  |  |      |            |         |      |        |      |      | Kec. P. Leti, Kec. P. Lakor, Kec. Yaru |  |
| 33          | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK-Tematik <i>Stunting</i> | Jumlah tangki septik yang terbangun          | 125  | Unit       | -       | 125  | -      | -    | -    | Kec. Wetar, Kec. Wetar Utara           | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 34          | Pembangunan sumur dalam terlindungi  | Jumlah sumur dalam yang terbangun            | 162  | SR         | -       | 162  | -      | -    | -    | Kec. Wetar Timur                       | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| 35          | Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah                                       | Jumlah jaringan distribusi yang dikembangkan | 40   | SR         | -       | 40   | -      | -    | -    | Kec. Aru Tengah Timur                  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| <b>XIII</b> | <b>PROVINSI MALUKU UTARA</b>   |  |      |            |         |      |        |      |      |  |  |
| <b>KP 2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>                                      |  |      |            |         |      |        |      |      |  |  |
| 1           | Revitalisasi Sentra IKM minyak kelapa  | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi        | 1    | Sentra IKM | -       | -    | 1      | -    | -    | Kab. Halmahera Tengah                  | Kementerian Perindustrian                          |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|-------------------|---|
|     |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13  |
| 2   | Fasilitasi kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan  | Jumlah kapal perikanan bantuan yang tersedia termasuk di daerah perbatasan | 2    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Daruba       | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |
| 3   | Pengembangan Desa Digital (P3PD)   | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital                 | 2    | Desa  | -       | -    | -      | 1    | 1    | PKSN Daruba       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi               |
| 4   | Bumdes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa  | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes                                      | 2    | Desa  | -       | -    | -      | 1    | 1    | PKSN Daruba       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi               |
| 5   | Pelatihan masyarakat bidang tata kelola destinasi pariwisata, pelatihan manajemen <i>homestay</i> , <i>selam</i> , <i>paralayang</i> , <i>pilihan</i> , <i>TIC</i> , dan <i>Supporting</i> | Jumlah kegiatan pelatihan masyarakat yang terlaksana                       | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Patani Utara | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 6   | Pengembangan daya tarik wisata   | Jumlah pengembangan daya tarik wisata                                      | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | Kec. Patani Utara | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR  | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|--|------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|                 |  |  |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1               | 2  | 3  | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|                 |  |  |      |        |         |      |        |      |      |  | Kreatif/Badan<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif |
| 7               | Pengadaan kapal penangkapan ikan 5 GT                      | Jumlah kapal penangkapan Ikan 5 GT yang tersedia       | 18   | Unit   | -       | -    | 18     | -    | -    | Kec. Morotai Jaya  | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| 8               | Pengadaan <i>Cool Box</i>                                  | Jumlah <i>Cool Box</i> yang tersedia                   | 500  | Unit   | -       | -    | 500    | -    | -    | Kec. Morotai Jaya  | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan           |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>     |  |      |        |         |      |        |      |      |  |  |
| 1               | Pembangunan Bus air  | Jumlah Bus air yang terbangun                          | 2    | Unit   | -       | 1    | 1      | -    | -    | PKSN Daruba, Kec.<br>Morotai Selatan                           | Kementerian<br>Perhubungan                         |
| 2               | Pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN | Fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Morotai | 2    | Lokasi | -       | 1    | 1      | -    | -    | PKSN Daruba, Kec.<br>Morotai Selatan                           | Kementerian<br>Perhubungan                         |
| 3               | Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS                | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya           | 24   | Lokasi | -       | 20   | 4      | -    | -    | PKSN Daruba, Kec.<br>Morotai Jaya, Kec.<br>Morotai Utara, Kec. | Kementerian<br>Komunikasi dan<br>Informatika       |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 302 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|--|------|--------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |   |  |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
|     |   | di kelautan dan daerah pesisir   |      |        |         |      |        |      |      | Morotai Timur, Kec. Morotai Selatan Barat  |   |
| 4   | Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ Lastmile)                | Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika | 1    | Lokasi | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Daruba  | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| 5   | Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Morotai   | Panjang ruas jalan yang dibangun   | 43,1 | Km     | 14      | 9,7  | 9,7    | 9,7  | -    | PKSN Daruba  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |
| 6   | Pengadaan sarana transportasi darat   | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia                                       | 4    | Unit   | -       | 4    | -      | -    | -    | Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Jaya | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 7   | Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang | Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia                                    | 2    | Unit   | -       | 2    | -      | -    | -    | Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 303 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                    | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----------------|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|                 |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1               | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 8               | Pembangunan Jalan Strategis Desa Ruas Jalan Jln. Dalam Desa Gemia | Dibangunnya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 1,58 | Km    | -       | 1,58 | -      | -    | -    | Kec. Patani Utara                         | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 9               | Pembangunan Jalan Strategis Desa Ruas Jalan Wayabula-Tutuhu       | Dibangunnya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 1,85 | Km    | -       | 1,85 | -      | -    | -    | Kec. Morotai Selatan Barat                | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b>            |   |      |       |         |      |        |      |      |   |   |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa                                 | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 10   | Unit  | -       | 2    | 2      | 3    | 3    | Prov. Maluku Utara                        | Kementerian Dalam Negeri  |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah                     | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)               | 10   | Paket | 2       | 2    | 2      | 2    | 2    | Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Tengah | Kementerian Dalam Negeri  |
| 3               | Bantuan Sosial Pemerintah   | Persentase keluarga penerima manfaat yang   | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Tengah | Kementerian Sosial  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
|     |  | mendapatkan bantuan sosial pemerintah                                       |      |          |         |      |        |      |      |   |  |
| 4   | Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan   | Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun                         | 2    | Unit     | -       | -    | -      | 1    | 1    | PKSN Daruba (Kec. Morotai Selatan), Kec. Morotai Jaya | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 5   | Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana | Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi                                     | 1    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Daruba   | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 6   | Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga  | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan                              | 10   | Penyalur | -       | 2    | 2      | 2    | 4    | PKSN Daruba   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 7   | Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan   | Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi | 50   | Unit     | -       | -    | -      | -    | 50   | PKSN Daruba   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |
| 8   | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya  | Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun                       | 1    | Unit     | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Daruba   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral         |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-------------|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|             |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1           | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 9           | Pembangunan Puskesmas Buho-Buho, Sabatai, Morodadi               | Jumlah puskesmas yang dibangun                                   | 3    | Unit  | -       | -    | 3      | -    | -    | PKSN Daruba (Kec.Morotai Selatan), Kec. Morotai Timur   | Kementerian Kesehatan                              |
| 10          | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya                      | Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun            | 4    | Unit  | -       | -    | 1      | 3    | -    | PKSN Daruba (Kec. Morotai Selatan), Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Selatan Barat | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN     |
| 11          | Pembangunan kantor desa/kelurahan                                | Jumlah kantor desa/kelurahan yang dibangun                       | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Kec. Patani Utara   | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 12          | Pengadaan Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas Cio Gerong, Leo-Leo | Jumlah prasarana alat kesehatan puskesmas yang tersedia          | 2    | Paket | -       | -    | 2      | -    | -    | Kec. Morotai Selatan Barat  | Kementerian Kesehatan                              |
| 13          | Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah             | Jumlah jaringan distribusi dan sambungan rumah yang dikembangkan | 193  | SR    | -       | 193  | -      | -    | -    | Kec. Morotai Selatan Barat  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    |
| <b>XIV</b>  | <b>PROVINSI PAPUA BARAT</b>                                      |  |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| <b>KP 1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</b>                  |  |      |       |         |      |        |      |      |   |  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                      | 13   |
| 1               | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional                               | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Papua Barat                       | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2               | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Pulau Fani, Kabare  | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara                                | 2    | Paket | -       | -    | -      | 1    | 1    | Distrik Kep. Ayau, Distrik Waigeo Utara | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Pendampingan dan Fasilitasi Bagi Sentra Pengolahan Hasil Laut  | Pendampingan dan fasilitasi bagi sentra pengolahan hasil laut yang terlaksana | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Raja Ampat                         | Kementerian Perindustrian                                    |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |   |  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                              | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|-------------------------------------|--|
|                 |  |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                     |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                  | 13   |
| 1               | Penyediaan Titik Lokasi dan Pembangunan BTS            | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir     | 19   | Lokasi | -       | 19   | -      | -    | -    | Distrik Ayau, Kep. Ayau, Sausapor   | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b> |   |      |        |         |      |        |      |      |                                     |  |
| 1               | Rehabilitasi bangunan kantor desa                      | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi  | 10   | Unit   | -       | 2    | 2      | 3    | 3    | Prov. Papua Barat                   | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 2               | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah          | Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)     | 10   | Paket  | 2       | 2    | 2      | 2    | 2    | Kab. Raja Ampat, Tambraw            | Kementerian Dalam Negeri                           |
| 3               | Bantuan Sosial Pemerintah                              | Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah | 100  | %      | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Raja Ampat, Kab. Tambraw       | Kementerian Sosial                                 |
| 4               | Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan             | Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun                             | 2    | Unit   | -       | -    | 2      | -    | -    | Distrik Kep. Ayau, Distrik Sausapor | Kementerian Dalam Negeri                           |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

| NO.         | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-------------|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|             |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1           | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 5           | Pembangunan ruang guru beserta perabotnya  | Jumlah ruang guru beserta perabotnya yang terbangun           | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Kep. Ayau   | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi     |
| <b>XV</b>   | <b>PROVINSI PAPUA</b>  |   |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| <b>KP 1</b> | <b>PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN</b>   |   |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1           | Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua                      | Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional               | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | Prov. Papua   | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2           | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Jayapura, Tanah Merah, Merauke   | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara | 3    | Paket | -       | -    | -      | 3    | -    | PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke                               | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 3           | Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Yetetkun, Mindiptana, Hamadi, Batom, Waris, Biak, Merauke | Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara                | 7    | Paket | 1       | 1    | 2      | 1    | 2    | PKSN Merauke, Distrik Ninati, Distrik Mindiptana, Distrik Jayapura Selatan, | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan                     |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 309 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)           |
|-----------------|---|--|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|                 |   |  |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1               | 2   | 3  | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|                 |   |  |      |            |         |      |        |      |      | Distrik Batom, Distrik Waris, Distrik Biak Kota  | Pertanahan Nasional  |
| 4               | Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Yetetkun, Skouw, Sota | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara      | 3    | Paket      | -       | 1    | 1      | 1    | -    | Distrik Ninati, Distrik Muara Tami, Distrik Sota | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| <b>KP<br/>2</b> | <b>PENGEMBANGAN POTENSI<br/>KAWASAN PERBATASAN</b>  |  |      |            |         |      |        |      |      |  |  |
| 1               | Penyediaan sarana dan prasarana industri VCO skala kecil  | Jumlah sarana dan prasarana industri VCO skala kecil yang tersedia | 6    | Paket      | -       | -    | 6      | -    | -    | Prov. Papua                                      | Kementerian Perindustrian                                    |
| 2               | Bimtek Produksi Bagi Wirausaha IKM Kerajinan  | Jumlah Bimtek yang terlaksana                                      | 25   | IKM        | -       | 25   | -      | -    | -    | Kota Jayapura                                    | Kementerian Perindustrian                                    |
| 3               | Revitalisasi Sentra IKM Cokelat   | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi                              | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Jayapura                                    | Kementerian Perindustrian                                    |
| 4               | Bimtek Produksi Bagi Wirausaha IKM Pengolahan Ikan  | Jumlah Bimtek yang terlaksana                                      | 25   | IKM        | -       | 25   | -      | -    | -    | Kab. Biak Numfor                                 | Kementerian Perindustrian                                    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.       | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|------------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |   |   |      |            | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5          | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 5   | Revitalisasi Sentra IKM Meubel  | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi   | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Biak Numfor   | Kementerian Perindustrian   |
| 6   | Revitalisasi Sentra IKM Olahan Kelapa   | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi   | 1    | Sentra IKM | -       | 1    | -      | -    | -    | Kab. Sarmi   | Kementerian Perindustrian   |
| 7   | Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan Desa                        | Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes   | 21   | BUMDes     | -       | -    | 4      | 4    | 13   | Kab. Keerom, PKSN Merauke, PKSN Tanah Merah, PKSN Jayapura | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 8   | Satuan pemukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas | Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas | 7    | Kawasan    | -       | 1    | 2      | 2    | 2    | Kab. Keerom, PKSN Merauke                                  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 9   | Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal                         | Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal                                    | 400  | Orang      | -       | -    | 200    | 200  | -    | Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom                             | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.                 | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                         |
|-----|--|--|------|----------------------|---------|------|--------|------|------|-----------------------------------|--|
|     |  |  |      |                      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5                    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                | 13   |
| 10  | Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di daerah tertinggal                           | Meningkatnya nilai tambah Prukades di daerah tertinggal                                    | 3    | Unit                 | -       | -    | 1      | 1    | 1    | Kab. Boven Digoel,<br>Kab. Keerom | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 11  | Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana nya dikembangkan dan fungsional | Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas | 9    | Kawasan              | 2       | 1    | 2      | 2    | 2    | Kab. Keerom, PKSN<br>Merauke      | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 12  | Kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya                              | Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas                                       | 9    | Kawasan              | 2       | 1    | 2      | 2    | 2    | Kab. Keerom, PKSN<br>Merauke      | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 13  | SKPT Biak  | Tingkat kemandirian SKPT Biak (tingkat kemandirian (skala 1-5))                            | 5    | Skala<br>Kemandirian | -       | -    | -      | 5    | -    | Kab. Biak Numfor                  | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan                                   |
| 14  | Pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudi daya  | Terselesainya pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudi daya                              | 1    | Paket                | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Jayapura                     | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan                                   |



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 312 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR  | VOL. | SAT.              | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI        | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                              |
|-----|---|--|------|-------------------|---------|------|--------|------|------|---------------|---|
|     |   |  |      |                   | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |               |   |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5                 | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12            | 13  |
| 15  | Pembangunan sarana budi daya benih dan pakan bagi kelompok pembudi daya | Terselesaikannya pembangunan sarana budi daya benih dan pakan bagi kelompok pembudi daya   | 1    | Kelompok          | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Jayapura | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |
| 16  | SKPT Merauke yang mandiri   | Jumlah SKPT yang ditingkatkan kemandiriannya   | 5    | Skala Kemandirian | -       | -    | -      | -    | 5    | PKSN Merauke  | Kementerian Kelautan dan Perikanan  |
| 17  | Penataan Perkampungan tradisional sebagai pendukung "Wisata Perbatasan" | Jumlah Kawasan Pariwisata yang difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III | 1    | Kawasan           | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Jayapura | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 18  | Pembangunan <i>homestay</i> kampung terapung perbatasan                 | Jumlah kawasan pariwisata yang difasilitasi pengembangan destinasi pariwisata regional III | 1    | Kawasan           | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Jayapura | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 313 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|--|------|----------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |  |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
| 19  | Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah perbatasan, tertinggal dan pascabencana | Terselesainya revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah perbatasan, tertinggal dan pascabencana | 1    | Unit     | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)                    | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 |
| 20  | Pelatihan kewirausahaan  | Jumlah pelatihan kewirausahaan   | 240  | Orang    | -       | -    | -      | 240  | -    | PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Sarmi | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 |
| 21  | Koperasi/UKM sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan   | Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya   | 2    | Kegiatan | -       | -    | -      | 1    | 1    | PKSN Merauke  | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                 |
| 22  | Pengembangan Desa Digital (P3PD)   | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital   | 1    | Desa     | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Tanah Merah                                      | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 23  | Pembangunan Gudang/Depo Non-SRG  | Jumlah gudang/Depo Non-SRG yang dibangun   | 2    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Jayapura, PKSN Merauke                           | Kementerian Perdagangan   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.     | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                         | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|----------|---------|------|--------|------|------|--------------------------------|--|
|     |  |   |      |          | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5        | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                             | 13   |
| 24  | Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang diberikan pembinaan | Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan                                 | 10   | Kegiatan | -       | -    | -      | -    | 10   | PKSN Jayapura                  | Kementerian Perdagangan                            |
| 25  | Pembangunan Pasar Tipe B   | Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya               | 2    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Jayapura, PKSN Merauke    | Kementerian Perdagangan                            |
| 26  | Pembangunan Pasar Tipe C   | Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya               | 2    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 2    | PKSN Jayapura, PKSN Merauke    | Kementerian Perdagangan                            |
| 27  | Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat                              | Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi                              | 1    | Unit     | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Merauke (Distrik Merauke) | Kementerian Perdagangan                            |
| 28  | Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra-Panen                      | Jumlah alat dan mesin pertanian pra-panen yang difasilitasi                   | 10   | Unit     | -       | -    | -      | -    | 10   | PKSN Jayapura                  | Kementerian Pertanian                              |
| 29  | Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yanbe    | Terselesainya Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yanbe | 2    | Unit     | -       | 1    | 1      | -    | -    | PKSN Jayapura                  | Kementerian Pertanian                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.        | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|-------------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |   |   |      |             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5           | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 30  | Rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudi daya                        | Terselesaikannya rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudi daya | 1    | Paket       | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Jayapura                                   | Kementerian Perindustrian                          |
| 31  | Pengembangan Aplikasi Informatika Petani dan Nelayan <i>Go Online</i> | Jumlah <i>user</i> aktif petani dan nelayan yang mendaftar      | 500  | <i>User</i> | -       | -    | -      | -    | 500  | PKSN Merauke                                    | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| 32  | Pengembangan Aplikasi Informatika UMKM <i>Go Online</i>               | Jumlah <i>user</i> aktif <i>selling</i> UMKM                    | 250  | <i>User</i> | -       | -    | -      | -    | 250  | PKSN Merauke                                    | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| 33  | Pengadaan ketingting dan alat-alat nelayan                            | Jumlah ketingting dan alat nelayan yang tersedia                | 1    | Paket       | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Okaba                                   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 34  | Pengadaan perahu  | Jumlah perahu yang tersedia                                     | 2    | Unit        | -       | -    | -      | 2    | -    | Distrik Web                                     | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |
| 35  | Pembangunan tambatan perahu   | Jumlah tambatan perahu yang terbangun                           | 4    | Unit        | -       | -    | -      | 4    | -    | Distrik Supiori Barat,<br>Distrik Supiori Utara | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                      | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)   |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 36  | Pengadaan keramba jaring apung (teripang)  | Jumlah keramba jaring apung (teripang) yang tersedia  | 15   | Unit  | -       | -    | -      | 15   | -    | Distrik Supiori Barat<br>Distrik Kep. Aruri | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan   |
| 37  | Pengadaan perahu perikanan tangkap   | Jumlah perahu ikan tangkap yang tersedia  | 10   | Unit  | -       | -    | -      | 10   | -    | Distrik Kep. Aruri                          | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan   |
| 38  | Pembangunan keramba perikanan laut   | Jumlah keramba laut yang terbangun  | 5    | Unit  | -       | -    | -      | 5    | -    | Distrik Supiori Timur                       | Kementerian<br>Kelautan dan<br>Perikanan   |
| 39  | Pelatihan masyarakat bidang tata kelola destinasi pariwisata, pelatihan manajemen <i>homestay</i> , <i>selam</i> , <i>paralayang</i> , <i>pilihan</i> , <i>TIC</i> , dan <i>supporting</i> | Jumlah kegiatan pelatihan masyarakat bidang yang terlaksana                                       | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | Distrik Biak Kota                           | Kementerian<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi<br>Kreatif/Badan<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif |
| 40  | Pengembangan daya tarik wisata   | Jumlah kegiatan daya tarik wisata yang dikembangkan (Panggung Kesenian/ Pertunjukan, Kios Cendera | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | Distrik Biak Kota                           | Kementerian<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi<br>Kreatif/Badan                                      |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                         |
|-----------------|--|---|------|------|---------|------|--------|------|------|-------------------|--|
|                 |  |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                   |  |
| 1               | 2  | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                | 13   |
|                 |  | mata, Ruang Ganti dan<br>atau Toilet, dan <i>Boardwalk</i> )  |      |      |         |      |        |      |      |                   | Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif  |
| 41              | Pembangunan <i>Long Storage</i>  | Jumlah <i>Long Storage</i> yang<br>terbangun  | 2    | Buah | 2       | -    | -      | -    | -    | Distrik Elikobal  | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat                   |
| <b>KP<br/>3</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>KONEKTIVITAS</b>                       |   |      |      |         |      |        |      |      |                   |  |
| 1               | Peningkatan jalan strategis<br>desa di daerah perbatasan                     | Ditingkatkannya panjang<br>jalan strategis desa di lokasi<br>prioritas perbatasan daerah<br>tertinggal          | 6    | Km   | -       | -    | 2      | 2    | 2    | Kab. Boven Digoel | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
| 2               | Pembangunan atau<br>peningkatan jalan desa<br>strategis di daerah tertinggal | Terbangunnya atau<br>ditingkatkannya panjang<br>jalan desa strategis yang<br>fungsional di daerah<br>tertinggal | 1,9  | Km   | -       | -    | -      | 1,9  | -    | Kab. Boven Digoel | Kementerian Desa,<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 318 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL.  | SAT. | CAPAIAN |       | TARGET |      |      | LOKASI            | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|-------|------|---------|-------|--------|------|------|-------------------|---|
|     |   |   |       |      | 2020    | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |                   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4     | 5    | 6       | 7     | 8      | 9    | 10   | 12                | 13  |
| 3   | Peningkatan jalan strategis Desa di daerah perbatasan                         | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 4     | Km   | -       | -     | 2      | 2    | -    | Kab. Keerom       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 4   | Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan                         | Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal | 6     | Km   | -       | -     | 2      | 2    | 2    | Kab. Supiori      | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 5   | Pembangunan Jalan Towe Hitam - Oksibil  | Panjang ruas jalan yang dibangun  | 50,35 | Km   | 5,8     | 12,25 | 2,3    | 15   | 15   | Kab. Peg. Bintang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   |
| 6   | Pengembangan Terminal Skouw   | Jumlah terminal barang yang dibangun/ ditingkatkan  | 1     | Unit | 1       |       | -      | -    | -    | PKSN Jayapura     | Kementerian Perhubungan   |
| 7   | Percepatan pembangunan dan operasionalisasi terminal barang internasional dan | Jumlah terminal barang internasional yang terbangun   | 1     | Unit | -       | -     | 1      | -    | -    | PKSN Jayapura     | Kementerian Perhubungan   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                         | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|---|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|--------------------------------|--|
|     |   |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                |  |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                             | 13   |
|     | <i>showcase</i> di kawasan PLBN Skouw             |   |      |        |         |      |        |      |      |                                |  |
| 8   | Pengembangan Bandara Sentani                      | Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan                                 | 1    | Unit   | -       | 1    | 1      | 1    | -    | PKSN Jayapura                  | Kementerian Perhubungan                            |
| 9   | Pembangunan jembatan udara di Bandara Tanah Merah | Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan                   | 1    | Unit   | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | PKSN Tanah Merah               | Kementerian Perhubungan                            |
| 10  | Pengembangan Jembatan Udara Bandara Manggelum     | Jumlah jembatan udara yang ditingkatkan                                     | 1    | Paket  | -       | 1    | 1      | 1    | 1    | PKSN Tanah Merah               | Kementerian Perhubungan                            |
| 11  | Pengembangan pelabuhan Merauke                    | Jumlah pelabuhan yang dikembangkan  | 1    | Unit   | -       | 1    | 1      | 1    | -    | PKSN Merauke                   | Kementerian Perhubungan                            |
| 12  | Pengembangan Bandara Mopah                        | Jumlah bandara yang dibangun  | 1    | Unit   | 1       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Merauke                   | Kementerian Perhubungan                            |
| 13  | Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS       | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir | 3    | Lokasi | -       | 3    | -      | -    | -    | PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.   | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|--------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |   |      |        | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5      | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 14  | Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Internet) | Jumlah titik lokasi Bakti Internet yang dibangun                            | 1    | Lokasi | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Merauke   | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |
| 15  | Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS                            | Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir | 141  | Lokasi | -       | 80   | 61     | -    | -    | PKSN Merauke (Distrik Sota), Distrik Tabonji, Distrik Waan, Distrik Kimaam, Distrik Okaba, Distrik Naukenjerai, Distrik Ulilin, Distrik Sarmi, Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Waropko, Distrik Sesnuk, Distrik Ninati, Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, Distrik Tarub, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mufinop, Distrik Murkim, Distrik Waris, Distrik Arso | Kementerian Komunikasi dan Informatika             |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 321 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|--|---|------|------|---------|------|--------|------|------|---|---|
|     |  |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13  |
|     |  |   |      |      |         |      |        |      |      | Timur, Distrik Towe,<br>Distrik Web, Distrik<br>Yaffi, Distrik Supiori<br>Barat, Distrik Supiori<br>Utara |   |
| 16  | Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Kampung Ninaty-Simpang Boda (PNG) | Panjang jalan yang ditingkatkan                           | 2,5  | Km   | -       | 2,5  | -      | -    | -    | PKSN Tanah Merah (Distrik Ninati)   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 17  | Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Kampung Skouw Sae                 | Panjang jalan desa strategis yang terbangun/ ditingkatkan | 1    | Km   | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 18  | Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Jl. Skouw Sae                     | Panjang jalan desa strategis yang terbangun/ ditingkatkan | 1,35 | Km   | -       | 1,35 | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 19  | Pengadaan sarana transportasi darat  | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia            | 1    | Unit | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)  | Kementerian Desa, Pembangunan                                     |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 322 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                           | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                                       | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|-------------------------------------|------|------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |  |                                     |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2  | 3                                   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
|     |  |                                     |      |      |         |      |        |      |      |  | Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi                   |
| 20  | Pembangunan jalan akses<br>PLBN Yetetkun                               | Panjang jalan yang<br>dibangun      | 39   | Km   | 10      | 7,25 | 7,25   | 7,25 | 7,25 | PKSN Tanah Merah<br>(Distrik Ninati)         | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat |
| 21  | Pembangunan jalan akses<br>Terminal Barang Internasional<br>PLBN Skouw | Panjang ruas jalan yang<br>dibangun | 0,3  | Km   | -       | 0,3  | -      | -    | -    | PKSN Jayapura<br>(Distrik Jayapura<br>Utara) | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat |
| 22  | Pembangunan jalan perbatasan<br>Papua                                  | Panjang ruas jalan yang<br>dibangun | 30   | Km   | 6       | 6    | 6      | 6    | 6    | PKSN Jayapura                                | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat |
| 23  | Pembangunan jembatan Kali<br>Bian                                      | Jumlah jembatan yang<br>dibangun    | 1    | Unit | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Merauke                                 | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 24  | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Bandar Udara Batom                                  | Jumlah prasarana Bandar Udara Batom yang direhab/dipelihara | 1    | Paket | 1       | -    | -      | -    | -    | Distrik Batom  | Kementerian Perhubungan   |
| 25  | Peningkatan/pemantapan Bandar Udara Batom   | Jumlah bandar udara yang ditingkatkan                       | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Batom  | Kementerian Perhubungan   |
| 26  | Pembangunan Pelabuhan Merauke   | Jumlah pelabuhan yang terbangun                             | 1    | Unit  | -       | -    | 1      |      |      | Distrik Towe   | Kementerian Perhubungan   |
| 27  | Pengadaan sarana transportasi darat   | Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia              | 5    | Unit  | -       | 5    | -      | -    | -    | Distrik Waris, Distrik Towe, Distrik Kimaam, Distrik Merauke | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 28  | Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Muting IV-Muting V         | Panjang ruas jalan yang terbangun                           | 2    | Km    | -       | 2    | -      | -    | -    | Distrik Ulilin   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 29  | Pengadaan sarana transportasi perairan di bawah 20 dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang | Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia           | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Sesnuk   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -

| NO.             | PROVINSI/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----------------|--|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|                 |  |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1               | 2  | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| <b>KP<br/>4</b> | <b>PENGEMBANGAN<br/>INFRASTRUKTUR SOSIAL<br/>DASAR</b> |  |      |       |         |      |        |      |      |   |  |
| 1               | Pelayanan Administrasi<br>Kependudukan di Daerah       | Pelayanan Administrasi<br>Kependudukan di Daerah<br>(KTP el, KIA, Akta<br>Kelahiran)     | 45   | Paket | 9       | 9    | 9      | 9    | 9    | Kab. Mimika, Kab.<br>Boven Digoel, Kab.<br>Peg. Bintang, Kab.<br>Keerom, Kab. Sarmi,<br>Kab. Biak Numfor,<br>Kab. Supiori, PKSN<br>Jayapura, PKSN<br>Tanah Merah, PKSN<br>Merauke | Kementerian<br>Dalam Negeri                        |
| 2               | Bantuan Sosial Pemerintah                              | Persentase Keluarga<br>Penerima Manfaat yang<br>mendapatkan bantuan<br>sosial pemerintah | 100  | %     | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | Kab. Mimika, Kab.<br>Boven Digoel, Kab.<br>Peg. Bintang, Kab.<br>Keerom, Kab. Sarmi,<br>Kab. Biak Numfor,<br>Kab. Supiori, PKSN<br>Merauke, PKSN<br>Jayapura                      | Kementerian Sosial                                 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 325 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)                |
|-----|---|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|---|
|     |   |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13  |
| 3   | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih   | Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan | 350  | KK    | -       | -    | -      | 200  | 150  | Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom, Kab. Supiori   | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| 4   | Rehabilitasi bangunan kantor desa   | Jumlah kantor desa yang direhabilitasi                            | 10   | Unit  | -       | 2    | 2      | 3    | 3    | PKSN Merauke (Distrik Semangga, Distrik Merauke), Distrik Tabonji, Distrik Elokobel, Distrik Kombut, Distrik Oksamol, Distrik Mofinop, Distrik Yaffi, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Timur | Kementerian Dalam Negeri  |
| 5   | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (Sarana-Prasarana dan Alat Kesehatan) | Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan                | 14   | Paket | -       | 14   | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Sota, Distrik Waan, Distrik Kimaam   | Kementerian Kesehatan   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 326 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR                                  | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI   | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---|--|------|-------|---------|------|--------|------|------|--|--|
|     |   |  |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12   | 13   |
| 6   | Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas   | Jumlah alat kesehatan yang tersedia        | 3    | Paket | -       | 3    | -      | -    | -    | PKSN Merauke (Distrik Semangga, Distrik Sota), Naukenjerai   | Kementerian Kesehatan                                    |
| 7   | Pembangunan Puskesmas   | Jumlah puskesmas yang terbangun            | 1    | Unit  | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)   | Kementerian Kesehatan                                    |
| 8   | Pembangunan SPBU di Skouw   | Terselesaikannya pembangunan SPBU di Skouw | 1    | Paket | -       | -    | 1      | -    | -    | PKSN Jayapura  | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral               |
| 9   | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya | Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi     | 26   | Unit  | -       | 26   | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Sarmi                             | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 10  | Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya                                     | Jumlah rumah dinas guru yang terbangun     | 13   | Unit  | -       | 13   | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Waan, Distrik Kimaam, Distrik Waropko, Distrik Supiori Barat | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.    | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|---|------|---------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |         | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5       | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
| 11  | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya                                      | Jumlah RKB yang terbangun   | 4    | Unit    | -       | 4    | -      | -    | -    | PKSN Merauke (Distrik Sota), Distrik Waropko          | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 12  | Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya | Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi   | 1    | Unit    | -       | 1    | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara)                | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 13  | Pembangunan baru SMP   | Jumlah SMP yang dibangun  | 1    | Sekolah | -       | -    | -      | -    | 1    | PKSN Jayapura   | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 14  | Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK                                       | Jumlah IPAL Skala Permukiman dengan jumlah layanan minimal 25 KK-Tematik Penanggulangan Kemiskinan yang terbangun | 13   | Unit    | -       | 13   | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Okaba | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          |
| 15  | Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya  | Jumlah rumah secara swadaya yang ditingkatkan kualitasnya   | 300  | Unit    | -       | 300  | -      | -    | -    | PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara)                | Kementerian Pekerjaan Umum                               |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 328 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI  | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|---|------|------|---------|------|--------|------|------|---|--|
|     |  |   |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12  | 13   |
|     |  |   |      |      |         |      |        |      |      |   | dan Perumahan<br>Rakyat                                  |
| 16  | Pembangunan balai pertemuan umum kecamatan   | Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun | 4    | Unit | -       | -    | 1      | -    | 3    | Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Tabonji, Distrik Naukenjerai, Distrik Towe | Kementerian Dalam Negeri                                 |
| 17  | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK-Tematik <i>Stunting</i> | Jumlah tangki septik yang terbangun                 | 55   | Unit | -       | 55   | -      | -    | -    | Distrik Waropko   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          |
| 18  | Pembangunan ruang guru beserta perabotnya  | Jumlah ruang guru yang dibangun                     | 7    | Unit | -       | 7    | -      | -    | -    | Distrik Waan, Distrik Okaba   | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 19  | Pengadaan pusling laut   | Jumlah pusling laut yang tersedia                   | 1    | Unit | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Mimika Timur Jauh   | Kementerian Kesehatan                                    |





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 329 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR                                       | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                    | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA) |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|---------------------------|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                           |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                        | 13   |
| 20  | Pengadaan pusling perairan                                     | Jumlah pusling perairan yang tersedia           | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Mimika Timur Jauh | Kementerian Kesehatan                              |
| 21  | Pengadaan generator dan pemasangan instalasi listrik Puskesmas | Jumlah generator puskesmas yang tersedia        | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Mimika Timur Jauh | Kementerian Kesehatan                              |
| 22  | Pembangunan rumah dinas Puskesmas                              | Jumlah rumah dinas puskesmas yang dibangun      | 1    | Unit  | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Mimika Timur Jauh | Kementerian Kesehatan                              |
| 23  | Instalasi pengolah limbah                                      | Jumlah instalasi pengolah limbah yang terbangun | 1    | Paket | -       | 1    | -      | -    | -    | Distrik Mimika Timur Jauh | Kementerian Kesehatan                              |
| 24  | Penyediaan prasarana pusling roda dua Puskesmas                | Jumlah pusling yang tersedia                    | 2    | Unit  | -       | 2    | -      | -    | -    | Distrik Kombut            | Kementerian Kesehatan                              |
| 25  | Pembangunan rumah petugas kesehatan                            | Jumlah rumah petugas kesehatan yang terbangun   | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Distrik Sarmi             | Kementerian Kesehatan                              |
| 26  | Pembangunan Gedung <i>Health Care Center</i> (HCC) 119         | Terbangunnya Gedung HCC 119                     | 1    | Unit  | -       | -    | -      | 1    | -    | Distrik Biak Kota         | Kementerian Kesehatan                              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 330 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR   | VOL. | SAT.  | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI                               | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|--|---|------|-------|---------|------|--------|------|------|--------------------------------------|--|
|     |  |   |      |       | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                                      |  |
| 1   | 2  | 3   | 4    | 5     | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12                                   | 13   |
| 27  | Bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SD/SMP) | Jumlah bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SD/SMP) | 2    | Paket | 2       | -    | -      | -    | -    | Distrik Arso Timur,<br>Distrik Yaffi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 28  | Peningkatan titik penyalur program BBM satu harga                                | Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan  | 1    | Unit  | -       | -    | -      | -    | 1    | Distrik Jair                         | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral               |
| 29  | Pembangunan jaringan distribusi listrik  | Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun                                       | 21   | Unit  | -       | 21   | -      | -    | -    | Distrik Iwur                         | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN           |
| 30  | Pembangunan rumah khusus   | Jumlah rumah khusus yang terbangun  | 12   | Unit  | -       | 12   | -      | -    | -    | Distrik Waropko                      | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 331 -

| NO. | PROVINSI/<br>KEGIATAN     | INDIKATOR                           | VOL. | SAT. | CAPAIAN |      | TARGET |      |      | LOKASI         | INSTANSI<br>PELAKSANA<br>(KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA)       |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|------|------|---------|------|--------|------|------|----------------|--|
|     |                           |                                     |      |      | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                |  |
| 1   | 2                         | 3                                   | 4    | 5    | 6       | 7    | 8      | 9    | 10   | 12             | 13   |
| 31  | Pembangunan Broncaptering | Jumlah Broncaptering yang terbangun | 50   | SR   | -       | 50   | -      | -    | -    | Distrik Murkim | Kementerian<br>Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan<br>Rakyat |

BAB VI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 332 -

## BAB VI PENUTUP

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan penjabaran visi, misi, dan prioritas Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 yang terdiri atas Batang Tubuh dan Lampiran yang memuat Narasi Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Matriks Kegiatan Pengelolaan BWN-KP 2020-2024, sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah pengelolaan perbatasan merujuk pada 3 (tiga) aspek yaitu: Pertama, Visi/Misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Kedua, identifikasi kebutuhan dasar masyarakat dan *multiplier effect* yang menjadi agenda strategis. Ketiga, RPJMN Tahun 2020-2024 melalui skema: (1) PLBN, PPKT, dan batas wilayah, dengan pengelolaan diarahkan pada penguatan pertahanan dan keamanan, (2) Lokpri sebagai zona penyangga PLBN, dengan penanganan diarahkan pada aspek pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas, dan tata kelola pemerintahan; serta (3) Lokpri dan kecamatan sebagai *hinterland* pusat pertumbuhan PKSN, dengan pengelolaan diarahkan pada pengembangan hulu-hilir ekonomi komoditas unggulan. Kegiatan kementerian/lembaga mengacu pada lokus PLBN, PPKT, PKSN, dan Lokpri dimaksud.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 menjadi titik tolak pembangunan Kawasan Perbatasan negara, yang juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju. Hal tersebut dilakukan melalui upaya-upaya yang mendorong wilayah negara yang aman, tertib, dan maju, dengan memperkuat ketahanan nasional yang didukung dengan pembentukan pusat/sentra pertumbuhan baru (ekonomi, industri, perdagangan) di Kawasan Perbatasan negara, terutama di 18 (delapan belas) PKSN dan 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan pedoman nasional dan acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan di pusat dan daerah dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan secara terpadu, untuk memperkuat kedaulatan negara serta mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen dinamis, penyesuaian Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dilakukan melalui Renaksi Pengelolaan BWN-KP sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Keberhasilan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -

Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong di Kawasan Perbatasan Negara, dilaksanakan melalui 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi dalam Nawacita Kedua Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dengan memberikan penekanan dan fokus pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu: (1) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan (2) meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lain yang tidak disebutkan tetap dilakukan dalam mendukung pencapaian visi dan misi di atas.

Pengelolaan BWN-KP merupakan bentuk hadirnya negara di perbatasan negara. Pada dimensi batas wilayah (*border dimension*) hal tersebut mencerminkan semangat kedaulatan negara. Sementara pada dimensi kawasan (*frontier dimension*) perbatasan negara bukan hanya terbatas pada wilayah pinggiran secara ruang fisik, melainkan juga wilayah yang secara fungsional menjadi pintu keluar-masuk dari dan menuju NKRI. Untuk itu pengelolaan BWN-KP juga harus mencerminkan semangat mewujudkan beranda depan dan beranda penghubung internasional, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan berkontribusi terhadap terwujudnya kawasan antarnegara yang kondusif. Pengelolaan BWN-KP harus menjadi konsensus kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan  
Administrasi Hukum,



Sylvanna Djaman